WALIKOTA MATARAM

DOKUMEN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA MATARAM
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

DISAMPAIKAN
DI DEPAN SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM

KOTA MATARAM
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram Tahun Anggaran 2020 sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram Tahun Anggaran 2020 ini merupakan wujud transparansi penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Mataram selama kurun waktu tahun 2020, selain itu laporan ini juga disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari berjalannnya roda pemerintahan selama periode tahun 2020.

Dengan penyajian LKPJ ini diharapkan dapat memberi refleksi nyata bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kota Mataram untuk dapat mengevaluasi kinerjanya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Sehingga kedepannya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan lebih produktif, efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Dengan demikian kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram selama tahun 2020. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, sehingga akan terwujud Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.

Mataram, 25 Januari 2021
12 Jumadil Akhir 1442H

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 DASAR HUKUM I-2
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH I-4
1.3 DATA UMUM DAERAH I-6
1.3.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH..... I-6
1.3.2 JUMLAH PENDUDUK..... I-11
1.3.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK I-12
1.3.4 JUMLAH PNS KOTA MATARAM ……...I-12
1.3.5 REALISASI PENDAPATAN KOTA MATARAM MENURUT JENIS PENDAPATAN TAHUN 2020 ……I-15
1.3.6 REALISASI BELANJA KOTA MATARAM MENURUT JENIS BELANJA TAHUN 2020 ……...I-28
1.3.7 REALISASI PEMBIAYAAN KOTA MATARAM MENURUT JENIS PEMBIAYAAN TAHUN 2020 ……

BAB II PENJABARAN APBD . II- 31
2.1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH …….II- 34
2.1.1 Penganggaran Pendapatan Asli Daerah……..... II-38
2.1.2 Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ……..... II-42
2.1.3 Penganggaran Lain – Lain PAD yang Sah …….. II-42
2.1.4 Penganggaran Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Dana Perimbangan …… II-44
2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH …….. II- 54
2.2.1 Belanja Tidak Langsung …….. II-55
2.2.2 Belanja Langsung ……..... II-64
2.3 SURPLUS/DEFISIT APBD …….. II-76

2.4 PEMBIAYAAN DAERAH ..... II - 77
2.5 SILPA ..... II - 82

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ..... III- 83
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan..... III- 83
3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... III- 83
3.1.2 Aspek Pelayanan Umum ..... III- 87
3.1.2.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... III- 94
3.1.2.2 Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.... III- 99
3.1.2.3 Layanan Urusan Pilihan..... III- 105
3.1.2.4 Penunjang Urusan..... III- 107
3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah .....III- 108
3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... III- 112
3.3 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... III- 152
3.4 Pelaksanaan Urusan Pilihan. ..... III- 211
3.5 Kebijakan Strategis Yang DItetapkan ..... III- 266
3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2019. III- 271

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN ..... IV- 300
4.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ..... IV- 300
4.1.1 Dasar Hukum ..... IV- 301
4.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan ..... IV- 302
4.1.3 Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya ..... IV- 302
4.1.4 Sumber dan Jumlah Anggaran ..... IV- 303
4.1.5 Permasalahan dan Solusi ..... IV- 304

BAB V PENUTUP ..... V- 305

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2020	I- 8
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2020	I- 12
Tabel 1.3	Jumlah PNS Kota Mataram Menurut Kelompok Pangkat Dan Golongan Tahun 2020	I- 13
Tabel 1.4.	Jumlah PNS Kota Mataram Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	I- 13
Tabel 1.5.	Jumlah PNS Kota Mataram berdasarkan Jenjang Pendidikan	I- 15
Tabel 1.6	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2020	I- 16
Tabel 1.7	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kota Mataram Tahun Anggaran 2020	I- 17
Tabel 1.8	Pendapatan Tahun Anggaran 2020 - 2019	I- 26
Tabel 1.9	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	I- 28
Tabel 1.10	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019	I- 29
Tabel 1.11	Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	I- 30
Tabel 3.1	Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat	III- 83
Tabel 3.2.	Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum	III- 87
Tabel 3.3	Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah	III- 108
Tabel 3.4	Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III- 112
Tabel 3.5	Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	III- 152
Tabel 3.6	Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pilihan dan Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang	III- 211
Tabel 3.7	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	III- 266
Tabel 3.8	Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah	III- 271
Tabel 4.1	Deskripsi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2020	IV- 302
Tabel 4.2	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Mataram Tahun 2020	IV- 303
Tabel 4.3	Rincian JUmlah dan Realisasi Tugas Pembantuan di	

Pemerintah Kota Mataram TA 2020 ..... IV- 304
Tabel 4.4 Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan Kota Mataram Tahun 2020 ..... IV- 304

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Kota Mataram Provinsi NTB ..... I- 7
Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Kota Mataram Tahun 2020 ..... I- 8

BAB I
PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kekuatan bagi pengembangan otonomi daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Berlandaskan asas desenteralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, oleh karenanya secara periodik Kepala Daerah menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada DPRD serta menginformasikan laporan tersebut kepada masyarakat.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang ini mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

Tujuan yang hendak disampaikan yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari berjalannnya roda pemerintahan selama selama periode ttahun 2020. Disamping itu laporan keterangan pertanggungjawaban ini juga bertujuan untuk melihat seberapa efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tingkat produktivitas daerah serta menjaga asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tentu saja melalui pengawasan DPRD

LKPJ Walikota dalam akhir tahun anggaran 2020 sebagai sebuah laporan tahunan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menurut laporan capaian

indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2020.

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2020 didasari oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Kepala Daerah Kota Mataram

Visi Kota Mataram tahun 2016-2021 yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”.**

Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:

1. Kota Mataram, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan

dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.

2. Maju, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.
3. Religius, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
4. Berbudaya, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

2. Misi Kepala Daerah Kota Mataram

Kemudian Visi Kota Mataram ini dituangkan ke dalam 5 misi yaitu :

Misi 1, Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.

Misi 2, Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.

Misi 3, Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera

Misi 4, Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Misi 5, Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis, seperti luas wilayah, batas wilayah, topografi, iklim, jenis tanah, kondisi air dan penggunaan lahan

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2007 tentang Kode Wilayah dan Administrasi Pemerintahan pada lampirannya menyebutkan luas wilayah Kota Mataram adalah 6.130 (enam ribu seratus tiga puluh) hektar. Kota Mataram terletak di ujung bagian barat Pulau Lombok yaitu pada titik koordinat 116^{o}04’ - 116^{o}10’ Bujur Timur dan 08^{o}33’ - 08^{o}38’ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
- Sebelah Barat : Selat Lombok.

Luas wilayah Kota Mataram 61,30 Km^2 (6.130 Ha) atau 0,30% dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km^2), menjadikan Kota Mataram sebagai wilayah terkecil dari kabupaten/kota yang ada.

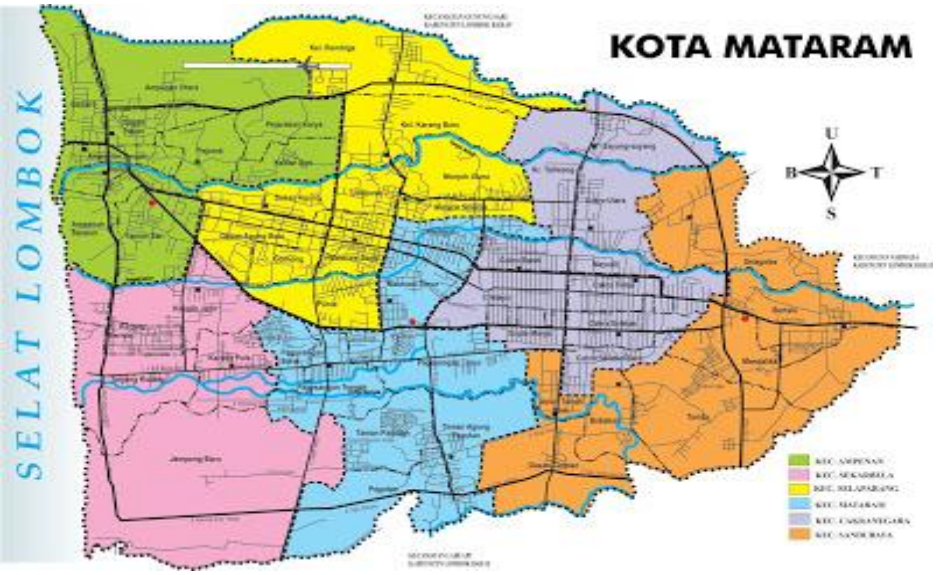

Gambar 1.1. Peta Kota Mataram Provinsi NTB

Berdasarkan luas wilayah perkecamatan, Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan terluas di Kota Mataram yaitu dengan luas 1.077 Ha atau 17,57% sementara Kecamatan Ampenan merupakan kecamatan terkecil di Kota Mataram yaitu dengan 946,00 Ha atau 15,43% sebagaimana Gambar berikut:

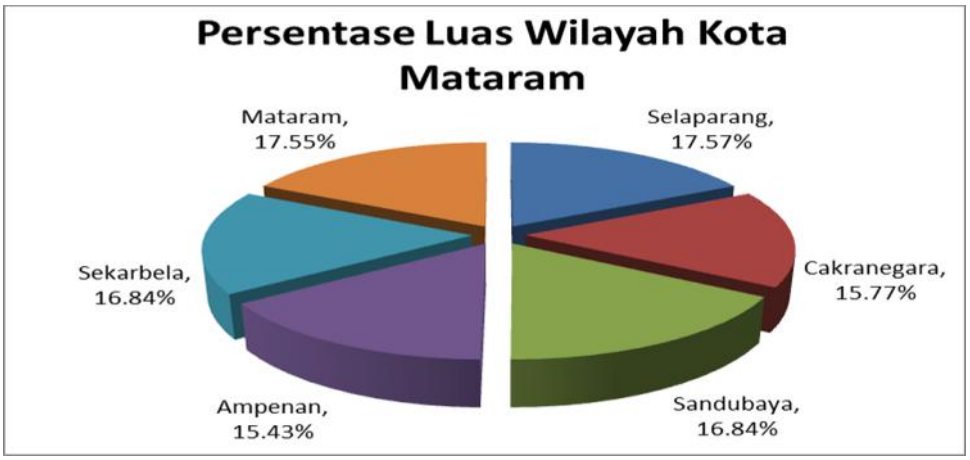

Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2020

Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah Kecamatan, 50 Kelurahan dan 325 lingkungan. Kecamatan Cakranegara memiliki jumlah wilayah lingkungan terbanyak yaitu 73 lingkungan yang tersebar di 10 kelurahan, sedangkan Kecamatan Sekarbela memiliki jumlah wilayah lingkungan terkecil yaitu 36 lingkungan yang tersebar di 5 kelurahan, jelasnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan
1	Ampenan	9,46	10	***55***
2	Sekarbela	10,32	5	***36***
3	Mataram	10,76	9	***55***
4	Selaparang	10,77	9	***61***
5	Cakranegara	9,67	10	***73***
6	Sandubaya	10,32	7	***45***
Jumlah		**61,30**	**50**	***325***

Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Mataram 2020

a. Topografi

Topografi wilayah Kota Mataram bervariasi dari datar sampai agak curam dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Lereng 0–2%, bentuk wilayah datar, seluas 4.652,057 Ha (75,9 %)
- Lereng 2–8%, bentuk wilayah agak landai, seluas 1.299,147 Ha (21,20%)
- Lereng 8-15%, bentuk wilayah bergelombang, seluas 174,283 Ha (2,84 %)
- Lereng 15-25%, bentuk wilayah curam, seluas 4,568 Ha (0,07%)

Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Mataram adalah hamparan datar.

Ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara mencapai± 25 m dpl, Kecamatan Mataram ± 15m dpl dan Kecamatan Ampenan ± 5m dpl dari permukaan laut termasuk daerah pantai.

b. Geologi dan Jenis Tanah

Satuan batuan di Kota Mataram terdiri dari batuan gunungapi, batuan sedimen,serta batuan terobosan yang umurnya berkisar dari jaman tersier sampai kuarter. Formasi batuan yang terbentuk adalah Formasi Kalipalung (*TQp*) yang mempunyai anggota Selayar (*TQs*), Formasi Kalibalak (*TQb*), dan Formasi Lekopiko (*Qvl*) dengan jenis batuan sebagai berikut :

- Formasi Kalipalung : Breksi gampingan dan lava.
- Anggota Selayar : Batu pasir tuffan dan batu lempung tuffan dengan sisipan tipis karbon.
- Formasi Kalibabak : Breksi dan lava.
- Formasi Lekopiko : Tuff berbatu apung, breksi lahar, dan lava.

Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, dan pecahan koral tersebar hampir di seluruh Kota Mataram, khususnya di daerah muara sungai. Kota termasuk dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara Barat, yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur

dan Busur Banda sebelah barat. Busur tersebut terbentang dari Pulau Jawa ke Nusa Tenggara dan melengkung mengitari Laut Banda. Kota Mataram sendiri tidak memiliki daerah pegunungan dengan timbulan kasar.

c. Hidrologi

Potensi air tanah (*aquifer*) yang cukup besar dapat dilihat di beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga (Kecamatan Selaparang), Kelurahan Sayang Sayang (Kecamatan Cakranegara), dan Kecamatan Mataram memiliki kedalaman akuifer 5-7m. Sedangkan Kelurahan Monjok dan Kelurahan Dasan Agung bagian utara (Kecamatan Selaparang) memiliki kedalaman air tanah hingga 15m. Titik-titik mata air tersebar di Kelurahan Pejeruk, Karang Baru, Sayang Sayang, Cakranegara Utara, Dasan Cermen, Babakan, Mandalika, dan Pagesangan. Di samping potensi akuifer, suplai air bersih Kota Mataram berasal dari mata air Sarasuta, Ranget, dan Saraswaka di Kecamatan Narmada (Kabupaten Lombok Barat).

Sebagai drainase dan irigasi Kota Mataram memiliki empat sungai besar yaitu Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Midang. Hulu sungai-sungai tersebut berada di sekitar lereng Gunung Rinjani dan bermuara di sepanjang pesisir Pantai Ampenan.

d. Klimatologi

Menurut Stasiun Klimatologi I Mataram, suhu udara rata-rata di Mataram pada tahun 2018 berkisar antara 21,03°C sampai dengan 26,62°C. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 77% sampai dengan 87%.

e. Penggunaan Lahan

Dari tahun ke tahun polaguna lahan di Kota Mataram cenderung berkembang secara linier, konsentrik, dan parsial. Perkembangan pola linear terjadi karena mengikuti pola jaringan jalan yang ada, seperti pada

koridor utama Kota Mataram yaitu di Jalan Yos Sudarso – Jalan Langko – Jalan Pejanggik–Jalan Selaparang–Jalan Sandubaya (Ampenan-Mataram-Cakranegara).

Perkembangan guna lahan secara konsentrik ditunjang pola jaringan jalan yang berbentuk *grid* (mengelompok) seperti yang tersebar di Kawasan Cakranegara dan sekitarnya.Sedangkan pola guna lahan yang berkembang secara parsial terjadi di Rembiga, Sayang Sayang di bagian utara, Jempong Baru, Pagutan dan pusat permukiman kawasan Bertais.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2020 mencapai 430.532 jiwa, dengan jumlah penduduk laki – laki sebanyak 214.297 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 216.235 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Mataram secara keselurahan mencapai 7.023 jiwa/km^2. Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ampenan yang mencapai 88.642 jiwa, Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Sekarbela 56.852 jiwa. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Mataram mengalami kenaikan dari tahun 2019. Dimana jumlah penduduk Kota Mataram berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 sebanyak 427,831 jiwa, sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Mataram adalah 430.532 jiwa jiwa. Berikut inii adalah data jumlah penduduk Kota Mataram dilihat dari data jumlah penduduk perkecamatan.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Mataram Tahun 2020

NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk jiwa/Km2
		L (JIWA)	P (JIWA)	JLH (JIWA)		
1	AMPENAN	44.113	44.529	88.642	9.46	9.370
2	MATARAM	38.782	39.468	78.250	10.76	7.272
3	CAKRANEGARA	34.758	34.800	69.558	9.67	7.193
4	SEKARBELA	28.505	28.347	56.852	10.32	5.509
5	SELAPARANG	34.970	36.099	71.069	10.77	6.599
6	SANDUBAYA	33.169	32.992	66.161	10.32	6.411
JUMLAH		**214.297**	**216.235**	**430.532**	**61.30**	**7.023**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram Tahun 2020

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2020 mencapai 430.532 jiwa sementara pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Mataram sebanyak 427,831 jiwa, artinya selama tahun 2019 – 2020 telah terjadi penambahan penduduk. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pertumbuhan penduduk Kota Mataram tahun 2020 adalah sebesar 0.76 % dari tahun sebelumnya, artinya laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram tergolong lambat.

1.3.4 Jumlah PNS Kota Mataram

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Mataram secara keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Mataram tahun 2020 adalah sebanyak 4.936 orang. Berikut ini adalah rincian jumalh PNS Kota Mataram menurut pangkat dan golongan tahun 2020.

Tabel 1.3
Jumlah PNS Kota Mataram Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2020.

JUMLAH PNSD																				JML	Ket	
Gol	Gol	Gol	Gol	**JML**	Gol	Gol	Gol	Gol	**JML**	Gol	Gol	Gol	Gol	**JML**	Gol	Gol	Gol	Gol	**JML**	**Total**		
I/a	I/b	I/c	I/d	**Gol I**	II/a	II/b	II/c	II/d	**Gol II**	III/a	III/b	III/c	III/d	**Gol III**	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	**Gol IV**	**PNS**	**+**	**-**
-	16	11	33	60	53	187	304	251	795	528	766	753	843	2.890	861	294	34	2	1.191	4.936	1	23
CPNS FORMASI 2019																				272		
TOTALPNS + CPNS																				5.208		

Berdasarkan pangkat dan golongan PNS Kota Mataram jumlah PNS Kota Mataram Tahun 2020 adalah 4.936 orang ditambah dengan CPNS 272 orang jadi total PNS dan CPNS Kota Mataram tahun 2020 adalah sebanyak 5.208 orang, dimana paling banyak adalah PNS dengan golongan IV/a yaitu sebanyak 861 orang. Sementara paling sedikit adalah PNS golongan I/b yaitu sebanyak 1 orang.

Tabel 1.4
Jumlah PNS Kota Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL										JML	Staf		JUMLAH FUNGSIONAL								JML	Total		Jml
Es. II		**Es. III**		**Es. IV**		**Es. V**		**JML**					**Guru**		**Paramedis**		**Lain-lain**		**JML**			**PNSD**		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	
31	6	108	39	399	296	-	-	538	341	**879**	917	703	470	1.185	127	449	120	86	717	1.720	**2.437**	2.172	2.764	**4.936**
											14	4	34	143	19	58					272	67	205	272
CPNS FORMASI 2019																								272
TOTALPNS + CPNS																								5.208

Berdasarkan jenis Jabatan PNS Kota Mataram paling banyak adalah PNS yang berada pada jabatan Guru yaitu sebanyak 1.655 orang ditambah dengan CPNS guru sebanyak 177 orang. Sementara berdasarkan jenis kelamin PNS Kota Mataram tahun 2020 terdiri dari 2.172 orang laki - laki di tambah CPNS 67 orang dan 2.764 PNS perempuan ditambah CPNS perempuan sebanyak 205 orang.

Tabel 1.5

Jumlah PNS Kota Mataram berdasarkan Jenjang Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN								Total
	I		II		III		IV		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD	36	-	4	1	-	-	-	-	**41**
SLTP	21	3	29	8	1	-	-	-	**62**
SLTA	-	-	424	181	170	162	5	44	**986**
D.I	-	-	-	3	-	3	-	2	**8**
D.II	-	-	2	11	5	23	9	35	**85**
D.III	-	-	49	78	69	272	2	8	**478**
D.IV	-	-	-	-	33	44	8	3	**88**
S.1	-	-	2	3	875	1.107	282	639	**2.908**
S.2	-	-	-	-	54	72	91	62	**279**
S.3	-	-	-	-	-	-	1	-	**1**
Total	**57**	**3**	**510**	**285**	**1.207**	**1.683**	**398**	**793**	**4.936**

Berdasarkan latar belakang pendidikan PNS Kota Mataram paling banyak berada pada jenjang S.1 yaitu sebanyak 2.908 orang (59 %) sementara paling rendah adalah PNS dengan latar belakang pendidikan S.3 yaitu hanya sebanyak 1 orang (0.02%).

1.3.5 Realisasi Pendapatan Kota Mataram menurut jenis Pendapatan Tahun 2020

Pada tahun 2020, capaian realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.396.009.615.374,56 atau 100,44% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.389.869.482.237,15. Struktur target dan realisasi pendapatan Kota Mataram tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.6
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	**1.389.869.482.273,15**	**1.396.009.615.374,56**	**100,44**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**320.309.008.468,15**	**363.167.361.010,56**	**113,38**
Pendapatan Pajak Daerah	110.000.000.000,00	117.920.102.070,00	107,20
Pendapatan Retribusi Daerah	32.418.901.000,00	17.897.463.467,00	55,21
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.377.825.419,00	9.936.912.771,62	105,96
Lain-lain PAD Yang Sah	168.512.282.049,15	217.410.882.701,94	129,02
DANA PERIMBANGAN	**844.436.699.732,00**	**822.946.728.374,00**	**97,46**
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	107.926.697.903,00	95.796.358.432,00	88,76
Dana Alokasi Umum (DAU)	582.765.685.000,00	579.228.725.000,00	99,39
Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.744.316.829,00	147.921.644.942,00	96,21
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**225.123.774.073,00**	**209.897.525.990,00**	**93,24**
Pendapatan Hibah	63.022.600.000,00	61.637.242.604,00	97,80
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi / Pemda Lainnya	98.300.294.073,00	84.447.703.386,00	85,91
Dana Penyesuaian	63.730.680.000,00	63.730.680.000,00	100,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	70.200.000,00	81.900.000,00	116,67

*) Angka Realisasi APBD 2020 (*unaudited*), *Sumber : BKD Kota Mataram*
**) Data bersifat sangat-sangat sementara

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kota Mataram
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	**1.389.869.482.273,15**	**1.396.009.615.374,56**	**100,44**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**320.309.008.468,15**	**363.165.361.010,56**	**113,38**
Pendapatan Pajak Daerah	**110.000.000.000,00**	**117.920.102.070,00**	**107,20**
Pajak Hotel	6.500.000.000,00	9.027.069.973,00	138,88
Pajak Restoran	18.000.000.000,00	19.429.786.826,00	107,94
Pajak Hiburan	1.650.000.000,00	1.941.345.954,00	117,66
Pajak Reklame	3.000.000.000,00	3.566.971.862,00	118,90
Pajak Penerangan Jalan	41.000.000.000,00	40.384.461.210,00	98,50
Pajak Parkir	1.400.000.000,00	1.626.207.810,00	116,16
Pajak Air Bawah Tanah	450.000.000,00	490.330.599,00	108,96
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	300.000,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	18.000.000.000,00	20.560.149.726,00	114,22
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20.000.000.000,00	20.893.478.110,00	104,47
Pendapatan Retribusi Daerah	**32.418.901.000,00**	**17.897.463.467,00**	**55,21**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.970.000.000,00	3.406.026.730,00	114,68
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	6.500.000.000,00	4.875.642.000,00	75,01
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.500.000.000,00	1.916.454.000,00	15,33
Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000,00	3.485.766.925,00	69,72
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	498.510.000,00	66,47

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	52.250.000,00	104,50
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	45.000.000,00	57.494.000,00	127,76
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00	734.240.000,00	73,42
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	65.500.000,00	77.012.800,00	117,58
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LRA	1.277.597.000,00	823.714.800,00	64,47
Retribusi Rumah Potong Hewan	185.004.000,00	315.701.000,00	170,65
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.442.318.736,00	72,12
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.800.000,00	38.400.000,00	355,56
Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	65.000.000,00	173.932.476,00	267,59
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**9.377.825.419,00**	**9.936.912.771,62**	**105,96**
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.377.825.419,00	9.936.912.771,62	105,96
Lain-lain PAD yang Sah	**168.512.282.049,15**	**217.410.882.701,94**	**129,02**
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	3.432.434.261,96	114,41
Penerimaan Bunga Deposito	4.500.000.000,00	6.159.560.445,38	136,88
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	500.000.000,00	1.280.202.527,57	256,04

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	28.007.330,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	650.000.000,00	1.192.318.326,00	183,43
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	141.254.318,00	0,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	24.000.000,00	0,00
Pendapatan BLUD	143.971.717.207,00	189.810.606.863,96	131,84
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	49.968.068,00	139.646.767,00	279,47
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	300.000.000,00	50.000.000,00	16,67
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	15.500.000.000,00	15.106.645.800,00	97,46
Jasa Giro Dana BOS	40.596.774,15	46.206.062,07	113,82
DANA PERIMBANGAN	**844.436.699.732,00**	**822.946.728.374,00**	**97,46**
Bagi Hasil Pajak	**91.727.665.504,00**	**82.630.579.649,00**	**90,08**
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.762.063.869,00	3.680.369.857,00	77,29
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	33.211.142.501,00	29.408.560.574,00	88,55
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	53.754.459.134,00	49.541.649.218,00	92,16
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	**16.199.032.399,00**	**13.165.778.783,00**	**81,28**
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	87.117.594,00	72.420.581,00	83,13
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.592.666.192,00	788.276.289,00	49,49
Bagi Hasil Dari Mineral dan Batubara (Royalty)	14.519.248.613,00	12.305.081.913,00	84,75
Dana Alokasi Umum (DAU)	**582.765.685.000,00**	**579.228.725.000,00**	**99,39**
Dana Alokasi Khusus (DAK)	**41.810.716.000,00**	**40.715.195.149,00**	**97,38**

DAK Bidang Infrastruktur Jalan	2.937.000.000,00	2.145.434.000,00	73,05
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	477.000.000,00	426.600.000,00	89,43
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.851.983.000,00	2.851.983.000,00	100,00
DAK Bidang Kesehatan	23.648.747.000,00	23.395.192.154,00	98,93
DAK Bidang Pendidikan	11.895.986.000,00	11.895.985.995,00	100,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**98.871.759.829,00**	**95.459.112.204,00**	**96,55**
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5.413.200.000,00	3.488.700.000,00	64,45
DAK Tunjangan Profesi Guru	69.154.417.000,00	69.154.417.000,00	100,00
DAK Tambahan Penghasilan Guru	140.288.000,00	193.500.000,00	137,93
DAK Bantuan Operasional Kesehatan	18.072.750.829,00	19.466.829.829,00	107,71
DAK Jaminan Persalinan	521.470.000,00	0,00	0,00
DAK Bantuan Operasional KB	1.754.292.000,00	805.290.000,00	45,90
DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.478.625.000,00	1.458.199.847,00	98,62
DAK Akreditasi Puskesmas	816.770.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	702.700.000,00	351.350.000,00	50,00
DAK Non Fisik Bidang Koperasi dan UKM	417.358.000,00	368.800.528,00	88,37
DAK Non Fisik Bidang Pariwisata	344.050.000,00	172.025.000,00	50,00
DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	0,00	0,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	**13.061.841.000,00**	**11.747.337.589,00**	**89,94**
DAK Penugasan Bidang Jalan Prioritas Daerah	0,00	0,00	0,00
DAK Penugasan Bidang Pasar	0,00	0,00	0,00
DAK Penugasan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
DAK Penugasan Bidang Irigasi	4.618.904.000,00	4.018.374.911,00	87,00
DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	1.610.288.000,00	1.512.463.924,00	93,93
DAK Penugasan Bidang Pariwisata	2.374.508.000,00	2.023.840.954,00	85,23
DAK Penugasan Bidang Pertanian	807.450.000,00	726.750.000,00	90,01
DAK Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah	1.209.929.000,00	1.051.093.000,00	86,87
DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	2.440.762.000,00	2.414.814.800,00	98,94
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**225.123.774.073,00**	**209.897.525.990,00**	**93,24**
Pendapatan Hibah	**63.022.600.000,00**	**61.637.242.604,00**	**97,80**
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi / Pemda Lainnya	**98.300.294.073,00**	**84.447.703.386,00**	**85,91**
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	32.947.364.116,00	27.348.702.021,50	83,01
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.787.904.745,00	14.776.833.315,00	71,08
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.049.451.747,00	18.460.693.783,00	87,70
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	32.270.379,00	29.010.215,50	89,90
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	23.483.303.086,00	23.832.464.051,00	101,49

Dana Penyesuaian	**63.730.680.000,00**	**63.730.680.000,00**	**100,00**
Bantuan Keuangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	**70.200.000,00**	**81.900.000,00**	**116,67**

*) Angka Realisasi APBD 2020 (*unaudited*), *Sumber : BKD Kota Mataram*
**) Data bersifat sangat-sangat sementara

A. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp. 320.309.008.468,15 dengan realisasi mencapai Rp. 363.167.616.850,56 atau 113,38% dari target yang ditetapkan. PAD terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah

   PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 110.000.000.000,00. terealisasi sebesar Rp. 117.920.102.070,00 atau 107,20% dari target yang direncanakan. Penyumbang terbesar dari sektor pajak daerah adalah Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp. 40.384.461.210,00 atau 98,50% dari target yang direncanakan, kemudian disusul oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 20.893.478.110,00 atau 104,47%, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 20.560.149.726,00 atau 114,22%.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

   PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 32.418.901.000,00, terealisasi sebesar Rp. 17.897.463.467,00 atau 55,21% dari target yang direncanakan. Obyek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum (Perda Nomor 14 Tahun 2011), Retribusi Jasa Usaha (Perda Nomor

15 Tahun 2011) dan Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Nomor 16 Tahun 2011).

Sinergi antara SKPD pengelola PAD patut menjadi evaluasi untuk lebih ditingkatkan di tahun mendatang untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

3. Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tahun 2020, secara keseluruhan PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp9.377.825.419,00 dengan realisasi mencapai Rp9.936.912.771,62 atau 105,96%, dari target yang direncanakan.

PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada PD. BPR NTB sebesar Rp. 481.136.283,00 pada PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp. 3.411.732.419,00 pada PT. Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp. 26.090.966,62 dan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 6.017.953.103,00.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Dana Kapitasi, dan Pendapatan BLUD.

Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 168.512.282.049,15 dengan realisasi mencapai Rp. 217.410.882.701,94 atau 129,02% dari target yang direncanakan. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut terdapat pendapatan yang dikelola/digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD yaitu RSUD Kota Mataram selaku BLUD sebesar Rp. 189.810.606.863,96

atau 131,84% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 143.971.717.207,00, dan dana JKN yang dikelola oleh Puskesmas sebesar Rp. 15.106.645.800,00 atau 97,46% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 15.500.000.000,00.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp. 837.083.960.903,00 dengan realisasi mencapai Rp. 822.946.728.374,00 atau 98,31% dari target yang direncanakan, terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

   Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp. 107.926.697.903,00 dengan realisasi sebesar Rp. 95.796.358.432,00 atau 85,68% dari target yang direncanakan.

2. Dana Alokasi Umum

   Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp. 582.765.685.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 579.228.725.000,00 atau 99,39% dari target yang direncanakan.

3. Dana Alokasi Khusus

   Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp. 146.447.417.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 147.921.644.942,00 atau 97,19% dari target yang direncanakan.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan lainnya adalah komponen dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 209.891.405.990,00 atau 93,23% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 225.123.774.073,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah

   Secara keseluruhan, Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp. 61.637.242.604,00 atau sebesar 97,80% dari anggaran sebesar Rp. 63.022.600.000,00 Pendapatan Hibah tersebut terdiri dari Hibah Pemerintah dalam program Hibah Air Minum yang dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.997.000.000,00 Hibah Bidang Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yang pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 6.938.432.604,00 serta Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp. 51.701.810.000,00 atau 99,20% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 52.119.800.000,00.

2. Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi

   Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 98.300.294.073,00 dengan realisasi mencapai Rp. 84.447.703.386,00 atau 85,91% dari target yang direncanakan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

3. Dana Penyesuaian

   Dana Penyesuaian merupakan Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 63.730.680.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang direncanakan. Dana Insentif Daerah didapatkan oleh Pemerintah Kota Mataram sebagai bentuk insentif dari pemerintah pusat kepada daerah yang berprestasi dan telah memenuhi kriteria tertentu antara lain sudah

melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD dan menetapkan APBD tepat waktu.

4. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya terdiri dari Bantuan Dana Operasional *Cash Management System* (CMS) PT. Bank NTB yang merupakan kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Bank NTB untuk *extrafooding* operator CMS yang terealisasi sebesar Rp. 81.900.000,00.

Bila dibandingkan dengan pendapatan pada tahun sebelumnya, kinerja Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2020 mengalami penurunan dari sisi pendapatan. Penunrunan pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.8

Pendapatan Tahun Anggaran 2020-2019

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian
PENDAPATAN	**1.396.009.615.374,56**	**1.462.795.712.980,15**	**95,43**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**363.165.361.010,56**	**373.951.422.339,15**	**97,12**
Pendapatan Pajak Daerah	117.920.102.070,00	160.513.708.650,00	73,46
Pendapatan Retribusi Daerah	17.897.463.467,00	19.884.309.481,75	90,01
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.936.912.771,62	8.680.588.075,38	114,47
Lain-lain PAD Yang Sah	217.410.882.701,94	184.872.816.132,02	117,60
PENDAPATAN TRANSFER	**822.946.728.374,00**	**895.596.778.015,00**	**91,89**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	82.630.579.649,00	66.645.491.600,00	123,99
Bagi Hasil Pajak	13.165.778.783,00	13.661.398.200,00	96,37

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	579.228.725.000,00	634.376.234.000,00	91,31
Dana Alokasi Umum (DAU)	40.715.195.149,00	72.865.031.289,00	55,88
Dana Alokasi Khusus (DAK)	95.459.112.204,00	89.783.291.500,00	106,32
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	11.747.337.589,00	18.265.331.426,00	64,31
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	**209.897.525.990,00**	**193.247.512.626,00**	**108,62**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	61.637.242.604,00	52.188.280.000,00	118,11
Dana Penyesuaian	84.447.703.386,00	106.955.529.626,00	78,96
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	63.730.680.000,00	32.995.203.000,00	193,15
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	1.050.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan	81.900.000,00	58.500.000,00	140,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	**1.396.009.615.374,56**	**1.462.795.712.980,15**	**95,43**
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	**363.165.361.010,56**	**373.951.422.339,15**	**97,12**
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	117.920.102.070,00	160.513.708.650,00	73,46
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.897.463.467,00	19.884.309.481,75	90,01
Pendapatan Hibah	9.936.912.771,62	8.680.588.075,38	114,47
Pendapatan Lainnya	217.410.882.701,94	184.872.816.132,02	117,60

*) Angka Realisasi APBD 2020 (*unaudited*), *Sumber : BKD Kota Mataram*
**) Data bersifat sangat-sangat sementara

Untuk menunjukkan komponen pendapatan yang paling besar konstribusinya pada pendapatan agregat Kota Mataram dapat dirinci dengan menggunakan data

1.3.6 Realisasi Belanja Kota Mataram menurut jenis Belanja Tahun 2020

Realisasi belanja Pemerintah Kota Mataram untuk tahun 2020 yaitu mencapai 95,80%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA	**1.493.821.861.599,54**	**1.457.582.553.197,18**	**97,57**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**752.475.917.439,59**	**710.569.046.835,00**	**94,43**
Belanja Pegawai	514.985.448.739,59	485.557.736.722,00	94,29
Belanja Hibah	82.535.908.700,00	78.108.234.767,00	94,64
Belanja Bantuan Sosial	13.603.210.000,00	11.676.200.000,00	85,83
Belanja Bantuan Keuangan	1.351.350.000,00	1.351.350.000,00	100,00
Belanja Tidak Terduga	140.000.000.000,00	133.875.525.346,00	95,63
BELANJA LANGSUNG	**741.345.944.159,95**	**747.013.506.362,18**	**100,76**
Belanja Pegawai	97.757.056.070,00	92.401.084.333,00	94,52
Belanja Barang dan Jasa	424.314.414.590,95	445.057.370.878,18	104,89
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.058.890.655,00	23.218.485.371,00	96,51
Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	400.255.523.935,95	421.838.885.507,18	105,39
Belanja Modal	219.274.473.499,00	209.555.051.151,00	95,57

*) Angka Realisasi APBD 2020 (*unaudited*), *Sumber : BKD Kota Mataram*
*) Data bersifat sangat-sangat sementara.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihatbahwa realisasi pada tahun 2020 terdiri dari realisasi pada Belanja Tidak Langsung sebesar 94,43% dan Belanja Langsung sebesar 100,76%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.10
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	%
BELANJA	**1.457.582.553.197,18**	**1.449.112.047.541,41**	**100,58**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**710.569.046.835,00**	**549.197.776.038,10**	**129,38**
Belanja Pegawai	485.557.736.722,00	499.915.410.459,10	97,13
Belanja Hibah	78.108.234.767,00	34.058.186.511,00	229,34
Belanja Bantuan Sosial	11.676.200.000,00	13.033.790.000,00	89,58
Belanja Bantuan Keuangan	1.351.350.000,00	2.136.185.770,00	63,26
Belanja Tidak Terduga	133.875.525.346,00	54.203.298,00	#####
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**747.013.506.362,18**	**899.914.271.503,31**	**83,01**
Belanja Pegawai	92.401.084.333,00	90.990.837.423,00	101,55
Belanja Barang dan Jasa	445.057.370.878,18	477.362.490.415,57	93,23
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	209.555.051.151,00	331.560.943.664,74	63,20
Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	**1.457.582.553.197,18**	**1.449.112.047.541,41**	**100,58**
Belanja Modal	**710.569.046.835,00**	**549.197.776.038,10**	**129,38**

*) Angka Realisasi APBD 2020 (*unaudited*), *Sumber : BKD Kota Mataram*
**) Data bersifat sangat-sangat sementara

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Kota Mataram menurut jenis Pembiayaan Tahun 2020

Dalam Tahun Anggaran 2020, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 106.952.379.326,39 yang terdiri dari penerimaan SiLPA tahun lalu, dengan realisasi sebesar Rp. 106.952.379.326,39 atau 100,00%. Sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 untuk penyertaan modal, dan terealisasi sebesar Rp. 2.997.000.000,00 atau 99,90% dari target, yang merupakan penyertaan modal pada PT. Air Minum Giri Menang Mataram.

Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.11
Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Penerimaan Pembiayaan	**106.952.379.326,39**	**106.952.379.326,39**	**100,00**	**105.088.713.887,65**
Penggunaan SiLPA	**106.952.379.326,39**	**106.952.379.326,39**	**100,00**	**105.088.713.887,65**
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	106.952.379.326,39	106.952.379.326,39	100,00	105.088.713.887,65
Pengeluaran Pembiayaan	**3.000.000.000,00**	**2.997.000.000,00**	**99,90**	**11.820.000.000,00**
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	**3.000.000.000,00**	**2.997.000.000,00**	**99,90**	**11.820.000.000,00**
Penyertaan Modal pada BUMD	3.000.000.000,00	2.997.000.000,00	99,90	11.820.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	**103.952.379.326,39**	**103.955.379.326,39**	**100,00**	**93.268.713.887,65**
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**-**	**42.384.697.343,77**	**100,00**	**107.816.216.316,39**

*) Angka Realisasi APBD 2020 (*unaudited*), *Sumber : BKD Kota Mataram*
**) Data bersifat sangat-sangat sementara

BAB II
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya Struktur Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri. Pengelolaan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Pemerintah Daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, religius, berbudaya serta adil, makmur dan sejahtera. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Mataram mencakup kebijakan pengelolaan Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Selain itu kebijakan keuangan daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro.

Keadaan darurat yang terjadi di triwulan pertama tahun 2020, yaitu meluasnya wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi global *oleh World Health Organisation* (WHO), ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden RI sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, juga ditetapkan sebagai status siaga darurat bencana non alam COVID-19 di Kota Mataram oleh Walikota Mataram, telah ditindaklanjuti dengan pengalokasian penggunaan APBD TA 2020 untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* ke dalam Belanja Tidak Terduga melalui Peraturan Walikota berdasarkan arahan Pemerintah Pusat. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juli dan perkembangan ekonomi daerah di masa pandemi *COVID-19*, meliputi: perubahan asumsi ekonomi makro, perubahan satuan standar harga, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam rangka percepatan pembangunan dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 yang menginstruksikan kepada daerah untuk melakukan percepatan penyesuaian APBD TA. 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Kepala Daerah perlu melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui:

1. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing wilayahnya serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekenomian.Penjabaran tentang hal-hal yang yang menjadi prioritas dalam Perubahan APBD TA 2020 berdasarakan *refocusing* program/kegiatan dan realokasi anggaran penanganan *Covid-19* yang menjadi pertimbangan utama dalam perubahan APBD TA 2020.

2.1 KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: (i) *Pendapatan Asli Daerah* meliputi: Pajak daerah; Retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; (ii) *Pendapatan transfer* meliputi: transfer Pemerintah Pusat (terdiri atas dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa) dan transfer antar-Daerah (terdiri atas pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan); dan (iii) *Lain-lain pendapatan Daerah yang sah*, merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang ditujukan untuk meningkatkan

kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengharus utamaan gender dan pranata sosial.

Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan dan telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayana publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasaan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada:

1. Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar SKPD pengelola PAD;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.

Sementara itu, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya dalam penentuan variabel/ komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK diperkirakan akan meningkatkan target pendapatan Dana Perimbangan; juga untuk peningkatan pendapatan daerah yang bersumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat terus ditingkatkan.

Pandemi *COVID-19* yang terjadi di Kota Mataram juga berpengaruh terhadap capaian target pendapatan daerah terutama yang bersumber dari pajak daerah. Penerimaan pajak daerah Kota Mataram diperkirakan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam

APBD TA.2020. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan beberapa kebijakan terkait Pendapatan Daerah Kota Mataram dalam Perubahan KUA TA. 2020, sebagai berikut:

1. Penyesuaian target PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Target PAD dalam Perubahan KUA TA 2020 direncanakan menurun dari target KUA TA. 2020 sebagai dampak pandemi Covid 19 serta adanya relaksasi di bidang perpajakan bagi pelaku usaha.
2. Penyesuaian target Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dengan adanya penyesuaian dana Transfer ke Daerah untuk penanganan pandemi *COVID-19*.
3. DBH CHT yang dialokasikan untuk bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19* sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 yang mengatur penggunaan dana transfer pemerintah pusat.
4. Penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diakibatkan adanya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Secara sistematis arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram pada tahun 2020 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penganggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

2.1.1 Penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

1). Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

2). Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

3). Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

4). Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan.

6). Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7). Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai

dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

8). Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk

penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9). Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

10). Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

11). Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok

pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

12). Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

13). Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor

yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.2 Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

2.1.3 Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

a. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana

diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3) hasil kerja sama daerah;
4) jasa giro;
5) hasil pengelolaan dana bergulir;
6) pendapatan bunga;
7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11) pendapatan denda pajak daerah;
12) Pendapatan denda retribusi daerah;
13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14) pendapatan dari pengembalian;
15) pendapatan dari BLUD; dan
16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah

dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2.1.4 Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH- CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

   Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH- CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

3) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH- Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH- Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran

2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH- SDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-

SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020.

   Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018.

   Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut

ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

5) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus

menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Hibah Dana BOS.

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang- undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun

Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

3) Pendapatan bagi hasil.

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4) Dana Insentif Daerah.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran

2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan

ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.

2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.ss

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Strategi Belanja Langsung dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pengurangan anggaran, program dan kegiatan akibat efisiensi anggaran dan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran penanganan penyebaran pandemi Covid-19;
2. Penambahan anggaran dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan/atau mendesak;
3. Pergeseran anggaran, program dan kegiatan akibat dari penyesuaian kebijakan, perubahan lokasi sasaran kegiatan serta memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan di akhir tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai

ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD

dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

   Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai

ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
9. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan

Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD

pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

d. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2.2.2 Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

a. Belanja Pegawai

   Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).

1) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
2) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penganggaran belanja

barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
3) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
    a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
    b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk

istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

7) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan

kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

8) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing- masing peraturan daerah.
9) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan

perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

10) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
    a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
    b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
    c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
    d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarannya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi

lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

13) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
    1. pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
    2. pimpinan dan anggota DPRD; serta
    3. unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi,

kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

14) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

15) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

2.3 Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian

pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka pemerintah daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.4 Pembiayaan Daerah

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :

   a) pelampauan penerimaan PAD;
   b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
   c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan sah;
   d) pelampauan Daerah yang penerimaan Pembiayaan;
   e) penghematan belanja;
   f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
   g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pemerintah daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah

melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

2) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).

   Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

   Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

3) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di

wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

4) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan

Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.
b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah diukur dengan beberapa indikator kinerja daerah yang meliputi aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Pelayanan Umum, dan aspek Daya Saing Daerah. Pencapaian indikator kinerja daerah tahun 2020 sebagai berikut.

3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Capaian indikator aspek kesejahteraan masyarakat disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	8.06	8.07	4,98	5.58	7.89	2.39*
2.	Pendapatan Per Kapita (Rp/kapita)	25.832.769	26.632.769	27.808.568	28.384.352	30.999.058	27.870.929*
3.	Indeks Gini	0,357	0,394	0,374	0.374	0.334	0.353*
4.	Laju Inflasi (%)	2,47	3,59	3,5	1.76	3.5	0.58
5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,17	5,35	6,72	5.51	6.02	6.83
6.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93,83	94,65	93,28	94.49	93.98	93.17
7.	Angka Kemiskinan (%)	9,8	9,55	9,05	8.92	9.06	8.47
8.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,69	1,73	1,66	1.55	1.51	1,86
9.	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,43	0,47	0,42	0.45	0.32	0,56
10.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	11,41	10,05	9,73	9.35	9.30	8,80
11.	Angka Indeks Pembangunan Manusia	77,2	77,84	78,28	79.10	79.16	78,91
12.	Angka Harapan Lama Sekolah	15,5	15,51	15,58	15.58	15.73	15.59
13.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,25	9,32	9,39	9.45	9.53	9,46

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,7	70,98	71,23	71.59	71.73	71,76
15.	Prevelensi Balita Gizi Buruk (%)	2,49	2,45	2,34	1,37	2.21	0.3
16.	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	3	3	3	4	3-4	4*
17.	Skor Pola Pangan Harapan (%)	86.13	88.13	90.13	96,80	94.13	96.40
18.	Nilai SAKIP	58,88	63,13	64.04	65,05	75	70*
19.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	**B= 61.23**	B	B	BB	B*
20.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*
21.	Rasio Kemandirian Daerah	20,66	27,17	24,67%	25,56%	25,50%	25.43%

*Sumber: RPJMD, BPS Kota Mataram, OPD Penanggungjawab Indikator, *) Angka Proyeksi*

Penyebaran virus corona atau coronavirus disease 2019 (covid-19) telah membuat aktivitas ekonomi di Kota Mataram melambat. Target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebesar **7.89%** pada tahun 2020 tidak dapat tercapai. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram hanya tumbuh moderat sebesar **2.39%** lebih lambat dari capaian pertumbuhan ekonomi pasca gempa Lombok tahun 2018 (4.98%) dan tahun 2019 sebesar 5.58%. Hampir semua sektor ekonomi baik formal maupun informal terdampak covid-19 sebagai implikasi dari penerapan protokol kesehatan berupa pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat dan pembatasan operasional pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan.

Melambatnya kinerja ekonomi Kota Mataram secara langsung berimbas pada menurunnya pendapatan per kapita sebesar Rp. 27,87 Juta dari target sebesar Rp. 30,99 juta pada tahun 2020. Menurunnya pendapatan per kapita, juga tercermin dari lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari angka inflasi tahunan (Desember 2019 terhadap Bulan Desember 2020) yang cukup rendah, yaitu sebesar 0.58% dari target sebesar ± 3.5% pada tahun 2020. Apabila dicermati, sejak merebaknya pandemi covid-19, Kota Mataram cendrung mengalami deflasi sejak bulan April (minus 0.33%) sd. Bulan September 2020 (minus 0.04%), yang mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi/deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi (-5.69%), Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (-1.47%), Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya (5.75%), dan Kesehatan (0.99%). Tidak bisa dipungkiri, pandemi

covid-19 juga telah memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang tercermin dari nilai gini rasio Kota Mataram pada tahun 2020 meningkat menjadi 0.353 dari target sebesar 0.334. Meskipun berada pada kategori sedang, nilai gini rasio yang meningkat mencerminkan pembangunan ekonomi yang belum inklusif.

Di sektor ketenagakerjaan, pandemi covid-19 telah berdampak terhadap berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia di Kota Mataram dari target yang ditetapkan sebesar 93.98% pada tahun 2020, namun Kesempatan Kerja (KK) yang tersedia hanya sebesar 93.17%. Imbasnya, angka pengangguran juga meningkat di Kota Mataram. Berdasarkan data BPS Kota Mataram (per Agustus 2020), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mataram pada tahun 2020 naik menjadi 6.83% dari 5.51% pada tahun 2019, dan angka ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB yaitu sebesar 4.42%. Pandemi covid 19 ini menyebabkan penduduk yang sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja sebanyak 7.300 orang, dan juga berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 1.700 orang. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari pandemi covid 19 yaitu sektor manufaktur dan sektor jasa, dengan rata-rata penurunan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar minus 1.7% dan 0.22%.

Angka Kemiskinan di Kota Mataram menunjukkan trend penurunan yang cukup progresif dari angka 8.92% pada tahun 2019, turun 0.45% menjadi 8.47% pada tahun 2020, dan melampui target yang telah ditetapkan sebesar 9.06%. Apabila diamati data tersebut memang belum terlihat dampak pandemi covid-19 terhadap angka kemiskinan di Kota Mataram mengingat rilis data kemiskinan terutama pada level kabupaten/kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan hasil survey pada Bulan Maret tahun 2020, sementara covid-19 terjadi sekitar bulan April tahun 2020. Sehubungan dengan itu, penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2020 merupakan dampak intervensi program kluster penanggulangan kemiskinan dan program induksi kemiskinan pada tahun 2019. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan di Kota Mataram pada tahun 2020 tidak diiringi oleh penurunan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman kemiskinan menunjukkan kenaikan dari 1.55 pada tahun 2019 menjadi 1.86 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan pengeluaran rata-rata penduduk miskin semakin jauh dari Garis Kemiskinan (GK). Demikian juga Indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0.45 pada tahun 2019 menjadi 0.56 pada tahun 2020. Kenaikan indeks ini menunjukkan terjadinya kesenjangan pengeluaran

yang semakin lebar antar sesama penduduk miskin. Peningkatan nilai pada kedua indeks ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor belum efektif dan tepat sasaran karena intervensi belum sepenuhnya mengacu pada data tunggal (single data) yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, DTKS sebagai acuan intervensi program penanggulangan kemiskinan belum optimal dilakukan pemutakhiran (updating) yang disebabkan oleh lambannya proses pelaksanaan musyarawah kelurahan (muskel).

Pandemi COVID-19 juga membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Mataram. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Kota Mataram tahun 2020 adalah sebesar 78,91 atau turun sebesar 0,19 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 79.10. Penurunan nilai IPM Kota Mataram tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari 15,43 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 14,97 juta rupiah atau pertumbuhannya melambat sebesar minus 2.97% pada tahun 2020. Menurunnya rata-rata pengeluaran per kapita tercermin dari rendahnya angka inflasi yaitu sebesar 0.58%. Sejak merebaknya pandemi covid-19, Kota Mataram cendrung mengalami deflasi sejak bulan April (minus 0.33%) sd. Bulan September 2020 (minus 0.04%), yang mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan daya beli masyarakat. Dua komponen pembentuk IPM lainnya yang terdampak covid-19 yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), meskipun angkanya mengalami kenaikan, tapi pertumbuhannya lambat, hanya naik 0.01 poin, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 tidak tercapai.

Wabah Covid-19 juga telah berimplikasi pada tidak tercapainya target rasio kemandirian daerah. Pada tahun 2020, rasio kemandiran daerah ditargetkan sebesar 25.50%, namun terealisasi sebesar 25.43%. Corona Virus Desease menyebabkan daya dukung fiskal daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram mengalami penurunan cukup signifikan karena semua sektor, termasuk sektor ekonomi, kinerjanya mengalami perlambatan sehingga PAD dari pajak, retribusi dan pendapatan BLUD mengalami penurunan.

3.1.2 Aspek Pelayanan Umum

Capaian indikator aspek Pelayanan Umum disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5		6	7
II. ASPEK PELAYANAN UMUM							
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
	Pendidikan						
1.	APS PAUD	21.92	22.92	23.92	28.23	25.00	29.45
2.	APK PAUD	55,64	56,14	56,64	55.00	57,64	57.05
3.	APM PAUD	36,75	37,25	37,65	26.37	38.65	27.05
4.	APS Pendidikan Dasar dan Setara	91.14	92.14	92.14	100	100	100
5.	APK Pendidikan Dasar dan Setara	100.59	104.02	107.14	102.51	116.67	103.05
6.	APM Pendidikan Dasar dan Setara	91,76	93,15	102,27	95,99	102.27	96.05
7.	APS SMP dan Setara	78.73	78.73	79.00	96.87	100	97.50
8.	APK SMP dan Setara	108.59	104.02	107.14	107,42	113.67	108.00
9.	APM SMP dan Setara	100,32	84,08	92,55	93,79	95.00	95.00
10.	Angka Kelulusan Sekolah Dasar	100	100	100	100	100	100
11.	Angka Kelulusan SMP	99,33	99,92	94,03	100	100	100
12.	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD	74,82	74,92	72,81	75,14	75.00	75.64
13.	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	61,38	63,42	54,27	54,27	60.00	55.00
14.	Angka Melanjutkan SD	93,31	85,59	89,88	89,88	95.00	90.00
	Kesehatan						
15.	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0.627	0.631	0.640	0,6281	0.647	0.653*
16.	Prevalensi balita gizi buruk	5%	5%	5%	1,37%	5%	0.3%
17.	Prevalensi balita stunting	-	37,8	33,19	24,45	25	21.10
18.	Angka Kematian Ibu (AKI)	142	142	130	103.4	120	90
19.	Angka Kematian Bayi (AKB)	6	6	5	4	5	5
20	Persentase Penyakit menular yang ditangani	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Penyakit Tidak menular yang ditangani	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5		6	7
22	MDR (rasio kejadian kematian <48 jam per 1000 pasien)	24,71	22,35	19,35	24,72	13.35	20.45
23	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100
24	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit	90%	90%	100%	100%	100%	100
25	Persentase Kemandirian Rumah Sakit	1,04	1,12	1,03	0,97	0.70	0.55
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
26	Persentase jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	65%	70%	75%	91.55%	85%	91,37 %
27	Persentase luas kawasan genangan	-	-	-	0.4%	19 %	0,4 %
28	Lamanya genangan	-	-	-	120 menit	170 menit	120 menit
29	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	96,00%	97,00%	98,00%	98.5%	99 %	99 %
30	Persentase KK yang mendapatkan akses pelayanan air minum	68	72	76	73.79%	90 %	73,86%
31	Persentase bangunan yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	0	2%	5%	5.6%	10%	0.92
32	Nilai kinerja penataaan ruang	0	2,01	2,01	2.17	2.51	2.17
33	Persentase KK MBR yang mendapatkan akses sarana prasarana pengolahan air limbah	88	90	92	83.03%	100%	67,63%
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
34	Persentase luas permukiman yang tertata	90.43%	94.59%	96.60%	96.69%	100%	96,37%
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
35.	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang tertangani	75	80	85	100	90	100**
36.	Indeks Kota Toleran	4,05	3,78	4,41	4,417	4.94	4,417*
37.	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (kelurahan)	50 kelurahan	50 kelurahan	50 kelurahan	50 Kelurahan	50 Kelurahan	50 Kelurahan

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5		6	7
38.	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	101,7	123,2	96	87,28	77	87,28*
	Sosial						
39.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	2,36	2,5	2,79	2,83%	3.23	2.67%
40.	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	38,80%	40,66%	42,22%	54,44%	57.78	58.32%*
	LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
	Tenaga Kerja						
41.	Persentase Pencari Kerja Yang Terlatih	0	1,42	2,96	4,38	5.81	1.41%*
42.	Persentase penerapan aturan ketenaga kerjaan oleh perusahaan	0	77,12	84,95	77,12	95	100%
43.	Persentase penempatan tenaga kerja	0	10,3	16,35	24,11	28.79	0
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
44.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.40	92.50	92.60	92.54	97.80	92,77
45.	Nilai Kota Layak Anak (KLA)	inisiasi	500-600	500-600	853	600-700	672
46.	Cakupan Layanan Kasus Perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
	Ketahanan Pangan						
47.	Persentase Pencapaian SPM Ketahanan Pangan	91,19	90,39	92,36	154.45	95,85	90,91
	Lingkungan Hidup						
48.	Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	55	56.99	57	45.25	53.91	58.53
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
49.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan dukcapil	NA	77%	78%	79%	79.30%	79.31%
50.	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat						
51.	Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5		6	7
52.	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan fasilitas pemberdayaan masyarakat oleh kecamatan	Na	Na	50%	80%	85%	90%
53.	Persentase lingkungan bersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%
54.	IKM Kecamatan	Na	Na	93	80	80%	90%
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
55.	Rasio Akseptor KB MKJP	50%	55%	60%	28,8%	70%	29.69
56.	Laju pertumbuhan Penduduk (%)	3%	2.70%	2.60%	1,90%	2.40%	1.93%
	Perhubungan						
57.	Prosentase penggunaan moda angkutan umum	7%	7%	8%	6%	5%*	3%
58.	Rasio waktu perjalanan	1,8	1,8	1,8	1,75	1,75	1,75*
	Komunikasi dan Informatika						
59.	Indeks SPBE						
	- Domain Kebijakan SPBE		-	2,76	1,59	2,00	1,59
	- Domain Tata Kelola		-	2,29	2,00	2,50	2,00
	- Domain Layanan SPBE		-	2,91	3,06	3.50	3.06
60.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik	-	50	55	77.85	95	78,39
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
61.	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	9,62%	10%	15%	19,28%	20%	12.5%
	Penanaman Modal						
62.	Nilai IKM Pelayanan Perijinan	76	78	82	105.67	84	84.34
	Kepemudaan dan Olahraga						
63.	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	NA	61%	67%	100%	80%	15.47%
64.	Jumlah Medali Perolehan Prestasi Olahraga	-	emas ; 5 Perak :6 Perunggu ; 1	emas ; 6/7 Perak :7/9 Perunggu ; 2/5	emas ; 36 Perak :11 Perunggu ; 23	emas ; 8 Perak :9 Perunggu ; 4	emas ; 0 Perak :1 Perunggu ; 0
	Statistik						

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5		6	7
65.	Prosentase OPD Yang Data Sektoralnya tervalidasi sesuai standar	-	100	100	100	100	100
	Persandian						
66.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Prosentase nilai kematangan informasi)	-	-	-	Level 1	5%	5%
	Kebudayaan						
67.	Persentase sanggar seni yang menerima aspresiasi	0	30	30	30%	35%	30%
	Perpustakaan						
68.	Persentase Kunjungan Perpustakaan per tahun	7,71	9,66	3,1	10,18%	4.03%	10,18%
	Kearsipan						
69.	Persentase SDM Kearsipan yang berkompeten	0	0	38,46	40	44,44	51,85
70	kecepatan mendapatkan arsip	3 menit	3 menit	3 menit	1 menit	1 menit	1 menit
71	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	41,03%	43,59%	46,15%	48,72%	51,28%	48,72%
	LAYANAN URUSAN PILIHAN						
	Kelautan dan Perikanan						
72.	Konsumsi ikan perkapita (kg/kapita/tahun)	0	31	34	42.67	36	43.15
	Pariwisata						
73.	Jumlah Kunjungan wisatawan	623.835	714.291	671.434	934.533	823.095	42.213
74.	Rata-rata lama tinggal Wisatawan	2,5 Hari	2,5 Hari	2,5 Hari	2.5 hari	3 hari	2.5 hari*
75.	PDRB Sektor Pariwisata	182.690 Milyar	199.269 Miliyar	204.909 Milyar	213.925 Milyar	228.472 Milyar	228.472 Milyar*
	Pertanian						
76.	Jumlah produksi pertanian						
	- Padi	37.040 ton	31.476 ton	32.000 ton	28.300 ton	27.000 ton	22.015 ton
	- Kedelai	441 ton	171 ton	429 ton	67 ton	435 ton	9,38 ton
	- Jagung	-	231 ton	311 ton	1.307 ton	320 ton	368 ton
	- Sayuran (ton)	1.254 ton	1.208 ton	1.389 ton	1.318 ton	1.400 ton	1.346 ton
	- Buah2-an (ton)	1.090 ton	1.094 ton	1.688 ton	22.071 ton	1.700 ton	15.934 ton

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5		6	7
77.	Jumlah produksi daging	1.247 ton	1.393 ton	1.342 ton	2.600 ton	2.200 ton	1.824 ton
78.	Persentase volume produksi pertanian yang diolah	10%	12%	13%	12%	10% (RPJMD: 17%)	10%
	Perdagangan						
79.	Laju Pertumbuhan PDRB kategori usaha Perdagangan	8.68%	9.22%	9.76%	6,54%	10.84%	4.39%*
80.	Persentase usaha sektor perdagangan yang tertib niaga	83%	85%	87%	94,54%	93%	58.02%
	Perindustrian						
81.	Persentase peningkatan volume usaha industri	4,63	1,87	3,78	4,31%	3.78%	3%
82.	Persentase PDRB Sektor Industri	6,82	7,3	7,3	8,83%	7,3%	5%*
	Transmigrasi						
83.	Persentase pengiriman transmigran ke daerah transmigrasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	0
	PENUNJANG URUSAN						
	Perencanaan Pembangunan						
84.	Nilai aspek perencanaan pada Evaluasi SAKIP	-	19,71	20,34	20,66	24	20,66*
85.	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target kinerja	100	100	100	96,97	100	96,97*
	Keuangan						
86.	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	-	67,87	65,5	66,27	75	80,10
87	Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%*
88.	Persentase Daya Serap APBD	93,30%	92,37%	93,00%	92,84%	100%	76,59%
89.	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat	34,17%	35,51%	37,03%	42,40%	40,61%	55,61%
90	Persentase Barang Milik Daerah yg Terinventarisir Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	90%	90%	90%	98,46%
91	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	28,47%	16,44%	5,00%	9,20%	5%	-31,29%

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5		6	7
92	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	20,65%	27,17%	24,67%	25,56%	25,50%	25,43%
	Kepegawaian serta pendidikan pelatihan						
93	Persentase Pejabat Struktural yang mendapat peningkatan kompetensi	56%	59%	62%	66.44%	68%	64%
94.	Persentase Pejabatan Fungsional yang mendapat peningkatan kompetensi	3%	4%	5%	67.86%	7%	1.39%
95.	Nilai Indeks Profeisionalitas ASN	60%	65%	70%	82%	80%	60%
96	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	0	0	0	79.72%	75%	78.93%
	Penelitian dan Pengembangan						
97.	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	-	63%	70%	80%	40%	40%
	Pengawasan						
98.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	89%	93%	90%	94%	92%	77,17%
99.	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan	79%	82%	84%	78%	93%	64,50%
100	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD yang mendapat nilai baik (minimal B)	70%	61%	65%	85%	85%	74,36%
101	Persentase Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP seluruh Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
102	Level Kapabilitas APIP	2	3 dengan Catatan	3	3	3	3
103	Level Maturitas SPIP	1	3	3	3	3	3
	Administrasi Pemerintaham						
104	persentase program-program DPRD yang terfasilitasi	100	100	100	100	100**	100**
105	Persentase OPD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tercapai	100	100	100	100	100	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5		6	7
106.	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana rumah tangga kepala daerah	100	100	100	100	B (85.10) (RPJMD: 100)	B (85.10)
107.	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana sekretariat daerah	100	100	100	100	B (85.97) (RPJMD: 100)	B (85.97)
108.	Indeks kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah	100	100	100	100	100	100*

*Sumber: RPJMD, BPS Kota Mataram, OPD Penanggungjawab Indikator, *) Angka Proyeksi 2020*

Ada beberapa indikator atau parameter pada aspek pelayanan umum yang tidak mencapai target pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

3.1.2.1 LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN

Pencapaian indikator pendidikan sebanyak 14 indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target yaitu APM PAUD, APK PAUD, Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP, dan Angka Melanjutkan. Pencapaian indikator APM dan APK PAUD berkaitan dengan partisipasi usia sekolah yaitu penduduk yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk mengikuti jenjang pendidikan PAUD pada satuan pendidikan Formal dan Non-Formal. Partisipasi Sekolah Anak Usia Dini yang belum melampaui target, hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya anak usia sekolah yang wajib PAUD tidak bersekolah, faktor penyebabnya adalah masih adanya persepsi orang tua yang lebih mementingkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Pendidikan PAUD sebagai pendidikan Pra-SD belum menjadi prioritas orang tua untuk menyekolahkan putra/putrinya. Pemerintah Kota Mataram berupaya meningkatkan angka APM dan APK PAUD salah satunya dengan menetapkan PERWAL Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendidikan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD. Dengan berdasar PERWAL tersebut, aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD menjadi perhatian, dengan melakukan koordinasi intensif lintas sektor dan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.

Pencapaian indikator Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP setiap tahun

mengalami penurunan pencapaian. Pada tahun 2020, realisasi capaian sebesar 55% dari target sebesar 60%. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian tersebut, antara lain dipengaruhi oleh kesiapan siswa menghadapi Ujian Nasional. Diisis lain pihak sekolah telah berupaya memberikan bimbingan materi ujian (pengayaan) di sekolah, namun disisi lain soal ujian menggunakan tingkat kesulitan dengan standar tinggi atau *High Order Thinking Skills* (HOTS). Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan perubahan penetapan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) sebagai standar kelulusan dan menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Dalam asesmen ada tiga kemampuan yang dinilai yaitu Literasi (nalar dan bahasa), Numerasi (matematika), dan Karakter. Penilaiannya mengacu pada standar internasional, seperti *Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMMS)*.

Selanjutnya, untuk pencapaian indikator Angka Melanjutkan (AM) yang belum mencapai target sebesar 95% lebih dominan disebabkan oleh faktor siswa dan keluarga. Beberapa siswa lulusan SD maupun SMP tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya karena faktor pembiayaan dan faktor kondisi keluarga yang tidak mampu. Pemerintah Kota Mataram melalui lembaga terkait (Dinas dan BAZNAS) berupaya memfasilitasi dan membantu siswa yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

2. KESEHATAN

Pada urusan wajib kesehatan, dari 11 indikator kinerja daerah bidang kesehatan, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target pada tahun 2020 yaitu:

a). **Prevalensi stunting;**

Stunting menunjukkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Prevalensi stunting di Kota Mataram pada tahun 2020 di targetkan turun sebesar 20%, namun terealisasi sebesar 21.10%. Apabila dikomparasi dengan capaian tahun sebelumnya, angka stunting di Kota Mataram telah mengalami penurunan dari 24.45% pada tahun 2019, turun menjadi 21.10% pada tahun 2020. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh belum optimalnya intervensi gizi spesifik seperti belum optimalnya suplementasi Tablet Tambah Daerah (TTD) kepada Ibu Hamil minimal 90 tablet

selama kehamilan dan Suplementasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan kepada Bumil KEK; dan belum optimalnya pemberian PMT pemulihan dan Zinc kepada balita kurus dan diare.

b). **MDR (rasio kejadian kematian <48 jam per 1000 pasien);**

Angka Mortality Death Rate (MDR) <48 jam per 1000 pasien pada tahun 2020 terealisasi sebesar 20.45%, dari target 13.35%. Apabila dikomparasi dengan tahun sebelumnya, angka MDR di Kota Mataram telah mengalami penurunan sebesar 4.27% dari 24.72% pada tahun 2019. Belum tercapainya indikator tersebut disebabkan oleh masih rendahnya Rumah Tangga ber-PHBS di Kota Mataram yaitu sebesar 27.21%. Hal ini diindikasikan oleh masih banyak angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, stroke, diabetes dan penyakit tidak menular (PTM) lainnya yang berimplikasi terhadap angka MDR (mortality death rate) yang belum mencapai target yang ditetapkan.

c). **Persentase kemandirian rumah sakit.**

Tingkat Kemandirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram pada tahun 2020 sebesar 55%, tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 70%. Penyebab utama tidak tercapainya target indikator tersebut adalah karena pendapatan BLUD menurun akibat dari dampak pandemi covid-19, dimana RSUD Kota Mataram ditunjuk sebagai Rumah Sakit (RS) penanganan Covid 19, akibatnya menurunkan jumlah kunjungan pasien reguler yang mana sebelum pandemi rata-rata kunjungan per hari di atas 1000 orang per hari, dan pada masa pandemi covid-19, rata-rata kunjungan turun menjadi 300-400 orang per hari atau turun sebesar 60-70%. Demikian juga dengan rawat inap, trend penurunan kunjungan terlihat mulai akhir bulan Maret, April, Mei, dan Juni, hal tersebut berpengaruh terhadap klaiman BPJS yg sebelumnya mencapai Rp. 11 Miliar sd Rp. 13 Miliar. Sedangkan setelah covid-19, klaiman BPS hanya sebesar Rp. 4 Miliar sd Rp. 6 Miliar.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Terdapat 5 (lima) indikator dari 7 (tujuh) indikator kinerja pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum mencapai target di tahun 2020 yaitu: 1). Persentase luas kawasan genangan; 2). Persentase KK MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang mendapatkan akses pelayanan air minum; 3).

Persentase bangunan yang layak huni sesuai standar; 4). Nilai kinerja penataan ruang; 5). Persentase KK MBR yang mendapatkan akses pengolahan air limbah.

Berikut penyebab belum tercapainya target pada masing-masing indikator diatas:

- Persentase jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dihitung dengan formula Jumlah panjang jalan kota dalam status mantap (merupakan akumulasi dari panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang) dibagi dengan Panjang jalan se-Kota Mataram dikali 100. Target pada Tahun 2020 yaitu sebesar 85 % dapat terlampaui bahkan melebihi realisasi pada tahun 2019, walaupun pada pertengahan tahun anggaran harus menghadapi Pandemi COVID-19 yang juga berakibat adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan jalan Kota Mataram.
- Persentase luas kawasan genangan merupakan persentase luas kawasan genangan yang terjadi pada tahun berjalan. Jumlah dari luasan terjadinya genangan pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah total luasan rawan genangan yaitu wilayah Unus dan Pamotan, yaitu 35.835 m2 dibagi 8.910.000 m2 x 100 % sehingga menghasilkan persentase luas kawasan genangan pada tahun 2020 sebesar 0,4 % atau mengalami penurunan luasan kawasan genangan sebesar 1,5 % karena telah dilakukan beberapa langkah antisipasi dengan cara antara lain adalah memaksimalkan penggalian/normalisasi saluran di musim kemarau.
- Lamanya genangan yang terjadi di Kota Mataram pada daerah rawan genangan masih sama kondisi nya yaitu selama 120 menit. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan dengan kondisi debit air pada saat antrian air sangat tinggi di hilir. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain melakukan normalisasi atau pengerukan di hulu maupun hilir, namun pada saat musim penghujan atau air laut pasang maka debit air di hilir juga meningkat yang berakibat antrian air justru semakin lama. Kedepannya harus dipikirkan bagaimana agar dapat dilakukan pelebaran saluran pada area tersebut, tentunya dengan dukungan anggaran yang cukup besar.
- Persentase luas areal sawah yang terairi yaitu sebesar 99 % atau belum dapat mencapai 100%. Karena untuk areal pertanian yang sumber airnya berasal dari bendung kewenangan Kota Mataram kebutuhan untuk air irigasi pada dasarnya telah tercukupi. Namun untuk beberapa area yang diasumsikan sebesar 1 % masih menggunakan air dari wilayah diluar Kota Mataram, pada saat musim kemarau sangat kekurangan suplai air karena ketergantungan pada suplai air dari luar wilayah Kota Mataram selain juga akibat pola tanam yang berbeda.

- Persentase KK yang mendapatkan akses pelayanan air minum dihitung dengan formula Jumlah KK yang memiliki layanan air minum dibagi Jumlah KK se Kota Mataram pada Tahun 2020. Realisasi hanya sebesar 73,86 % karena adanya pertambahan jumlah KK di Kota Mataram yang cukup besar namun tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah sarana dan prasarana air minum. Data jumlah sarana dan prasarana air minum tersebut merupakan data PDAM dan juga yang merupakan intervensi Dinas PUPR Kota Mataram. Sejak Tahun Anggaran 2019 sampai 2020 Kota Mataram tidak mendapatkan kembali Dana Alokasi Khusus untuk Air Minum sehingga Anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana air minum sangat kecil.
- Persentase bangunan yang layak huni sesuai standar tidak mengalami kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya diperkirakan karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan lebih sedikit dari tahun 2019. Realisasi akan lebih optimal jika tidak hanya dihitung dari jumlah permohonan SLF yang masuk, namun juga akan bertambah apabila dilakukan identifikasi/evaluasi langsung ke lapangan untuk melihat kelayakan seluruh bangunan yang ada di Kota Mataram.
- Nilai kinerja penataaan ruang tidak mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan sedikitnya jumlah pemohon SKRK, yang kemungkinan diakibatkan karena pandemic COVID -19. Nilai Kinerja Penataan Ruang akan lebih optimal jika tidak hanya dihitung dari jumlah permohonan SKRK yang masuk, namun juga apabila dilakukan monitoring/evaluasi langsung di lapangan untuk melihat kesesuaian penggunaan lahan/pola ruang dengan yang telah tertuang pada Dokumen RTRW.
- Persentase KK MBR yang mendapatkan akses sarana prasarana pengolahan air limbah dari realisasi Tahun 2020 tampak jauh mengalami penurunan, hal ini dikarenakan data yang digunakan menggunakan jumlah sarana prasarana pengolahan air limbah yang merupakan intervensi Dinas PUPR saja sedangkan yang dikerjakan oleh SKPD lain seperti Dinas Kesehatan belum masuk dalam perhitungan tersebut dikarenakan masih belum terkumpulnya data keseluruhan. Adanya pertambahan jumlah KK di Kota Mataram yang tidak diimbangi dengan bertambahnya jumlah sarana dan prasarana pengolahan air limbah juga merupakan salah satu penyebab rendahnya realisasi persentase KK MBR yang mendapatkan akses sarana prasarana pengolahan air limbah pada Tahun 2020.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Luas Kumuh Kota Mataram tahun 2020 sebesar 112,6 Ha sesuai SK Walikota No. 1096/VII/2020 Tanggal 29 Juli 2020. Pengurangan kumuh pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,2 Ha, sehingga luasan Kawasan kumuh berkurang menjadi 106,4 Ha. Dengan luas kawasan permukiman sebesar 2927,83 Ha maka luas permukiman yang tertata adalah 2821,43 Ha, sehingga persentase luas permukiman yang tertata adalah sebesar 96,37%.

5. SOSIAL

Indikator kinerja pada Dinas Sosial ditetapkan sebanyak 2 (dua) indikator yaitu persentase Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri dan persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Untuk indikator kinerja yaitu persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri pada tahun 2020 realisasi capaiannya sebesar 2,67 % sedangkan ditargetkan sebesar 3.23 % atau terealiasi sebesar 82,66 % dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain jumlah PMKS meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 jumlah PMKS sebanyak 43.262 sedangkan tahun 2020 sebanyak 43.409. Jumlah PMKS yang mandiri secara kuantitatif juga lebih rendah dari yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1.161 orang dari yang ditargetkan sebanyak 1.398 orang.

Untuk indikator persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejateraan sosial pada tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 58,32 % sedangkan target yang ditetapkan sebesar 57,78 % atau tercapai 100,93 % dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Mataram sangat mendukung pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kota Mataram untuk ikut serta membantu dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

3.1.2.2 LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja daerah pada urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan yaitu 1). Persentase Pencari Kerja Yang Terlath; 2). Persentase

penerapan aturan ketenaga kerjaan oleh perusahaan; 3). Persentase penempatan tenaga kerja. Dari ketiga indikator tersebut ada dua indikator yang tidak tercapai yaitu persentase penerapan aturan ketenaga kerjaan oleh perusahaan dan. persentase penempatan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh refocusing anggaran pada kegiatan penempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja sehingga kedua indicator tersebut tidak dapat tercapai sesuai dengan target.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja daerah bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, dari tiga 3 (tiga) indikator tersebut, ada dua yang belum mencapai target pada tahun 2020 yaitu:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Mataram secara statistik telah menunjukkan trend peningkatan dari **92.54** pada tahun 2019 menjadi **92.77** pada tahun 2020. Namun demikian, capaian tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar **97.80%.** Meskipun program - program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan di Kota Mataram, namun komponen yang paling signifikan belum banyak mengalami perubahan adalah angka pengeluaran per kapita baik laki laki dan perempuan pertahunnya. Hal ini disebabkan belum pulihnya ekonomi penduduk pasca gempa lombok ditambah lagi kondisi pandemi covid -19 yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan warga.

b. Nilai Kota Layak Anak (KLA)

Kota/Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Nilai pencapaian Kota Layak Anak (KLA) di Kota Mataram pada tahun

2020 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 700 poin, namun skor yang terealisasi baru 672 poin. Belum tercapainya target KLA tersebut disebabkan oleh Evaluasi Kota Layak Anak berbasis aplikasi pada tahun 2020 ditiadakan karena pandemi Covid 19, dan kegiatan pengembangan KLA tetap dilaksanakan dalam rangka pemenuhan indikator KLA secara prioritas sesuai kondisi anggaran yang direfocusing yaitu koordinasi gugus tugas KLA melalui media daring dan whats app group serta pembinaan forum anak kecamatan dan kelurahan dengan protokol covid 19.

3. KETAHANAN PANGAN

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal tahun 2020 adalah sebesar 92,03 persen turun sebesar 3,73 persen dari target yang telah ditetap yaitu sebesar 95,75 persen. Ada 6 indikator kinerja yaitu 1) Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita, 2) Persentase Cadangan Pangan Pemerintah, 3) Persentase harga komoditas yang terpantau secara berkala, 4) Persentase Kelompok Pangan yang sesuai standar, 5) Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi, 6) Persentase Daerah yang berpotensi rawan pangan. Penurunan ini disebabkan karena adanya pencapaian dua indikator dari ketersediaan dan cadangan pangan sebagai komponen dari standar pelayanan minimal yang tidak mencapai target yaitu:

1. Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

   Pencapaian indicator ketersediaan energy dan Protein Perkapita tahun 2020 adalah sebesar 139,08 persen, terjadi penurunan sebesar 383,15 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 513,23 persen. Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2020 ketersediaan energi adalah sebesar 3.500,28 kkal/kapita/hari, menurun sebesar 7.1292,13 kkal/kapita/hari dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 10.692,41 kkal/kapita/hari, tetapi penurunan tersebut masih berada diatas Angka Kecukupan Energi (AKE) untuk kebutuhan kalori perorangan perhari yang dianjurkan dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2012 yaitu 2.400 kkal. Penurunan ini disebabkan oleh produksi padi Kota Mataram yang terus menurun setiap tahunnya akibat alih fungsi lahan yang tinggi. Untuk ketersediaan protein mengalami penurunan dari 366 gram/kap/hr menjadi 83,35 gr/kap/hr di tahun 2020. Bila dilihat dari anjuran Angka Kecukupan Protein (AKP) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yang

menetapkan 63 gram perkapita perhari pada tingkat ketersediaan, maka ketersediaan protein di Kota Mataram telah melebihi AKP sebesar 20 gram perkapita perhari dari jumlah yang dianjurkan.

2. Persentase cadangan pangan pemerintah

   Untuk Tahun 2020 pengadaan beras untuk gudang hanya sebesar 10 ton mengingat terbatasnya anggaran yang diberikan, sehingga capaian indikator cadangan pengan adalah sebesar 16,67% dari target sebesar 25 %.

4. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dari dua indikator pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat satu indikator yang tidak tercapai pada tahun 2020 yaitu Rasio Akseptor KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). KB MKJP merupakan alat/metode kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam waktu jangka panjang, yang meliputi IUD (Intra Uterine Device), Implant (susuk KB) dan kontap (Kontrasepsi mantap). Metode kontrasepsi MKJP dipercaya lebih efektif dan efisien dalam menekan fertilitas dan mengurangi ledakan jumlah penduduk. Pada tahun 2020, rasio KB MKJP di Kota Mataram terealisasi sebesar 29.69% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu 1). Refocusing anggaran menyebabkan program kegiatan terkait pembinaan keluarga berencana, Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi individudan kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal; 2). Keterbatasan mobilitas penyuluh KB terkendala karena adanya Pandemi Covid 19; dan 3). Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB.

5. PERHUBUNGAN

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja daerah urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang perhubungan yang tidak mencapai target di tahun 2020 yaitu prosentase penggunaan moda angkutan umum yang ditargetkan sebesar 5% namun terealisasi sebesar 3%. Masih rendahnya capaian penggunaan moda angkutan umum disebabkan oleh tingkat layanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan umum belum maksimal sehingga animo masyarakat untuk beralih moda transportasi relatif minim selain itu

kemudahan kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan lifestyle masyarakat dengan gaya hidup hedonis dalam menggunakan kendaran roda 4 (empat) juga disinyalir sebagai penyebab minimnya penggunaan moda angkutan umum.

6. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Terdapat 1 (indikator) kinerja daerah urusan Komunikasi dan Informatika yang tidak mencapai target di tahun 2020 yaitu indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang ditargetkan sebesar 2,80 namun terealisasi sebesar 2,51. Adapun rincian masing-masing indikator sasaran meliputi: 1) domain kebijakan SPBE, ditarget\kan sebesar 2,00 namun realisasi sebesar 1,59; 2) domain tata kelola ditargetkan sebesar 2,50 namun terealisasi sebesar 2,00; 3). domain layanan SPBE ditargetkan sebesar 3,50 namun terealisasi sebesar 3,06 dan 4). tingkat kepuasan pelayanan komunikasi dan informasi publik ditargetkan sebesar 85 namun terealisasi sebesar 78,39. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang berdampak pada refocusing anggaran dan tidak terlaksananya evaluasi dari Pusat.

7. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja daerah pada urusan pilihan perindustrian yaitu Persentase peningkatan volume usaha koperasi kedua indikator tersebut tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid - 19 menyebabkan banyak dari pelaku koperasi dan UKM yang tidak bisa berproduksi karena daya beli masyarakat juga berkurang. Menurunnya kapasitas produksi berimbas pada kinerja koperasi dan UKM mengalami perlambatan.

8. KEPEMUDAAN & OLAHRAGA

Penyelenggaraan urusan kepemudaan difokuskan pada pelaksanaan fasilitasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan melalui monitoring dan evaluasi kebutuhan sarpras kepemudaan, pertemuan organisasi pemuda, pembinaan pemuda pelopor (pemuda pelopor anti narkoba, mitigasi bencana, lingkungan asri), dan pemuda terlatih untuk mengelola usaha. Target pencapaian pada urusan kepemudaan belum tercapai, karena keseluruhan kegiatan fasilitasi mengalami penundaan dan pembatasan sebagai dampak refocusing kegiatan yang berfokus pada penanganan pandemic Covid-19. Sama halnya dengan penyelenggaraan urusan keolahragaan, seluruh event

olahraga yang berbasis pada pencapaian prestasi mengalami penundaan yang berdampak pada belum tercapainya target perolehan medali. Namun disisi lain, upaya koordinasi lintas sektor dalam optimalisasi pemantapan prestasi olahraga terus dilakukan, termasuk melakukan sinergi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan KONI Kota Mataram.

9. KEBUDAYAAN

Penyelenggaraan urusan kebudayaan dengan indikator persentase sanggar seni yang menerima apresiasi sebesar 30% belum mencapai target, hal ini dipengaruhi oleh adanya pembatasan event seni dan budaya sebagai dampak pandemic Covid-19. Koordinasi kelembagaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam upaya mempertahankan eksistensi sanggar seni melalui pemantauan keberadaan sanggar seni. Sanggar yang ada sebagai sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, dan seni peran.

10. PERPUSTAKAAN

Pada urusan wajib bukan pelayanan dasar perpustakaan, terdapat 1 (satu) indikator yaitu persentase kunjungan perpustakaan per tahun. Indikator tersebut pada tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 11.20%, namun terealisasi 10.18%. Penyebab tidak tercapainya target ini karena waktu layanan dan kapasitas pengunjung yang dipangkas sampai 50% pada masa pandemi covid-19. Jam buka layanan dari jam 08.00 sampai dengan 11.30 WITA. Jumlah pengunjung per hari sekitar 50 org, namun pada hari biasa sebelum pandemi rata-rata pengunjung lebih dari 100 orang per hari. Selain itu, layanan peminjaman/pengembalian dan baca di tempat dipangkas 50% dgn pengurangan meja dan kursi baca sesuai protokol jaga jarak. Sementara layanan bebas pinjam untuk Mahasiswa yg akan wisuda tetap dilakukan dgn menerapkan 3M. Disediakan juga tempat cuci tangan, pengukur suhu, hand sanitizer, tanda silang di area tunggu, layar pelindung di meja petugas.

11. KEARSIPAN

Pada urusan wajib bukan pelayanan dasar kearsipan, dari tiga (3) indikator kinerja daerah bidang kearsipan, hanya satu indikator yang tidak tercapai yaitu

persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku. Realisasi indikator ini sebesar 48.72% dari target sebesar 51.28%. Belum tercapainya target indikator ini disebabkan oleh refocusing anggaran sehingga pengerjaan pengelolaan arsip difokuskan pada dua OPD yaitu arsip Dinas Kearsipan dan Perpustaskaan dan arsip.

3.1.2.3 LAYANAN URUSAN PILIHAN

1. PARIWISATA

Terdapat 2 (dua) indikator dari 3 (tiga) indikator kinerja urusan pilihan bidang pariwisata yang tidak mencapai target di tahun 2020, yaitu: 1). jumlah kunjungan wisatawan yang ditargetkan sebesar 823.095 namun terealisasi sebesar 42.213 wisatawan; 2) rata-rata lama tinggal realisasi selama 2,5 hari dari target 3 hari. Jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan sebagai akibat adanya pembatasan perjalanan dan penutupan fasilitas umum disebabkan pandemi Covid-19 diketahui tingkat occupancy hotel dari bulan Maret s.d. Juli 2020 nihil sementara realisasi indikator PDRB sektor pariwisata sebesar 228.472 Milyar masih merupakan estimasi karena data belum keluar dari BPS.

2. PERTANIAN

Terdapat 2 (dua) indikator dari 3 (tiga) indikator kinerja daerah urusan pilihan sektor pertanian yang tidak mencapai target di tahun 2020 yaitu:

1). Jumlah produksi pertanian, terdiri atas:

a. Padi

Produksi padi pada tahun 2020 tercapai sebesar 89.93% atau 22.482 Ton dari target sebesar 25.000 Ton. Tidak tercapainya target ini disebabkan karena beberapa hal:

i. Semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang diperuntukkan bangunan perumahan menyebabkan berkurangnya luas lahan untuk pertanian di Kota Mataram;

ii. Menurunnya produktivitas tanaman padi karena faktor iklim yang tidak mendukung pada saat tanam padi;

iii. Pelaksanaan program dari Kementerian Pertanian mengenai Program Percepatan Tanam (LTT) yaitu selesai panen padi langsung tanam hal ini

memberikan dampak penanaman jadi tidak serentak menyebabkan berkembangnya hama penyakit dan lahan pertanian menjadi terlalu jenuh sehingga mempengaruhi produktivitas tanaman.

b. Kedelai

Harga kedelai yang rendah, program pemerintah yang menyarankan alih komoditi ke jagung dan tanaman hortikultura.

c. Sayuran

Untuk produksi tanaman hortikultura terutama sayuran tidak sesuai target berkurangnya lahan untuk budidaya sayuran dimana lahan usahanya adalah lahan sawah. Iklim juga mempengaruhi produksi karena sayuran membutuhkan kondisi iklim yang spesifik, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering.

2). Jumlah produksi daging

Jumlah produksi daging pada tahun 2020 sebesar 1.824 ton dari target sebesar 2.200 Ton. Tidak tercapainya target ini disebabkan karena beberapa hal:

a. Banyaknya daging impor (dari luar Kota Mataram) yang masuk harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan daging lokal;
b. Keterbatasan jumlah populasi sapi potong yang layak di potong sesuai aturan pemotongan (cukup usia, cukup berat dan bukan betina produktif) dan persediaan hewan potong yang harus mengikuti protocol Covid-19;
c. Berkurangnya permintaan konsumen akan daging akibat adanya wabah Covid-19 karena daya beli masyarakat berkurang.

3. PERDAGANGAN

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja daerah pada urusan pilihan perdagangan yaitu:

a) Laju Pertumbuhan PDRB kategori usaha Perdagangan;

Kategeori usaha perdagangan merupakan *engine of growth* ekonomi Kota Mataram. Sebelum pandemi covid 19, rata-rata pertumbuhan sektor ini bisa mencapai 6% sd. 9%. Pada saat covid 19, sektor ini diperkirakan hanya mampu tumbuh sebesar 4, 39%. Hal ini disebabkan oleh pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat dan pembatasan operasional pusat-pusat perbelanjaan yang menyebabkan kinerja sektor perdagangan mengalami perlambatan.

b) Persentase usaha sektor perdagangan yang tertib niaga

Pencapaian kinerja indikator persentase usaha sektor perdagangan yang tertib niaga pada tahun ini jauh dibawah target disebabkan oleh roda ekonomi yang lumpuh selama pandemi covdi-19 dan secara khusus pandemi memaksa adanya recofusing anggaran yang memaksa frekuensi untuk turun langsung ke lapangan baik itu berupa pengawasan perusahaan maupun untuk melakukan tera/tera ulang ke pasar dan masyarakat pelaku usaha menjadi kurang optimal/maksimal disbanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

4. PERINDUSTRIAN

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja daerah pada urusan pilihan perindustrian yaitu 1). Persentase peningkatan volume usaha industry; dan 2). Persentase PDRB Sektor Industri. Pada tahun 2020, kedua indikator tersebut tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena akibat adanya pandemi covid - 19 menyebabkan banyak dari pelaku industri yang tidak bisa berproduksi karena daya beli masyarakat juga berkurang. Menurunnya kapasitas produksi berimbas pada kinerja sektor industri atau manufaktur mengalami perlambatan.

3.1.2.4 PENUNJANG URUSAN

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dalam penunjang urusan Perencanaan Pembangunan terdapat 2 indikator yaitu indikator nilai aspek perencanaan pada evaluasi SAKIP dan persentase indikator kinerja daerah yang mencapai target kinerja. Nilai kedua indikator tersebut berada dibawah target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan kinerja pembangunan daerah menghadapi kendala dengan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang membatasi aktifitas kerja untuk melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan.

2. KEUANGAN

Dari tujuh (7) indikator kinerja daerah penunjang urusan keuangan, terdapat dua (2) indikator yang tidak mencapai target pada tahun 2020 yaitu 1). persentase peningkatan penerimaan pajak daerah; dan 2). Persentase PAD terhadap pendapatan daerah. Tidak tercapaianya kedua indikator tersebut disebabkan oleh wabah covid-19 membuat daya dukung fiskal daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram diperkirakan mengalami penurunan cukup signifikan.

Pandemi ini berimbas pada semua sektor, termasuk kinerja sektor ekonomi yang mengalami perlambatan sehingga berimplikasi pada potensi menurunnya PAD dari pajak, retribusi dan pendapatan BLUD RSUD Kota Mataram.

3. KEPEGAWAIAN

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja daerah penunjang urusan kepagawaian yaitu 1). Persentase Pejabat Struktural yang mendapat peningkatan kompetensi; 2). Persentase Pejabatan Fungsional yang mendapat peningkatan kompetensi; 3). Nilai Indeks Profeisionalitas ASN; 4). Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian. Pada Tahun 2020, keempat indikator tersebut belum mencapai target karena terkait pandemi covid 19 dan adanya recofusing anggaran sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan.

4. PENGAWASAN

Terdapat 3 (tiga) indikator dari 4 (empat) indikator kinerja daerah penunjang urusan bidang pengawasan yang tidak mencapai target di tahun 2020, yaitu: 1). Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan target sebesar 92% namun realisasi sebesar 77,17%; 2). Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan dengan target sebesar 93% namun terealisasi sebesar 64,50%, dan 3). Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD yang mendapat nilai baik (minimal B) dengan target 85% namun terealisasi sebesar 74,36%. Hal itu disebabkan penetapan target di tahun 2020 menggunakan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya sementara persentase temuan dipengaruhi oleh jumlah temuan baru, sehingga pada tahun 2020 ini jumlah temuan baru besar, sekitar Rp. 700.000.000,-.

3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Capaian indikator aspek Daya Saing Daerah disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				TARGET	REALISASI
		2016	2017	2018	2019	2020	2020

1	2	3	4	5	6	7	8
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1.	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	237,52	208,53	215,29	207,51	237.08	168,05
2.	Indeks Keamanan Manusia	NA	3	3	4	4	4*
3.	Indeks Kota Toleran	4,05	3,78	4,41	4,417	4.94	4,417*
4.	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	101,7	123,2	96	87,28	77	87,28*
5.	Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan dan Penilaian Ombudsman	B	BB	BB	A	A	A*
6.	Indeks Kota Layak Huni	60	61,6	61,6	65	65	61,6*
7.	Target penilaian maturitas SPIP (level)	Persiapan	persiapan	persiapan	Level 3	Level 3	Level 3
8.	Target penilaian kapabilitas APIP (level)	Persiapan	persiapan	persiapan	Level 3	Level 3	Level 3
9.	Kunjungan wisatawan (orang)	512.725	597.725	682.725	852.725	823.095	42.213
10.	Indeks SPBE						
	- Domain Kebijakan SPBE		-	2,76	1,59	2,00	1,59
	- Domain Tata Kelola		-	2,29	2,00	2,50	2,00
	- Domain Layanan SPBE		-	2,91	3,06	3.50	3.06
11.	Cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar Ombudsman (%)	69,2	69,2	100	100	100	100*
12.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	76.16	78.27	79.02	80.52	80.52	80.52*
13.	Realisasi Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	PMA: $ 285.043	PMA: $ 285.043	PMA: $ 285.043	PMA: $ 285.043	PMA: $ 285.043	PMA: $ 0*
		PMDN: 150 milyar	PMDN: 850 milyar	PMDN: 500 milyar	PMDN: 500 milyar	PMDN: 500 milyar	PMDN: 142,01 milyar*

*Sumber: BPS Kota Mataram, OPD Penanggungjawab Indikator, *) Angka Proyeksi 2020.*

Nilai Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Mataram menunjukkan peningkatan baik dalam skor maupun ranking walaupun masih masuk dalam kluster merah yang menandakan penilaian toleransi sangat rendah (skor kurang dari 4,5). Pada tahun 2018, tingkat toleransi di Kota Mataram mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang ditandai dengan naiknya rangking Kota Mataram dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari peringkat 85 menjadi peringkat 68 dari 94 Kota di Indonesia. Sehingga Kota Mataram dapat keluar dari 10 Kota dengan skor toleransi terendah. Nilai IKT tahun 2020 masih menggunakan capaian tahun 2018 dan 2019 dikarenakan belum tersedianya nilai IKT terbaru yang dipublikasi oleh Setara Institute.

Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menggambarkan tingkat resiko bencana masing-masing wilayah di Indonesia. Pengkajian risiko bencana pada dasarnya menentukan besaran 3 komponen risiko yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity). Perhitungan Nilai IRBI kabupaten/kota di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang kemudian dipublikasikan melalui portal InaRISK BNPB (http://inarisk.bnpb.go.id/). Nilai IRBI Kota Mataram Tahun 2020 masih menggunakan hasil perhitungan tahun 2019 dikarenakan belum dilakukan perhitungan kembali oleh BNPB. IRBI Kota Mataram tahun 2020 berada pada angka 87,28 yaitu termasuk tingkat resiko sedang. Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Nilai IRBI Kota Mataram mengalami penurunan yang cukup signifikan yang menunjukkan berkurangnya tingkat resiko dari resiko tinggi menjadi sedang. Penurunan nilai IRBI ini dimungkinkan dengan meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Indeks Kota Layak Huni (Most Livable City Index – MLCI) dihitung oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia dalam periode 3 tahun sekali. Perhitungan Indeks Kota Layak Huni pada tahun 2017 dikategorikan menjadi 3 kelompok, yakni top tier city (kota dengan indeks livability di atas rata-rata), average tier city (kota dengan nilai indeks livability rata-rata), dan bottom tier city (kota dengan nilai indeks livability di bawah rata-rata). Berdasarkan MLCI tahun 2017, Kota Mataram memperoleh skor 61,6 sehingga berada pada kategori Bottom Tier City. Hasil perhitungan MLCI periode tahun 2020 belum tersedia sehingga capaian Indeks Kota Layak Huni Kota Mataram Tahun 2020 masih menggunakan hasil perhitungan tahun 2017.

Hasil penilaian penyelenggaraan SPIP oleh BPKP terhadap 25 fokus penilaian pada level entitas dan kegiatan pokok yang menjadi obyek penilaian SPIP menunjukkan maturitas pada level “terdefinisi” dengan skor 3,1399 dari maksimal 5 atau tingkat 4 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Maturitas SPIP pada level terdefinisi mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Mataram telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai, diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan, namun belum sepenuhnya secara berkala dilakukan pemantauan serta belum sepenuhnya dilakukan evaluasi sehubungan dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Level kapabilitas APIP Inspektorat Kota Mataram telah mencapai ke level 3. Berbagai langkah yang telah dilaksanakan seperti koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi NTB, Pembentukan Satgas Kapabilitas APIP, dan peningkatan profesionalisme fungsional auditor

dan pengawas pemerintahan. Level 3 Kapabilitas APIP berarti APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan sebesar 95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dan penutupan beberapa tempat rekreasi dan hiburan masyarakat.

3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.4

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Pemerataan sarpras penunjang layanan pendidikan	1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				• Belum meratanya kualitas pendidikan dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan pendidikan. • Belum optimalnya pelayanan dan akses pendidikan di setiap kecamatan. • Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung pemberlakuan standar pelayanan minimal (SPM) pedidikan. • Tingkat ketergantungan dan pendidikan daerah pada Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. • Belum optimalnya peran SKB sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sesuai target, hanya ada pengurangan peserta krn	• **Penguatan peran Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) dalam upaya pemeretaan kualitas pendidikan** • **Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal** • **Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan** • **Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar** • **Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan**	
				Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah fasilitas sekolah yang dibangun (penembokan, toilet, taman, pengurugan)	14 Sekolah	10 Sekolah			
				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang Kelas baru	2 RKB	1 RKB			
				Pembangunan ruang ibadah	Jumlah ruang ibadah yang dibangun	1 Unit	1 Unit			
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	1 Unit	1 Unit			
				Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	Jenis Pengadaan	2 Jenis (Buku Laporan Hasil Evaluasi Belajar)	2 Jenis			
				Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis			
				Pengadaan Meubelair	Jumlah sekolah yang mendapat	20 Paket	20 Paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sekolah	meubelair			rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid19		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah yang direhab	7 Sekolah	7 Sekolah	Sesuai target		
				Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah utk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	Jenis pembiayaan yang disediakan	260 Sekolah	260 Sekolah	Sesuai target, hanya ada pengurangan peserta krn rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid19		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Terseleksinya siswa berprestasi dibidang sains, seni, literasi dan olahraga tingkat Kota Mataram	240 Sekolah	240 Sekolah	Sesuai target, hanya ada pengurangan peserta krn rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid19		
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan Monev	1. Jenis	1 Jenis	Sesuai target		
				Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Berkarakter pada Pembinaan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta Sosialisasi Festival Lomba dan Olimpiade Literasi SD, SMP negeri/swasta Kota Mataram	518 Orang	461 Orang	Sesuai target, hanya ada pengurangan frekwensi krn rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid19		
				Pengembangan Sistem Informasi melalui	Jumlah Sekolah Yang mengikuti PPDB Online	24 Sekolah	24 Sekolah	Sesuai target Sesuai target, hanya ada pengurangan frekwensi krn rasionalisasi		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				WEB				anggaran untuk penanganan Covid19		
			Pemerataan kualitas tenaga pendidik di semua satuan pendidikan dasar	2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
				Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan kependidikan Bidang Pendidikan Dasar	Peserta sosialisasi/pendampingan/workshop	932 Orang	838 Orang	)Sesuai target)Sesuai target)Sesuai target	)**Sesuai target**)**Sesuai target**	
				Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta sosialisasi/pendampingan/workshop	366 Orang	330 Orang	Tidak terlaksana akibat Pemangkasan/Rasionalisasi Anggaran)Sesuai target Tidak terlaksana akibat Pemangkasan/Rasionalisasi Anggaran	**Membuat Usulan Perencanaan Tahun 2021 namun masih belum bisa terpenuhi karena keterbatasan anggaran**)Sesuai target **Membuat Usulan Perencanaan Tahun 2021**	
				Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan bidang	Peserta sosialisasi/pendampingan/workshop	150 Orang	150 Orang	)Sesuai target)Sesuai target)Sesuai target	)Sesuai target)Sesuai target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					tenaga kebudayaan.						
			Penguatan kelembagaan pendidikan (akreditasi sekolah)	3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					Sesuai target	
					Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan,	Frekuensi Monev/rapat koordinas Pengawas	6 kali	3 kali			
					Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan,	Honorarium Tim Penyusunan/ Pembahasan Produk Hukum Perwal/Kepwal	9 Bulan	4 BulaN			
						Visitasi Asesor, Peserta Bimtek Asesor Akreditasi Sekolah, Monitoring dan Verifikasi KTSP	30 Orang	0 Orang			
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rapat koordinasi Dinas	12 Bulan	6 Bulan			
					Penyusunan Profil Pendidikan,	Tersusunnya buku profil pendidikan	1 Buku	1 Buku			
					Pengembangan Sistem Informasi Melalui WEB	Jenis Sistem Informasi yang dikembangkan (Sewa Hosting, H. Pengelolaan Web, H. Smart City, H, dapodik)	4 Jenis	2 Jenis			
					Pelaksanaan Kerjasama	Jenis Publikasi yang	1 Jenis (Bidang	1 Jenis (Bidang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Dengan Media Massa dan Elektronika Tentang Informasi Isu Pendidikan	dikerjasamakan	pendidikan)	pendidikan)			
			Pemerataan sarpras penunjang layanan pendidikan	4	Program Pendidikan Anak Usia Dini						
					Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapat Meubel	1 TKN	1 TKN			
					Rehabillitasi bangunan sekolah,	Jumlah Sekolah yang direhab	1 TKN	1 TKN			
					Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Peningkatan Kapasitas Bunda PAUD Kecamatan, Kelurahan dan Pengelola PAUD Se Kota Mataram	2.948 Orang	0 Orang			
					Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran	Jenis kurikulum yang dikembangkan	2 Jenis kurikulum berbasis muatan lokal	2 Jenis kurikulum berbasis muatan lokal			
					Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Berkarakter tingkat PAUD	Jumlah Peserta Pelatihan Pendidikan Karakter Pengelola PKBM, LKP dan PAUD	300 Orang	0 Orang			
			Evaluasi	5	Program						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			data pokok pendidikan		Pendidikan Non-Formal						
					Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah verifikasi, validasi dan visitasi penerbitan ijin lembaga PAUD dan Dikmas yang dilakukan	70 lembaga	70 lembaga			
					Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK)	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Ditambah	4 Ruang	4 Ruang			
			Penguatan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	6	Program Sekolah (Dana BOS)						
					Pengembangan Kompetensi Kelulusan, Pengembangan Standar Isi, Pengembangan Standar Proses, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pengembangan Standar Pembiayaan dan Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	Jumlah sekolah penerima	170 Sekolah (Negeri)	170 Sekolah (Negeri)			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				● Kegiatan pertemuan dan perjalanan dinas dalam daerah terhenti/tertunda karena kondisi Covid – 19 yang perlu perhatian besar ● Akreditasi Puskesmas tertunda pada tahun 2020 berdasrkan Surat Edaran nomor: HK.02.02/VI/0885/2020 tentang Pemberitahuan Penangguhan penyelenggaraan survei akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama & Laboratorium ● Rujukan Persalinan di RSUD di hentikan sejak awal pandemi ● Masih Tingginya Kasus DBD ● Masih Munculnya kasus gizi buruk dan stunting ● Kondisi Sarana Pustu dan Poskesdes yang rusak	● Mengurangi frekuensi dan volume peserta pertemuan serta perjalanan dinas dalam daerah serta melakukan recofussing anggaran untuk kegiatan penanganan dan pencegahan Covid - 19 ● Akreditasi puskesmas diusulkan kembali melalui DAK Non Fisik Tahun 2021 ● Melakukan kerjasama dengan RS swasta lainnya yang tidak menangani COVID ● Melaksanakan fogging focus & Pemantauan Jentik melalui program 1R1J (satu Rumah 1 Jumantik) ● Pemberian Makanan Tambahan dan Pekan Penimbangan Balita ● Diusulkan Perbaikan Pustu dan Poskesdes tahun 2021	
					Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional	Jasa Pelayanan Medis Non Kapitasi yang tersedia	1 tahun	1 tahun			
					Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK Non FISIK)	Puskesmas melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif	11 puskesmas	11 puskesmas			
					Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
			Memperkuat upaya kesehatan promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)	2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						
					Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	penyebarluasan informasi kesehatan yag terlaksana	4 media	4 media			
						Pelatihan Tim Fasilitator Desa / Kelurahan Siaga Kota Mataram	56 orang	56 orang			
					Pengelolaan Upaya Promotif dan	Pertemuan Konvergensy, Koordinasi dan Evaluasi Lintas	54 orang	54 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Preventif (DAK Non Fisik)	Program / Lintas Sektor untuk Penurunan Stunting					
						Penyuluhan Keliling	30 kali	23 kali			
						Pertemuan Koordinasi Terkait PIS-PK Kota Mataram	70 orang	70 orang			
					Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Pertemuan evaluasi DAK Non Fisik yang terlaksana	70 orang	60 orang			
					Peningkatan Kesehatan Institusi	Pertemuan Koordinas Petugas UKS	17 Org	17 Org			
					Peningkatan Kapasitas UKBM	Jasa Tenaga Kerja Da'i Kesehatan	204 Org/bulan	204 Org/bulan			
					Revitalisasi Posyandu	Bahan Kontak Kader Posyandu	1755 kader	1755 kader			
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
					Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang	Pertemuan TPG Se-Kota Mataram	45 Org	45 Org			
						Jasa media massa (radio spot)	450 kali	450 kali			
						Kunjungan fasilitasi dokter spesialis anak ke Puskesmas	2 puskesmas	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya						
			Memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit	4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						
					Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi	Sosialisasi Pengamanan Air Minum	30 Org	30 Org			
						Pertemuan pengelola Pasar	25 orang	25 orang			
						Penyemprotan Disinfektan ke sarana umum	720 OH	980 OH			
						Monev Kegiatan ODF (Open Defication Free) STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	5 lokasi	5 lokasi			
					Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja	Bimtek Program Kesehatan Kerja di Puskesmas	6 LokASI	6 lokasi			
					Pembinaan Upaya Kesehatan Olahraga	Bimtek Kesehatan Olah Raga di Puskesmas	6 LokASI	6 lokasi			
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	5	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Pembantu dan Jaringannya						
					Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Ambulance Transport yang tersedia	1 unit	1 unit			
			Memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit	6	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan						
					Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Kantin sekolah yang dibina	10 lokasi	10 lokasi			
						Penyuluhan Keamanan Pangan bagi IRTP dalam rangka sertifikasi	150 orang	150 orang			
						Bimtek ke Depot Air Minum	5 lokasi	5 lokasi			
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	7	Program Manajemen Kesehatan						
					Sistem Informasi Kesehatan Daerah	terlaksananya sistem informasi Kesehatan di Dinas dan Puskesmas	12 bulan	12 bulan			
						Bimtek SIKDA ke Puskesmas	1 kali	1 kali			
					Peningkatan Administrasi Umum dan Inventaris Barang Dinas	Tersusunnya dokumen inventaris barang Dinas dan	1 laporan	1 laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					dan UPTD	UPTD					
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	8	Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan						
					Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat, Reagen, Bahan Habis Pakai perlengkapan Medis dan Vitamin yang terlaksana	5 jenis	5 jenis			
					Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Obat PKD, Reagen dan BMHP yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
					Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Pembinaan Teknis ke Sarana Kesehatan dan PKRT	5 kali	5 kali			
						Validasi Data ASPAK Puskesmasdan Rumah Sakit Kota Mataram	13 hari	11 hari			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)	alat kesehatan yang tersedia bagi Puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas			
					Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK Non Fisik)	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	15 jenis	13 jenis			
					Pengawasan Fasilitas	Jumlah sarana farmasi yang dibimtek	67 sarana	65 sarana			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Pelayanan Kefarmasian (DAK Non Fisik)	pemenuhan standar dan persyaratan sarana pelayanan kefarmasian					
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	9	Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia						
					Peningkatan Pelayanan KIA	Workshop Ruptura Perinium Grade 1-2 bagi bidan	30 bidan	30 bidan			
						Supevisi Fasilitatif dari Dikes ke Puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas			
						Supervisi Fasilitatif dari Dikes ke Bidan Desa	26 bidan desa	26 bidan desa			
					Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Jasa Pemeriksaan, Perawatan dan pertolongan Persalinan	1 tahun	1 tahun			
						Cetak Format Pelayanan Kesehatan Anak	1 Paket	1 Paket			
						Cetak Modul Pelatihan Orientasi MTBS	1 Paket	0			
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	Sosialisasi Modul MTPKR bagi team PKPR puskesmas	33 orang	33 orang			
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan	PMT Lansia yang tersedia	1 paket	1 paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Lansia						
			Memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit	10	Program Pengendalian Penyakit						
					Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	Validasi Data Praktek Swasta	6 kali	6 kali			
					Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Refresing Program TB Paru	25 orang	25 orang			
						Orientasi Pemantapan Mutu External Mikroskopis TB	22 orang	22 orang			
						Evaluasi Pelaksanaan Rujukan TCM	40 orang	40 orang			
					Peningkatan surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Penyeledikan Epidemiologi (PE) Kejadian Luar Biasa yang terlaksana	58 kasus	58 kasus			
					Pelayanan Kesehatan Haji	Pengadaan Vaksin Influenza untuk Jamaah Haji Kota Mataram Tahun 2020	850 CJH	673 CJH			
						Pertemuan Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji Tahun 2020	1 kgt	1 kgt			
					Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Pembiayaan Pelayanan kesehatan jiwa bagi warga	100 klaim	122 klaim			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						miskin dan tidak mampu penduduk kota mataram di RSJ Mutiara Sukma Tahun 2019 - 2020					
					Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD	Jumlah Fogging Focus	475 focus	378 Focus			
					Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)	Bahan Habis Pakai HIV dan Sifilis	1 paket	1 paket			
						Catridge TCM	1 paket	1 paket			
					Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK)	Heart Rate Variability (HRV) Test yang tersedia	1 unit	1 unit			
					Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAK Non fisik)	Refresing Program NAPZA bagi kader dan Orang tua	50 orang	50 orang			
						Monitoring dan evaluasi kegiatan Posbintu PTM	85 orang	50 orang			
						Refresing Kader Posbindu PTM Dinas Kesehatan Kota Mataram	85 orang	50 orang			
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan	1 1	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			rujukan		Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)						
					Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Uji kompetensi alih jenjang bagi tenaga kesehatan	1 kgt	1 kgt			
						Uji kompetensi alih fungsi bagi tenaga kesehatan	1 kgt	1 kgt			
						Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani Covid - 19	6 bulan	6 bulan			
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1 2	Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan						
					Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Pendampingan akreditasi bagi puskesmas	11 Puskesmas	0			
					Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)	Puskesmas mendapat pendampingan re- akreditasi	5 puskesmas	0			
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Swasta	Pelayanan Kesehatan Gratis Kelas 3 di Rumah Sakit Kota Mataram Bagi Warga	2500 klaim	2956 klaim			
					Peningkatan Pelayanan	Bimtek terpadu Program Pelayanan	22 kali	22 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Kesehatan Dasar	Kesehatan					
						Jasa Emegency Medical Team (EMT) Tingkat Puskesmas	70 kali	70 kali			
						Bimtek Program Kesehatan Tradisional Puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas			
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	13	Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan						
					Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Operasional Laboratorium yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
					Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian	Operasional IFK yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
					Pengelolaan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik)	terlaksananya distribusi obat dan e-logistic	12 bulan	12 bulan			
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar						
					Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di	Puskesmas yang melaksanakan Jaminan Kesehatan	11 puskesmas	11 puskesmas			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Puskesmas	Nasional					
		RSUD KOTA MATARAM	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				● Minimnya fasilitas sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan termasuk belum berjalannya SIM RS sebagai sarana pengelolaan data rumah sakit; ● Kondisi bangunan yang belum representative dengan luas lahan yang terbatas sehingga sulit untuk melakukan pengembangan; ● Kurangnya pemahaman pasien/keluarga pasien/pengunjung terhadap aturan yang berlaku di RSUD Kota Mataram;	● Meningkatkan dan memenuhi fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dengan membangun system informasi manajemen rumah sakit; ● Membangun komitmen bersama dalam mewujudkan visi misi rumah sakit; ● Merekonstruksi bangunan/gedung sesuai dengan standar; ● Memberikan pemahaman terhadap pasien/ keluarga pasien/ pengunjung terhadap peraturan yang ada di rumah sakit	
					Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Gedung Rumah sakit yang dibangun	4 Paket	4 Paket			
					Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Jenis pengadaan alat kesehatan	5 Paket	5 Paket			
					Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah Jenis pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	3 Paket	3 Paket			
			Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)						
					Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Badan	Jumlah Jenis kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Badan Layanan	4 Paket	4 Paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Layanan Umum Daerah (BLUD)	Umum Daerah					
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum difabel	1	Program pembangunan jalan dan jembatan				1. Karena Pandemi COVID 19 dilakukan *refocusing* anggaran untuk dialihkan untuk penanganan COVID 19, sehingga anggaran untuk penanganan beberapa kegiatan berkurang bahkan tidak ada. Hal itu mengakibatkan tidak tercapainya beberapa target kinerja. 2. Minimnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga tidak ada /berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK), menyebabkan realisasi tidak mencapai target karena minimnya anggaran untuk penanganan beberapa kegiatan antara lain kegiatan penyediaan sarana/prasarana air minum, pengolahan air limbah dan anggaran untuk penanganan jalan kota (jalan yang telah masuk dalam daftar jalan ber status) 3. Banyaknya usulan	1. Telah dilakukan inventarisir beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana akibat adanya *refocusing* anggaran pada tahun 2020 yang akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya agar dapat dilaksanakan. 2. Mengusulkan beberapa pekerjaan untuk ditangani dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengingat terbatasnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dapat dikelola untuk penanganan beberapa pekerjaan. 3. Menginventarisir usulan-usulan masyarakat terutama yang bersumber dari pokok-pokok pikiran dewan untuk dapat Menyusun dokumen perencanaannya pada tahun anggaran sebelumnya untuk	
					Pengendalian pemanfaatan jalan	Jumlah ruas jalan yang dikendalikan pemanfaatannya	30 Ruas Jalan	52 Ruas Jalan			
					Pembangunan jalan	Panjang jalan baru yang di bangun	0.65 Km	0 Km			
					Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	3 Unit	0 unit			
					Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang di tingkatkan	6.5 Km	0 Km			
			Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum difabel	2	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan						
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang di pelihara secara rutin dan berkala	5 Km	2.50 Km			
			normalisasi sungai dan saluran drainase perkotaan	3	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						
					Pembanguna	Panjang saluran	45.000	49.355			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			(penanganan banjir)		n/Rehabilitasi Saluran Drainase	drainase yang dibangun/diperbaiki	Meter	Meter	masyarakat untuk kegiatan penanganan, drainase, saluran dan sungai yang masih bersifat sporadis/titik-titik tertentu saja, tidak dapat menyelesaikan permasalahan genangan yang seharusnya secara keseluruhan dari hulu ke hilir 4. Banyaknya usulan penanganan jalan lingkungan untuk Dinas PUPR, sedangkan Jalan Lingkungan merupakan Jalan yang belum masuk dalam daftar jalan ber status yang dapat diusulkan untuk ditangani dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga target penanganan jalan Kota (Jalan yang telah masuk dalam daftar jalan berstatus) tidak tercapai. 5. Dibutuhkan akurasi dan validasi data terutama data-data dasar yang diperlukan untuk perhitungan indikator kinerja termasuk data-data yang berkaitan dengan OPD lintas sectoral.	dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya sehingga kegiatan tersebut lebih terencana dengan baik untuk tujuan penanganan permasalahan genangan. 4. Melakukan validasi dan akurasi data terutama data-data dasar yang diperlukan untuk penghitungan indikator kinerja termasuk data-data yang berkaitan dengan OPD lintas sektoral sehingga memudahkan penghitungan realisasi kinerja 5. Menginventarisir usulan-usulan penanganan Jalan lingkungan untuk dapat dialihkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, dan mendata Jalan-jalan lingkungan yang telah ditangani untuk dapat diusulkan agar masuk dalam daftar jalan yang berstatus	
			normalisasi sungai dan saluran drainase perkotaan (penanganan banjir)	4	Program Pengendalian Banjir						
					Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Panjang bantaran dan tanggul sungai yang di Rehab/dipelihara	1.500 Meter	1.700 Meter			
					Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun/dipasang	1.500 Meter	1.126 Meter			
			normalisasi sungai dan saluran drainase perkotaan (penanganan banjir)	5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya						
					Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi yang terpelihara	6.000 Meter	118.523 Meter			
					Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang di bangun/di tingkatkan	2.000 Meter	2.756 Meter			
			Pengembangan akses	6	Program Pengembang						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			air bersih, pengelolaan air limbah domestik komunal dan skala kota		an Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					sehingga dapat diusulkan untuk ditangani dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengingat minimnya anggaran DAU.	
					Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Jumlah sambungan rumah bagi masyarakat	10 SR	0 SR			
					Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik	Jumlah unit pengolahan air limbah	20 Unit	6 Unit			
			Pengendalian pemanfaatan ruang	7	Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi						
					Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mengikuti sertifikasi	50 Orang	0 Orang			
			Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan kumuh perkotaan dan kelanjutan penanganan program pascabenca	8	Program Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Publik						
					Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Publik	Jumlah bangunan publik yang dibangun/direhab	15 Unit	7 Unit			
					Penilaian Kelayakan Bangunan	Jumlah Sertifikat Laik Fungsi banggunan	150 Sertifikat	300 Sertifikat			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			na			gedung					
			Pengendalian pemanfaatan ruang	9	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang						
					Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			
					Pemanfaatan Tata Ruang	Jumlah SKRK yang diterbitkan	15 Sertifikat	439 Sertifikat			
					Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang ditangani	5 Kasus	Kasus			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan kumuh perkotaan dan kelanjutan penanganan program pascabencana	1	Program Pengembangan Perumahan				• Belum adanya data yang valid terkait jumlah RTLH Di Kota Mataram • Masih banyaknya penghuni rusunawa yang tidak disiplin dalam menjalakan kewajiban bulanan • Belum tercapaianya Penyediaan 30 % RTH kota yang terdiri atas 20.% RTH publik dan 10% RTH privat disebabkan karena	• Pada tahun 2021 telah dianggarkan untuk melakukan pendataan RTLH di Kota Mataram • Melakukan pendekatan yang humanis kepada penghuni rusunawa yang tidak disiplin menjalankan kewajiban bulanannya • Mengupayakan	
					Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (UPTD)	Jumlah Rusunawa yang terkelola (kamar/KK)	396 Kamar/KK	396 Kamar/KK			
					Perencanaan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perumahan	0 dokumen	0 dokumen			
					Pendataan	Jumlah Dokumen	0 Dokume	0 Dokumen Data RTLH			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Perumahan	Pendataan Perumahan	n Data RTLH		keterbatasan lahan yang tersedia di Kota Mataram ● **B**elum terdatanya secara meyeluruh status kepemilikan tanah di kota Mataram ● Masih banyaknya pemasangan PJU illegal non-meter menyebabkan angka pembayaran listrik PJU menjadi tinggi ● Masih tingginya luasan kawasan kumuh ● Masih banyaknya pemakaman yang merupakan lahan hibah dari anggota masyarakat menyebabkan status lahan masih menjadi milik perorangan/kelompok orang sehingga pengelolaan TPU belum optimal ● Masih banyaknya Fasos fasum perumahan yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah	pembuatan RTH di lahan milik pemda yang berpotensi menjadi RTH ● Melakukan upaya pendataan status kepemilikan tanah melalui anggaran dinas maupun bekerjasama dengan BPN ● Melakukan meterisasi pada PJU PJU yang belum bermeter ● Perlu difokuskannya Anggaran pada daerah yang berkategori kawasan kumuh serta koordinasi yang intensif dengan pihak lain seperti program KOTAKU untuk bersama sama menuntaskan kawasan kumuh ● Perlunya lahan pemakaman diserahkan kepada permerintah daerah sehingga dapat dikelola secara optimal ● Perlu dibuat aturan supaya setiap perumahan baru memiliki batas waktu penyerahan fasos fasum kepada pemerintah daerah	
					Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Pembangunan RTLH dan Rehab RTLH	8 unit	428 (8 unit APBD dan 420 BSPS)			
					Perijinan dan Pengendalian Perumahan	Jenis Dokumen Perencanaan berbasis spasial	0 dokumen	0 dokumen			
					Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Jumlah Pembangunan RTLH dan Rehab RTLH	140 unit	140 unit			
			Pengendalian pemanfaatan ruang	2	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						
					Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersedianya data satus kepemilikan tanah	1 dokumen	Penataan fasilitas umum 877,75 m2			
			Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3	Program pengelolaan areal pemakaman						
					Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Luas areal pemakaman yang tertata	4,95%	- Pembuatan tembok keliling Pas. Bata 633,88			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
								m2			
								- Pemasangan paving Block halaman kubur 568,96 m2			
								- Urugan Pematangan Lahan Kuburan 1215,89 m3			
								- Pembuatan pagar besi kuburan 351,46 m2			
								- Pengecatan tembok lama kuburan 548 m2			
			Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum difabel	4	Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman	Panjang Prasarana dan Sarana Jalan Lingkungan					
					Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman		4000 m	61818,41 m2 (dengan asumsi lebar rata rata jalan 2,5 m, maka panjang jalan adalah 24,73 km			
					Pengendalian	Jenis Dokumen	1	1 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Kawasan Permukiman	Pengendalian Permukiman	Dokumen				
			Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						
					Pemeliharaan RTH	Jumlah Luasan RTH yang terpelihara	111,38 Ha	111,38 Ha			
					Peningkatan / Pembangunan RTH	Jumlah Luasan RTH yang ditingkatkan	1750 m2	2055,90 m2			
			Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum difabel	6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU						
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU	Jumlah Jenis Titik Lampu yang terpelihara	14215 titik	14215 titik			
					Peningkatan / Pengadaan / Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU	Jumlah PJU yang terpasang	600 Titik	710 titik lampu,1.090 m jaringan kabel			
			Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum difabel	7	Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame						
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota	Jenis Dekorasi yang terkelola	705 titik	705 titik			
					Pemeliharaan	Jumlah lokasi dekorasi yang	23 titik	23 titik			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota	terpelihara					
				Penataan dan Pengendalian Reklame	Jumlah reklame yang memiliki izin	289 m2				
5	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				● Tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan Diklat Peningkatan kapasitas SDM anggota satpol PP kota mataram ● Kebijakan untuk peningkatan kapasitas SDM anggota satpo PP kurang ● Belum optimalnya profesional anggota satpol PP dalam melaksanakan tugas dilapangan.	● Tersediamya anggaran untuk pelaksanaan diklat peningkatan kapasitas sdm bagi anggota satpol PP kota mataram. ● Keberpihakan kebijakan pimpinan dalam mendukung kegiatan peningkatan SDM anggota satpol PP kota mataram. ● Dilaksanakanya Diklat-diklat Profesional kerja anggota satpol PP kota mataram.	
				Pembinaaan Mental dan Fisik Aparatur.	Jumlah aparat satuan polisi pamong praja yang humanis dan memahami tugas pokok dan fungsi.	120 Orang	100%			
				Peningkatan kapasitas Kegiatan Korsik Kota Mataram.	Tersedianya anggota korps music yang siap tampil mengiringi kegiatan upacara hari besar nasional.	36 Orang	100%			
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Jumlah apparat pol PP yang telah mengikuti bimtek	30 orang	0%			
				2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.						
				Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kejadian pelanggaran K3 yang ditindak langsung	720 Kejadian di 325 Lingkung	100%	● Jumlah pendudukan yang cukup besar harus diimbangi oleh jumlah aparat Satpol PP, rasio	● Mengusulkan penambahan jumlah aparat satpol PP menjadi 250 orang,	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						ditempat atau lokasi penertiban.	an		antara jumlah aparat penduduk tidak memadai. ● Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan kamtibnas dilingkungan masing-masing dan masih tingginya tingkat pelanggaran perda/perwal. ● Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelayanan kamtibnas oleh aparat satpol PP. ● Kualitas sumber daya aparatur yang masih kurang, kesempatan untuk mengikuti Diklat teknis belum memadai.	saat ini jemlahnya 165 orang. ● Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pemeliharaan kamtibnas. ● Melengkapi sarana dan prasarana pendukung operasional. ● Pengembangan kompetensi aparat satpol PP dengan mengikuti diklat dan bimtek.	
				3	Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.						
					Pemberdayaan PPNS dan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran PERDA Kota Mataram	Penyelesaian kasus pelanggaran perda.	50 Kasus	100%	● Kurang tersedianya SDM PNS pendukung penanganan kasus-kasus pelanggaran peraturan daerah. ● Kurang tersedianya anggaran yang memadai untuk PPNS dan proses penyidikan pelanggaran peraturan daerah. ● Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung proses	● Perlunya koordinasi ke BKPSDM agar mengirim ASN yang layak dan siap untuk diklat PPNS ● Penguatan dan peningkatan anggaran untuk pemberdayaan PPNS dan proses penyidikan pelanggaran peraturan daerah. ● Perbaikan dan	
					Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-	Jumlah kali pembinaan dan pengawasan	3 Kegiatan	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				undangan daerah.				pelanggaran peraturan daerah.	pengembangan sarana dan prasarana (seperti ruang pemeriksaan pelanggar, ruang sidang dll)	
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan.	1 Perda	0%	● Belumoptimalnya penyelesaian dan penanganan pelanggaran praturan daerah.	● Mengoptimalkan peran anggota / ASN untuk dikaderisasi/disiapkan membantu penanganan pelanggaran peraturan daerah.	
		Dinas Pemadam Kebakaran		1 Program Peningkatan Kesiagaan Penanganan Kebakaran				● Belum terakomodirnya anggaran peningkatan kompetensi Petugas Pemadam Kebakaran dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat Penanganan Vandemi Covid-19 ● Adanya Peraturan pelarangan melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang untuk memutus rantai menyebaran Vandemi Civid-19 dan dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat Penanganan Vandemi Covid-19 ● Belum optimalnya dukungan Sarana dan	● Melaksanakan Pelatihan Internal Teknik Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bagi petugas Damkar dalam rangka kesigapan Petugas Pemadam Kebakaran. ● Melakukan himbauan dengan cara membagikan/memberikan semacam brosur atau Pamblet yang berisi himbauan akan bahaya bencana kebakaran dan cara mengantisifasi ketika terjadi bencana kebakaran	
				Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran Bersertifikat	55 Orang	0			
				Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang mengikuti penyegaran fisik	100 Orang	100 Orang			
				2 Program Peningkatan Pencegahan Bahaya						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Kebakaran				prasarana Pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang ada	● Pemeliharaan dan mengupayakan Perbaikan sarana dan prasarana yang ada guna mendukung kinerja Petugas Pemadam Kebakaran	
					Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Pilot Project Kecamatan	160 orang	0			
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dalam keadaan baik	8 Unit	8 Unit			
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Edukasi Mitigasi Bencana berbasis sekolah	1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam						
					Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Meningkatnya pemahaman, kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat terhadap ancaman bencana.	12 laporan	12 laporan			
					Fasilitasi pembentukan Sekolah/Madrasah aman bencana	Terbentuknya sekolah/madrasah aman bencana	10 sekolah	0	*Refocusing* Anggaran untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*	Akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya	
					Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Tersusunnya dokumen Renkon gempa bumi dan tsunami	1 dokumen	1 dokumen	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Pemberdayaan Masyarakat Pengurangan Risiko Bencana	Tersuluhnya masyarakat	1 tahun	0	*Refocusing* Anggaran untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*	Akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya	
					Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas personil BPBD dalam Penanggulangan Bencana	0	0	*Refocusing* Anggaran untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*	Akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya	
					Antisipasi potensi bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan antisipasi bencana	0	0	*Refocusing* Anggaran untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*	Akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya	
					Forum pengurangan resiko bencana	Tersedianya Dokumen Renkon Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	*Refocusing* Anggaran untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*	Akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya	
			Penguatan Kelembagaan penanganan bencana	2	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana						
					Penyusunan prosedur penanggulangan bencana	Terwujudnya sistem informasi/data di Pusdalops PB	12 dokumen	0	*Refocusing* Anggaran untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*	Akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya	
					Simulasi bencana	Terwujudnya SDM penanggulangan bencana yang terlatih	12 dokumen pelaporn	0	*Refocusing* Anggaran untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*	Akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya	
					Pengadaan logistik dan obat – obatan di tempat penampunga	Terpenuhinya logistik dan obat-obatan bagi korban bencana	80 paket sembako	80 paekt sembako	-	-	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					n						
					Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1 tahun	1 tahun	-	-	
			Penguatan Kelembagaan penanganan bencana	3	Program Pemulihan Pasca Bencana Alam				-	-	
					Monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana	Terwujudnya pemulihan pasca bencana	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
					Penyusunan SOP pendataan kerusakan akibat bencana	Meningkatkan efektifitas pendataan kerusakan akibat bencana	1 dokumen SOP	0	*Refocusing* Anggaran untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*	Akan dianggarkan pada Tahun Anggaran berikutnya	
		Bakesbangpol		1	Program pengembangan wawasan kebangsaan				● Belum Oftimalnya peran ormas, tokoh pemuda dan komponen msyaakat untuk bisa berpartisifasi aktif dalam mewujud Ketertiban dan keamanan ● Belum Oftimalnya peran FKUB dan lembaga Forum yang sudah terbentuk. ● Masih banyaknya peredaran Narkoba dan Minuman beralkohol yang memicu terjadinya gangguan keamanan	● Meningkatkan Intevensi kebijakan pemerintah Kota Mataram yang mendorong dan mencegah terjadinya Konflik ● Megoftimalkan kegiatan sosialisasi, Diklat Wasbang, Diskusi, pembauran kebangsaan dan Bela Negara ● Mengoftimalkan peran lembaga dan forum-forum yang sudah dibentuk ● Secara terus	
					Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Laporan perkembangan potensi konflik antar umat beragama dan rekomendasi pendirian rumah ibadah melalui FKUB	8 Laporan	8 Laporan			
					Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya	Laporan perkembangan Indeks Demokrasi Kota Mataram melalui	24 Laporan	24 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					bangsa	Tim Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, TKDPD Kota Mataram dan TKDPD di kecamatan			dan kerukunan. ● Masih rendahnya Partisipasi Aktif masyarakat dalam Pemilu	menerus aktif mendorong dilakukannya dialog terbuka dan mendiasi penanganan konflik ● Bekerja sama dengan TNI, Polri dan BNN dalam mencegah dan memberantas Peredaran Gelap Narkoba ● Membentuk Perda P4GN ● Melaksanakan Sosialisasi Pemiih Pemula	
					Peningkatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa	Laporan perkembangan hasil forum dialog dan sosialisasi kebijakan melalui Forum Pembauran Kebangsaan	6 Laporan	6 Laporan			
					Penyelenggaraan penerimaan dan penyerahan kirab pataka	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penerimaan dan penyerahan Kirab Pataka	1 Kegiatan	-			
				2	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan						
					Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis	Jumlah Laporan perkembangan kondisi keamanan	10 Laporan	10 Laporan			
						Jumlah Laporan perkembangan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Mataram melalui Tim	9 Laporan	9 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						Penanganan Konflik					
				3	Program pendidikan politik masyarakat						
					Pendataan, Penertiban dan Pembinaan Lembaga-lembaga Non Pemerintah	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembinaan lembaga lembaga non pemerintah	1 Kegiatan	-			
					Peningkatan Stabilitasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial Politik	Jumlah Penduduk yang menggunakan hak pilihnya pada Pileg, Pilpres dan Pemilu daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
						Laporan Penilaian Persyaratan Bantuan Keuangan Parpol per triwulan	10 Laporan	10 Laporan			
6	Sosial	Dinas Sosial	) Komitmen pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahter	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				• Pola penanganan PMKS keluarga miskin belum optimal • Banyaknya keluhan atau permintaan dari masyarakat yang menginginkan program pelatihan keterampilan akan tetapi anggaran terbatas untuk memenuhi permintaan dari masyarakat.	• Kerjasama antar OPD terkait atau stakeholder untuk pemberdayaan bagi keluarga miskin dan pembinaan lebih lanjut untuk pengembangannya • Dilakukan pencatatan keluhan dan dirujuk ke program-program yang sesuai	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			aan Sosial (PMKS) Sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan kelanjutan program pascabencana	(PMKS) Lainnya				• Belum adanya regulasi di daerah serta belum adanya pusat kesejahteraan sosial (puskesos) di tiap keluhan • Kurang terampilnya pengelola KUBe e-Warong, kurang kompak para pengelola/anggota KUBe e-Warong • Permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di daerah dari hasil rekonsiliasi Dinas Sosial dengan BRI cabang Mataram yang sudah diteruskan ke pusat / kemenos belum ada tindak lanjut • Data belum terverifiksi secara optimal • Masih banyak PMKS yang belum mendapatkan kampanye sosial dan KIE konseling • Belum maksimalnya pemutakhiran data PMKS • Pola penanganan PRSE belum optimal dan masih banyak PRSE yang belum menerima program pemberdayaan karena keterbatasan anggaran • Masih kurangnya perlengkapan petugas bencana (TAGANA) • Terbatasnya anggaran untuk penanganan anak	kebutuhan KPM • Mengoptimalkan peran PSM dan operator di tiap-tiap kelurahan • Dilakukan pendampingan dan edukasi oleh pilar-pilar kesejahteraan sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Mataram • Bersurat kembali melakukan perbaikan data penerima melalui operator di kelurahan • Mensosialisasikan pentingnya melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara optimal melalui bimtek operatr SIKS-NG offline • Bekerjasana dengan kelurahan, kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pilar-pilar sosial yang ada dimasyarakat untuk memberikan informasi terkait program-program penanganan sosial • Berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan dan melibatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat seperti PSM, TKSK dan pilar-	
				Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	30 orang	30 orang			
				Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah keluhan keluarga miskin yang teregistrasi dan tidak teregistrasi dalam BDT yang terlayani	2.500 orang	2.511 orang			
				Pemantapan dan Pendampingan Pelaksanaan e-Warong KUBe Jas	Jumlah e-Warong KUBe Jasa yang dibina	27 KUBe Jasa	27 KUBe Jasa			
				Pemantauan Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai kuota	21.533 KK	33.561 KK			
				Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)	Jumlah data PMKS yang tervalidasi	44.982 KK	55.162 KK			
			) Komitmen pemanfaatan Basis Data	2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Terpadu dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)) Evaluasi Data Kemiskinan	Kesejahteraan Sosial				terlantar ● Belum adanya fasilitas khusus dan memenuhi standar berupa kendaraan operasionnal untuk penanganan anak jalanan ● Belum adanya tempat fasilitas khusus (shelter) untuk pembinaan anak jalanan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Mataram ● Belum adanya tenaga khusus/pekerja sosial yang khusus menangani lanjut usia yang dibiyai dari APBN dan APBD ● Jumlah PMKS eks penyandang penyakit sosial masih banyak yang belum menerima program karena keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pola penanganan PMKS eks penyandang penyakit sosial ● Belum maksimalnya pembinaan SDM kesejahteraan sosial masyarakat (PSM, Karang Taruna, dll) ● Belum maksimalnya pembinaan bagi karang taruna dan kurang adanya koordinasi dengan stakeholder khususnya kelurahan dan kecamatan terkait eksistensi karang taruna pada masing-masing	pilar sosial lainnya untuk melakukan pemutakhiran data PMKS di wilayah masing-masing sehingga dapat memperoleh data yang valid ● Dilakukan kerjasana dengan OPD terkait atau stakeholder untuk pemberdayaan bagi PRSE ● Mengoptimalkan sarana yang ada dan mengusulkan anggaran untuk kebutuhan perlengkapan bagi petugas bencana ● Membuat Peraturan Walikota tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) untuk penanganan anak terlantar ● Bekerjasama dengan UPT Kemensos, Dinsos Prov NTB dan LSM untuk rujukan penanganan anak terlantar ● Bekerjasama dengan OPD terkait pemenuhan pemenuhan hak-hak anak untuk penanganan secara bersama-sama ● Menggunakan tenaga pekerja sosial yang	
				Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan kampanye sosial dan KIE konseling	75 orang	75 orang			
				Pemutakhiran Data PMKS	Persentase data PMKS yang dimutakhirkan	100%	100%			
				Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jumlah PRSE yang mendapatkan pelatihan	30 orang	30 orang			
				Penanganan masalah-masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah logistik yang tersedia bagi korban bencana alam/sosial	200 KK	200 KK			
			Komitmen pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3 Pembinaan Anak Terlantar						
				Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	165 orang	165 orang			
				Penanganan Anak Jalanan	Berkurangnya anak jalanan	75%	75%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					(Anjal)				wilayah ● Belum memadainya sarana dan prasarana LK3 ● Belum optimalnya sistem layanan pengaduan sistem penjangkauan dan sistem rujukan berkelanjutan untuk klien LK3 ● Masih adanya LKS yang tidak aktif lagi dan tidak memperpanjang ijin operasional ● Belum maksimalnya pengetahuan petugas bencana (TAGANA) tentang penanganan bencana khususnya terkait layanan dukungan psikososial (LDP) ● Belum tersedianya ruang sekretariat UPKH, sarana dan prasarana lainnya yang memadai untuk aktivitas atau kegiatan supervisor, koordinator, operator dan pendamping PKH. ● Masih adanya KPM PKH yang belum menerima buku tabungan dan ATM, adanya saldo kosong, ATM tertelan, rusak dan tertukar ● Peranan veteran, janda veteran, janda pahlawan (perintis kemerdekaan)	dimiliki dan dibiayai oleh Kemensos dan ditempatkan di Dinas Sosial Provinsi NTB ● Bekerjasama dengan OPD terkait atau stakeholder dalam mendukung penanganan eks penyandang penyakit sosial ● Memberikan bimbingan sosial dan bantuan stimulan UEP kepada PMKS eks penyandang penyakit sosial ● Memberikan pembinaan bagi SDM kesejahteraan sosial masyarakat secara sistematis dan berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk pemberdayaan SDM keejahteraan sosial dimasing-masing wilayahnya untuk ikut berpartisipasi secara optimal dalam membantu pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial ● Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pembinaan karang taruna dan memfasilitasi kegiatan	
			Komitmen pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo						
					Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia	Jumlah PMKS Lansia yang mendapatan bimbingan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar	2.682 orang	2.682 orang			
			Komitmen pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5	Program Pembinaan eks penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)						
					Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	25 orang	25 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									belum dilakukan secara optimal dalam meningkatkan penguatan nilai-nilai kepalawanan kepada masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa ● Belum terbentuknya Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (LPTSP), tetapi PERDA terbentuknya LPTSP sudah ada. ● Kurangnya SDM Pendamping Program Keserasian Sosial ● Belum berjalannya kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Keserasian Sosial ditengah masyarakat di lingkungan rawan konflik. ● Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan keluarga dalam memberikan motivasi maupun dukungan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan diri ● Sarana dan prasarana yang masih banyak belum ramah disabilitas ● Tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang masih rendah ● Belum memadai sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran	karang taruna dengan lebih sistematis dan terarah sehingga karang taruna ditiap-tiap kelurahan dapat berperan aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial. ● Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengusulkan anggaran untuk kebutuhan kegiatan LK3 ● Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait permasalahan kesejahteraan sosial keluarga agar dapat mengoptimalkan sistem promosi layanan, pengaduan dan jangkauan serta rujukan klien LK3 ● Dilakukan pembinaan bagi LKS untuk aktif lagi dalam kegiatan penanganan kesejahteraan sosial dan bagi LKS yang tidak memperpanjang untuk melakukan perpanjangan ijin operasionalnya ● Memberikan Materi pelatihan tentang Layanan Dukungan Psikososial (LDP) pada petugas bencana (TAGANA)	
			Sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan kelanjutan program pascabencana	6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
					Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah karang taruna dan PSM yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	40 orang	40 orang			
					Pembinaan Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang dibina untuk mewakili Kota Mataram dalam penilaian karang taruna berprestasi	3 karang taruna	3 karang taruna			
					Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah kasus yang ditangani LK3	60 kasus	65 kasus			
					Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Jumlah LKS yang dilakukan pembinaan	50 LKS	50 LKS			
			Sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana						
					Pelatihan	Jumlah satuan	35 orang	35 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			lintas sektor dan kelanjutan program pascabencana		teknik penanggulangan bencana alam dan pengungsi bagi satuan linmas	petugas bencana yang mendapatkan pelatihan teknik			program verifikasi dan validasi data PBI JK ● Belum maksimalnya pendataan oleh petugas verifikasi dan validasi data PBI-JK	dan simulasi LDP ● Memaksimalkan ruangan yang ada sebagai sekretariat UPKH, maupun sarana lainnya dan mengusulkan kembali anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang sekretariat UPKH ● Memaksimalkan ruangan yang ada sebagai sekretariat UPKH, maupun sarana lainnya dan mengusulkan kembali anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang sekretariat UPKH ● Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Bank BRI Pusat dan Cabang mataram, Dinas Sosial Provinsi, Koordinator Wilayah, Koordinator Regional, Kementerian Sosial RI. ● Memberikan ruang dan tempat kepada veteran, janda veteran dan janda pahlawan (perintis kemerdekaan) untuk sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan	
			Sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan kelanjutan program pascabencana	8	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial						
					Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah penerima PKH yang terlayani dalam program PKH	18.177 KK	18.505 KK			
					Penguatan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Jumlah janda pahlawan, veteran dan janda veteran yang mendapatkan bantuan	40 orang	40 orang			
					Peningkatan Corporate Social Responcibility (CSR) .	Jumlah badan usaha yang ikut dalam penyelengaraan CSR	40 perusahaan	- perusahaan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
										● Segera dibentuk Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (LPTSP) ● Mensosialisasikan peranan penting pendamping program keserasian sosial dalam membantu pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial ● Dibuatkan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan keserasian sosial ditegah-tengah masyarakat di lingkungan rawan konflik ● Melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan baik di Lembaga Pendidikan Formal Lembaga Kursus dan lembaga pelatihan agar memiliki skill yang akan menunjang kehidupannya ● Memberikan motivasi dan informasi kepada keluarga maupun masyarakat, untuk	
			Sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan kelanjutan program pascabencana	9	Program Rehabilitasi Sosial						
					Peningkatan Program Keserasian Sosial	Jumlah laporan daerah rawan konflik yang dilakukan pembinaan	12 laporan	12 laporan			
			Sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan kelanjutan program pascabencana	10	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika						
					Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika	Jumlah penyandang disabilitas dan korban NAPZA yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan	182 orang	182 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			Komitmen pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 1	Program Jaminan Sosial Keluarga					memberikan kesempatan yang sama seperti manusia normal lainnya. ● Mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan dilanjutkan dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, agar keluarga dan masyarakat mengetahui dan memahami hak-hak penyandang disabilitas ● Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengusulkan kembali anggaran untuk sarana dan prasarana yang	
					Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)	Jumlah PBI JKN yang terverifikasi dan tervalidasi	152.769 jiwa	156.288 jiwa			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
										dibutuhkan ● Melakukan Bimtek bagi petugas verivali data PBI-JK	

3.3 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.5
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaja Kerja	Perluasan akses informasi lapangan pekerjaan	1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				• Tingkat pendidikan dan keterampilan belum optimal dan belum adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas	• Perlu ditingkatkannya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran	
				Penyelesaian procedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial.		12 kasus	12 kasus			
				Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.		150 Perusahaan	150 Perusahaan			
				Syarat Kerja		150 Perusahaan	150 Perusahaan			
			Peningkatan keterampilan wirausaha produktif	2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas						
				Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja		64 orang	32 orang			
				Pengembangan Bintek		96 orang	32 orang			
2	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan	Peningkatan kualitas	1 Program Penguatan Kelembagaan PUG				• Belum Optimalnya kegiatan	• Koordinasi Pokja PUG Kota Mataram	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	dan Perlindungan Anak	Perempuan dan Perlindungan Anak Kota	layanan kesehatan ibu dan anak	dan Anak				Perangkat Daerah yang responsif gender ● Belum optimalnya pemenuhan kreativitas anak ● Belum optimalnya SDM yang menangani pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak yang terlapor ● Masih minimnya sumbangan pendapatan perempuan terhadap keluarga ● Belum optimalnya data terpilah gender	● Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada 39 OPD ● Koordinasi Gugus Tugas KLA ● Fasilitasi penguatan forum anak kelurahan dan kecamatan dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan kelurapemenuhan hak anak sebagaimana 5 kluster KLA agar dapat diakomodir ● Bekerjasama dengan jejaring terkait seperti LPA, Tenaga Ahlki (Psikolog),Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan, Bagian hukum, KUA ,Kepala Lingkungan dan unit PPPA Polres Mataram ● Melanjutkan program strategis DP3A terutama kegiatan pemberdayaan ekonomi	
				Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan	SosialisasiPeningkatan Peran Perempuandalam bidangpolitik dan jabatan publik	50 orang	0			
				Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	PendampinganPPRGpada OPD (Dokumen GAP)	39 OPD	39 OPD (100%)			
				Peningkatankapasitasdanjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dan anak	Pelatihan Manajemen Usaha dalam Rangka Temu Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	30 orang	0			
				Evaluasi Pelaksanaan PUG	PendampinganPPRGpada OPD (Dokumen GBS)	39 OPD	39 OPD (100%)			
				Pengembangan SistimInformasi	Dokumen DataGender	4 Dokumen	4 Dokumen (100%)			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Gender dan Anak	dan Anak yang tersususun				perempuan korban KDRT dan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Rentan Ekonomi	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	LaporanMonev Dinasyang tersusun	1 laporan	1 laporan (100%)			
				Rakor PokjaPUG	Laporan PokjaPUG yang tersusun	1 laporan Pokja	1 laporan Pokja (100%)			
				Sosialisasi yang terkaitkesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan	SosialisasiKesetaraangender dan PUG Parenting keluarga dan Workshop ketahanan keluarga	30 orang	0			
				2 Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gener dalam pembangunan						
				Upaya Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	25 organisasi	25 organisasi (100%)			
				3 Program Pengarusutam aan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Hak Anak (PHA)						
				Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Peningkatan pemahaman SDM yangmenangani PHA melalui Pertemuan tim gugus tugas KLA	75 orang	75 orang (100%)			
				Media KIE dan KLA	Peningkatan kapasitas Lembaga yang berperan dalam pemenuhan Hak Anak	1 lembaga (LPA)	1 lembaga (LPA)			
				Evaluasi KLA	Evaluasi laporan KLA	1 laporan	1 laporan			
				Peranan Dunia usaha dalam rangka KLA	Laporan forum dunia usaha yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan			
				Pemetaan potensi organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatandalam pemberdayaan perempuan dan anak	Peningakatan KualitasData potensi organisasidanlembaga masyarakat	0 laporan	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				ForumAnak/ Konggress Anak/HAN	Peningkatan kapasitas anggota forumanak melalui pembinaan	210 orang	210 orang (100%)			
				4 Program Peningkatan KualitasHidup dan Perlindungan Perempuan						
				Penyusunan SistemPerlindungan bagi Perempuandan Anak	Penguatan Satgas PP dan PA, dan pelaporan SIMEP (Sistim Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan) Penyelenggaraan Perlindungan Anak	234 Orang / 1 Laporan	234 Orang / 1 Laporan			
				SosialisasiSistem Pencatatandan pelaporan KDRT	Pelaporan pada SiPPAMAN (Sistim Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Mataram)	1 Laporan	1 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Penanganan, Mediasi dan Pendampingan Kasus Perempuan dan Anak	100 %	100 %			
				Monitoring, evaluasidan pelaporan	Laporan Simponi	1laporan	1laporan (100%)			
				Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	Pemberdayaanekonomi kepada Perempuankorban KDRTdanPerempuan kepalaKeluarga(Pekka)	20 orang	20 orang (100%)			
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Pengembangan pekarangan untuk pengembangan pangan	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan				● Kurangnya ASN yang menguasai tehnis dibidangnya. ● Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penganekaragaman pangan yang berkaidah B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). ● Masih kurangnya	● Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan dengan OPD terkait ● Mengusulkan penambah ASN yang menguasai tehnis dibidangnya ● Sosialisasi atau pelatihan lebih lanjut tentang pangan yang berkaidah B2SA	
				Pemantauan Daerah Rawan Pangan	Jumlah dokumen Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi tang tersusun	12 laporan	12 laporan			
				Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang	Dokumen Neraca Bahan Makanan	Dokumen Neraca Bahan Makanan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
					tersusun			kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan lahan pekarangan rumah secara konsisten dan berkesinambungan. ● TIdak opimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai fungsi kondinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait ● Kurangnya data yang akurat mengenai ketahanan pangan. ● Kurangnya anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan secara optimal ● Ada bebarapa kegiatan yang tidak mencapai target karena terkena refocusing untuk penanganan covid 19	● Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan pemanfaatan pekarangan dan pengolahan hasil pekarangan serta melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang telah dibentuk. ● Peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan harus ditingkatkan kembali ● Koordinasi dan sinkronisasi antar bidang harus ditingkatkan	
				Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	- Jumlah bibit tanaman sayur dan bibit obat di 6 kecamatan seKota Mataram	Bibit sayuran 450 polibag, bibit obat 180 polibag	Bibit sayuran 450 polibag, bibit obat 180 polibag			
					-Jumlah bibit sayur dan media/alat tanam ke 5 (lima) kelompok pekarangan	Bibit cabe 500 polibag, bibit terong 375 polibag, bibit jeruk nipis 60 polibag, bibit cabe bentuk sosis 6 box, media tanam 6.750 kg, polybag 20 kg, gembor 20 buah	Bibit cabe 500 polibag, bibit terong 375 polibag, bibit jeruk nipis 60 polibag, bibit cabe bentuk sosis 6 box, media tanam 6.750 kg, polybag 20 kg, gembor 20 buah			
					- Jumlah bibit tanaman sayur pada 3 kelompok pekarangan	Bibit cabe 150 polibag, bibit terong 50 polibag, bibit jahe 58 polibag, bibit sereh 33 polibag	Bibit cabe 150 polibag, bibit terong 50 polibag, bibit jahe 58 polibag, bibit sereh 33			
					- Lomba Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep	4 kelompok	4 kelompok			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
					KRPL Tk. Kota Mataram					
				Prognosa Ketersediaan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Prognosa Ketersediaan Ketahanan Pangan	12 dokumen	12 dokumen			
				Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas ketrampilan pengurus lumbung pangan masyarakat	25 orang	0 (refocusing)			
				Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	- data dan informasi harga pangan pokok	2 pasar tradisional (Pasar Mandalika dan Pasar Kebon Roek)	2 pasar tradisional (Pasar Mandalika dan Pasar Kebon Roek)			
					- Analisa data harga pasar	12 buku	6 buku			
					- Jasa konsultansi analisa sistem distribusi pangan pokok	1 dokumen	0 (refocusing)			
				Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	- Tersedianya cadangan pangan pokok (beras) pada gudang	10000 kg	10000 kg			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						pemerintah					
						- Bahan kimia sprying untuk gudang cadangan pangan pemerintah	1 paket	1 paket			
						- Obat fumigasi gudang cadangan pangan	1 paket	1 paket			
					Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah desa Mandiri pangan yang dibina/monev	11 LKK di 6 kecamatan	11 LKK di 6 kecamatan			
			Pembentukan dan pembinaan kelompok KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	2	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan						
					Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Makanan	Jumlah dokumen Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Makanan	1 dokumen	1 dokumen			
					Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Gizi	Mengikuti pameran Hari Pangan Sedunia Tk. Prov. NTB di Desa Nyiur Lembang Kabupaten Lombok Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
					Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Penyuluhan Sumber Pangan	5 Sekolah Dasar (750 orang	5 Sekolah Dasar (750 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						Alternatif yang aman (B2SA)	siswa)	siswa)			
					Pengembangan Perlindungan Konsumen atas Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	6 Sampel pangan segar asal tumbuh	3 sampel pangan segar asal tumbuh (sisanya recofussing)			
4	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Evaluasi manajemen penanganan sampah perkotaan	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				) Kurang optimalnya pemeliharaan kendaraan karena adanya refocusing anggaran untuk Penanganan Covid) Pengurangan anggaran BBM untuk operasional alat berat berdampak pada kurang maksimalnya kinerja operasional alat berat) Terbatasnya akses Kendaraan operasional penyedotan tinja yang dimiliki, yaitu tidak dapat memasuki gang-	) Mengupayakan penambahan anggaran pemeliharaan pada TA. 2021) Mengusulkan penambahan alat berat pada TA. 2021) Upaya mengusulkan Pengadaan kendaraan operasional penyedot tinja yang memiliki kapasitas kecil sehingga bisa memasuki gang di kota Mataram) Perbaikan kendaraan yang	
					Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang dipelihara	99 Unit kendaraan	99 Unit kendaraan			
					Pelayanan Pengangkutan Sampah	Jumlah liter BBM kendaraan operasional pengangkutan sampah	912,360 liter	912,360 liter			
					Pelayanan Limbah Domestik (limbah cair domestik)	Jumlah SR dan/atau usaha kegiatan terlayanai	650 pelanggan	514 pelanggan			
					Pengelolaan Pengangkutan Sampah	Jumlah peralatan kebersihan tersedia	6.144 buah	6.144 buah			
			) Evaluasi manajemen	2	Program Pengendalian Pencemaran dan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
			penanganan sampah perkotaan) pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah)	Kerusakan Lingkungan Hidup				gang kecil)Kondisi kendaraan operasional ada yang rusak berat)Sulitnya mengontrol kondisi dan pemakaian peralatan kebersihan di lapangan)Terbatasnya volume kegiatan pengawasan, tidak memenuhi rencana awal karena pengalihan anggaran untuk penanganan Covid)Terbatasnya jenis pengujian laboaaturium yang dapat dilaksanakan karena jumlah dan jenis bahan kimia yang sangat terbatas akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid	rusak berat)Memaksimalkan tugas dan fungsi pengawas, mandor dan Satgas Kebersihan)Meningkatkan tertib administrasi pencatatan dan pendistribusian peralatan kebersihan yang habis pakai (antara lain sapu lidi, keranjang bambu, troli plastik, jaring plastik, karung plastik))Mengusulkan dan menyusun kegiatan pengawasan yang lebih efisien pada TA 2021)Mengupayakan penambahan jumlah dan jenis bahan kimia lab. Melalui perencanaan penganggaran TA	
				Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan	1 Laporan/ Dokumen Pemantauan	1 Laporan/ Dokumen Pemantauan			
				Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pengawasan	1 Laporan	1 Laporan			
				Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	informasi hasil pengujian kualitas air permukaan, air laut dan udara	1 Laporan hasil uji kualitas air dan udara lingkungan	1 Laporan hasil uji kualitas air dan udara lingkungan			
				Pemantauan dan PengendalianLimbah dan Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau	2 usaha	0 usaha			
			Evaluasi manajemen penanganan sampah perkotaan	3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						
				Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan SumberSumber Air	Jumlah Daerah Tangkapan Air dan Mata Air yang terlindungi	1 mata air	0 paket			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup (KLHS dan DD DT) tersusun	6 Dokumen	3 Dokumen (KLHS RPJMD, DIKPLHD, DD DT)			
				Pengkajian Dokumen Lingkungan	Usaha/kegiatan yang mengajukan	7 IPLC dan TPS B3	7 IPLC dan TPS B3			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						rokemendasi IPLC dan TPS B3			• Kegiatan pemantauan dan pengendalian limbah usaha/ kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid • Tidak ada anggaran karena dialihkan untuk Penanganan Covid • Belum siapnya Perencanaan RDTR dari Dinas PUPR • Pengajuan permohonan rekomendasi IPLC dan TPS B3 hanya 7 usaha / kegiatan • Tidak dapat dilaksanakan karena refocusing untuk penanganan Covid, dan tidak	2021 • Penganggaran ulang pada TA 2021 • Pelatihan tenaga analis Lab. Lingkungan sehingga meningkatkan kompetensi dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi Lab. DLH • Menyusun rencana kegiatan dan mengajukan usulan ulang pada TA 2021 • Mendorong PUPR untuk menyiapkan RDTR • Meningkatkan pelayanan terkait pengurusan permohonan rekomendasi IPLC dan TPS B3 dari usaha/ kegiatan	
					Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (BAS)	Jumlah Kegiatan Hari Bumi Dan air yang Terlaksana	1 kgt	0 kgt			
			Evaluasi manajemen penanganan sampah perkotaan	4	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup						
					Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan yang terselesaikan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	8 Pengaduan	8 Pengaduan			
					Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	umlah kegiatan sosialisasi Perda/Perwal terkait LH yang dilaksanakan Jumlah Raperda tersusun	1 perda dan 1 perwal	0 kegiatan 1 Raperda			
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pendampingan	2 kegiatan	2 kegiatan			
					Penilaian dan Penghargaan	Jumlah sekolah/lembaga dan	2 sekolah	2 sekolah			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Pengelolaan Lingkungan Hidup	lingkungan yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			diijinkan mengumpulkan massa Keterbasan sumber daya dan anggaran mengingat kondisi Pandemi Covid 19 Keterbasan sumber daya dan anggaran mengingat kondisi Pandemi Covid 19 Keterbatasan SDM dan dukungan dari OPD terkait Keterbatasan SDM dan dukungan dari OPD terkait	Merencanakan kegiatan dimaksud pada TA 2021 Melibatkan SD yang tersedia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga seluruh pengaduan dapat ditinjaklanjuti Mengupayakan kegiatan Sosialisasi pada TA 2021 Mengupayakan dan memotivasi semua pihak untuk Meminimalisir pelanggaran pembuangan limbah cair ke badan air atau saluran dengan dengan mendorong segera disyahkannya RAPERDA tentang Air Limbah. Ikut berperan dalam Pembahasan Raperwal Kelembagaan Pengelolaan Air	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
									Limbah)Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi serta pembinaan terhadap sekolah-sekolah dan lingkungan	
5	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Optimalisasi sistem administrasi kependudukan dan Capil	1 Program Pendaftaran dan Penataan Administrasi Kependudukan				)Sangat dibutuhkan alat transportasi khusus / mobile pelayanan roda 2 guna mendukung kegiatan perekaman bagi penduduk lansia, sakit, penyandang disabilitas (rentan untuk dapat melakukan perekaman secara langsung) terutama di wilayah pemukiman yang tidak dapat dijangkau mobil pelayanan)Semakin bertambahnya jumlah dokumen kependudukan yang telah diterbitkan belum dambil oleh	)Melakukan pelayanan perekaman KTP-el secara jemput bola menggunakan sarana kendaraan mobil pelayanan pada titik lokasi yang terdekat dengan lingkungan pemukiman penduduk)Melakukan pengantaran dokumen kependudukan yang telah diterbitkan secara langsung kepada masyarakat melalui koordinasi dgn kepala lingkungan setempat)Memberdayakan fasilitas sarana pendukung pelayanan yang	
				Identitas Penduduk	Terwujudnya penataan administrasi kependudukan	1 Sistem pelayanan kependudukan terintegrasi	1 Sistem pelayanan kependudukan terintegrasi			
				Pindah Datang	Terlaksananya kegiatan penataan administrasi pindah datang	1 jenis surat pindah datang kependudukan yg diterbitkan	1 jenis surat pindah datang kependudukan yg diterbitkan			
				Pendataan Penduduk	Terlaksananya kegiatan administrasi pendataan kependudukan	1 laporan data Kependudukan	1 laporan data Kependudukan			
				Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)	Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan	Pelayanan dokumen kependudukan di 6 kecamatan se-Kota Mataram	Pelayanan dokumen kependudukan di 6 kecamatan se-Kota Mataram			
				Penerbitan	Terbitnya	4 jenis	4 jenis			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK)	dokumen identitas kependudukan	dokumen kependudukan	dokumen kependudukan	masyarakat di Dinas Dukcapil Sarana pendukung yang memadai untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat masih kurang Sangat dibutuhkannya sarana pendukung untuk kegiatan pelayanan secara online melalui pembuatan program aplikasi khusus yg dapat diakses dg phone seluler bg seluruh masyarakat di Kota Mataram Jangkauan Pelayanan untuk lansia dan orang sakit yang tinggal di dalam gang atau yang tidak bias diakses oleh mobil pelayanan Pemanfaatan dokumen identitas anak (KIA) Sarpras pendukung	masih dapat dipergunakan Guna mencegah penyebaran dan dalam rangka memutus mata rantai wabah covid-19, maka strategi pelayanan kepada masyarakat beralih dg memanfaatkan metode pelayanan secara online melalui jasa media jejaring sosial / whatsapp Dibutuhkan akomodasi sejenis sepeda motor dengan peralatan yang lengkap untuk menjangkau pelayanan yang aksesnya terbatas Menjalin kerjasama atau MoU dengan pihak ke-3 atau pengusaha yang berada di Kota Mataram untuk pemanfaatan dokumen identitas anak Memberdayakan fasilitas sarana	
				2 Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data						
				Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Terlaksananya kegiatan SIAK secara terpadu	1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			
				Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Tersedianya SDM yang berkualitas	20 org peserta yg mengikuti Bintek kependudukan dan capil	20 org peserta yg mengikuti Bintek kependudukan dan capil			
				Pengembangan Data Base Kependudukan	Tersedianya database kependudukan yang akurat	1 Jaringan Database kependudukan yang akurat	1 Jaringan Database kependudukan yang akurat			
				Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Tersedianya informasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 Website kependudukan dan capil	1 Website kependudukan dan capil			
				Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan	Terciptanya kesadaran masyarakat akan tertib	100 org peserta sosialisasi kebijakan	100 org peserta sosialisasi kebijakan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Administrasi Kependudukan (DAK)	adm kependudukan	kependudukan	kependudukan	pelayanan masih kurang Volume bimtek masih kurang Digitalisasi arsip volumenya masih kurang SDM pengelola masih kurang Tidak terlaksananya Sosialisasi tatap muka dengan masyarakat yang dikarenakan Pandemi Covid-19 Belum terpenuhnya koneksi hak akses pemanfaatan data kependudukan di instansi yang telah melaksanakan perjanjian Kerjasama Perlu adanya pembuatan website untuk menampilkan laporan agregat data kependudukan Minimnya data dan informasi dari	pendukung pelayanan yang masih dapat dipergunakan Mengumpulkan beberapa rangkaian jadwal penyampaian materi khusus terkait teknis operasinal pelayanan dalam satu waktu pertemuan / pelatihan terpadu yang bertempat di lingkungan kantor Memanfaatkan penggunaan media pengembangan aplikasi digitalisasi kerjasama dengan Dinas Kominfo Memberdayakan dan melatih tenaga SDM yang sudah ada agar lebih handal dan terampil Karena adanya pandemic Covid-19 pelaksanaan sosialisasi secara offline dialihkan menjadi sosialisasi online	
				Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK)	Terwujudnya kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan dengan berbagai lintas sektoral	27 mitra kerjasama yg terdiri dari instansi, badan / lembaga pemerintah lainnya, perusahaan swasta yang diikat dalam perjanjian kerjasama	27 mitra kerjasama yg terdiri dari instansi, badan / lembaga pemerintah lainnya, perusahaan swasta yang diikat dalam perjanjian kerjasama			
				Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terwujudnya tertib adm kependudukan	3 jenis Laporan Data kependudukan	3 jenis Laporan Data kependudukan			
				Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Terlaksanaanya penyusunan profil OPD	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen			
				3 Program Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Penting						
				Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	Tersedianya pelayanan akta perkawinan dan perceraian	2 jenis akta yg diterbitkan	2 jenis akta yg diterbitkan			
				Pelayanan Akta	Tertibnya	1 jenis akta	1 jenis akta			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Kelahiran	dokumen pencatatan sipil	yg diterbitkan	yg diterbitkan	instansi terkait yang berhubungan dengan penyusunan profil perkembangan kependudukan Sangat Dibutuhkan prasarana tempat / gedung penyimpanan arsip dokumen capil yang luas dan memadai (The main problem 4 tahun berturut - turut hingga sekarang Masih ada pasangan yang belum memiliki akta perkawinan Sosialisasi masih kurang Masih ada masyarakat khususnya yang berusia 18th kebawah yang belum memiliki akta kelahiran Sapras yang masih kurang Sangat dibutuhkan prasarana tempat /	Melaksanakan DMM (Dukcapil Menyapa Masyarakat) secara online Memperbaiki / Menyesuaikan Perjanjian Kerjasama (PKS) sesuai Kemendagri 102 tahun 2019 Memanfaatkan medsos seperti WhatsApp bagi yang membutuhkan agregat data kependudukan Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data dan informasi sebagai data dukung dalam melengkapi penyusunan profil perkembangan penduduk Memanfaatkan space ruangan kerja dan ruang pelayanan yang masih dapat dipergunakan untuk menampung	
				Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Tertibnya administrasi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	3 jenis akta yg diterbitkan dan 5 dokumen (Caping perubahan Akta Capil, Caping Pengakuan Anak, Caping Pengesahan Anak, Caping Pengangkatan Anak, Caping Perubahan Status Kewarganegaraan)	3 jenis akta yg diterbitkan dan 5 dokumen (Caping perubahan Akta Capil, Caping Pengakuan Anak, Caping Pengesahan Anak, Caping Pengangkatan Anak, Caping Perubahan Status Kewarganegaraan)			
				Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	Terwujudnya kordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
								gedung penyimpanan arsip dokumen capil yang luas dan memadai (The Main Problem 4 tahun berturut - turut hingga sekarang) Masih ada masyarakat yang belum melaporkan kematiannya Masih ada masyarakat yang belum melaporkan kematiannya Sosialisasi yang masih kurang Anggaran masih kurang	berbagai dokumen capil / akta capil masyarakat se Kota Mataram Melakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama Penambahan volume sosialisasi Memanfaatkan space ruangan kerja dan ruang pelayanan yang masih dapat dipergunakan untuk menampung berbagai dokumen capil / akta capil masyarakat se Kota Mataram Melakukan pelayanan jemput bola (Mobile) Penambahan anggaran untuk Sapras Memanfaatkan space ruangan kerja dan ruang pelayanan yang masih dapat dipergunakan untuk menampung	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
										berbagai dokumen capil / akta capil masyarakat se Kota Mataram Penambahan volume sosialisasi Penambahan Anggaran	
6	Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Cakranegara	Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif				Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan Masih rendahnya cakupan penerbitan izin dan surat-suarat lainnya Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kepengurusan data kependudukan Masih rentan terjadi tindakan kekerasan sosial di masing masing lingkungan Masih rentan terjadi tindakan	Penguatan mekanisme partisipasi dan sosialisasi Melakukan pendataan ulang ke tiap-tiap kelurahan Melakukan kegiatan jemput bola dalam pelaksanaan pelayanan Pembentukan Tim Pemantau terkait persampahan di tingkat lingkungan dan kelurahan Memberikan himbauan secara persuasif dan melakukan koordinasi dengan instansi vertikal seperti TNI-POLRI dan Sat Pol. PP Kota Mataram Perlu dilakukan	
					Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan	Jumlah kelurahan yang terferivikasi	10 kelurahan	0 kelurahan			
			Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	2	Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik						
					Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan terhadap IKM Jlh fasilitas pelayanan sesuai standar dan terpenuhi	6 jenis pelayanan	6 jenis pelayanan			
			Optimalisasi sistem administrasi kependudukan dan Capil	3	Program Pengembangan Data dan Informasi						
					Pemutakhiran Data Kependudukan	Data Kependudukan Jlh Perekaman	1 jenis sistem pelayanan	1 jenis sistem pelayanan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						KTP KK dan cetak baru/perubahan data KK/Surat Ket.Pindah dilaksanakan serta Jlh Rekomendasi Kaling Aktif Kec dan SPT PBB terdistribusi			kekerasan sosial di masing masing lingkungan Masih terbatasnya kemampuan Kepala Lingkungan dalam pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat lingkungan Minimnya kemampuan staf di kelurahan dalam bidang penatausahaan administrasi Masih rendahnya modal usaha yang dimiliki UMKM yang tidak mampu bersaing dengan Retail Modern Belum terpadunya pembinaan kepemudaan dan keterlibatan organisasi pemuda dalam proses	koordinasi secara intensif baik dari Kelurahan dan Kecamatan perlu dilakukannya peningkatan kemampuan atau pelatihan terhadap staf kelurahan di bidang penatausahaan administrasi Meningkatkan bantuan bagi UMKM sehingga mampu bersaing secara finansial maupun permodalan Perlu dilakukan penguatan yang bersifat moderat serta sosialisasi terhadap suatu permasalahan atau isu yang sedang berkembang Melalui penguatan peran Organisasi kepemudaan di masyarakat maupun di sekolah	
			Evaluasi dan Penguatan Pokja LISAN	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan berbasis lingkungan						
					Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil	Jumlah Volume sampah terangkut per hari	5.000 m3	5.000 m3			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat	5	Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan						
					Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Konflik Tingkat Kecamatan	12 laporan	12 laporan			
			Peningkatan Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian	6	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
			dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan		Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan dan kepala lingkungan	Jumlah lembaga lingkungan yang terfasilitasi/berkinerja baik	73 kepala lingkungan	0 kepala lingkungan	pembangunan Masih banyaknya usulan masyarakat yang tidak terakomodir didalam pelaksanaan MPBM	dan di lingkungan Meningkatkan koordinasi dan jumlah pertemuan bersama organisasi kader dan Dinas teknis Diperlukan data dan kelengkapan seperti foto dan dokumen lainnya dalam pengajuan atau pengusulan dalam memberikan usulan MPBM	
					Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan administasi kelurahan	10 kelurahan	10 kelurahan			
					Pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat	Jumlah UMKM yang terferivikasi	50 UMKM	50 UMKM			
					Pelaksanaan kegiatan keagamaan	Jumlah kegiata keagamaan yang terlaksana	4 kegiatan	4 kegiatan			
					Pemberdayaan Organisasi Pemuda dan Olahraga Tingkat Kelurahan	Jumlah pemuda yang terbina dengan baik	20 kelompok	0 kelompok			
					Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan Kader Tingkat Kelurahan	Jumlah kader di kelurahan yang terbina dengan baik	20 kelompok	20 kelompok			
					Pelaksanaan MPBM	Jumlah usulan masyarakat yang terverifikasi	100 usulan	100 usulan			
		Kecamatan Sandubaya	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1	Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan				Masih rentannya terjadi tindak kriminalitas dan konflik di	Memberikan himbauan secara persuasif atau sosialisasi untuk	
					Kegiatan	Jumlah	12 laporan	12 laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	laporan pemetaan potensi konflik tingkat kecamatan			lingkungan Masih lemahnya kemampuan kepala lingkungan dalam mengelola administrasi lingkungan Masih kurangnya kemampuan staf kelurahan dalam penatusahaan administrasi Kelurahan Masih kurangnya kemampuan UMKM dari segi permodalan dan pengetahuan berusaha dibanding dengan retail modern Masih adanya kesenjangan/perbedaan pendapat dalam memandang suatu masalah di masyarakat yang dilihat dari segi keagamaan Masih kurangnya kesadaran pemuda di lingkugnan untuk	pencegahan dengan koordinasi dengan pihak yang berwajib di wilayah kerja Memberikan sosialisasi kepada kepala lingkungan dan melakukan koordinasi antara lingkungan, kelurahan dan kecamatan Perlu dilakukan pelatihan bagi staf Kelurahan dalam pentausahaan administrasi Memberikan sosialisasi bagi UMKM dan menambah bantuan permodalan dengan koordinasi dengan pihak terkait Perlu dilakukan pendekatan di masyarakat dengan koordinasi dengan pihak terkait (tokoh agama) Memberikan fasilitasi kegiatan kepemudaan di	
			Peningkatan Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan	2 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan						
				Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan dan kepala lingkungan	Jumlah laporan kepala lingkungan yang disampaikan	12 laporan	12 laporan			
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Adminstrasi Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang memiliki administasi pemerintahan berkriteria baik	7 kelurahan	7 Kel			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat	Jumlah UMKM yang terverifikasi	50 UMKM	50 UMKM (100%)			
				Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan terfasilitasi	3 Kegiatan	1 kegiatan (33,33)			
				Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Pemuda dan Olahraga Tingkat Kelruahan	Jumlah organisasi pemuda yang terfasilitasi kegiatannya.	7 karang taruna	7 karang taru			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
								na (100%)	aktif dalam pembangunan di wilayahnya Masih minimnya koordinasi di tingkat kader dan oranisasi perempuan lainnya Banyaknya usulan masyarakat yang tidak dapat diakomodir di MPBM Masih rendahnya kinerja petugas di Kelurahan karena kurangnya koordinasi antar petugas dan masyarakat Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus data kependudukan Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga Masih adanya jenis layanan yang kurang efektif bagi	lingkungan Meningkatkan koordinasi dengan melakukan pertemuan-pertemuan bagi kader Mengintensifkan data dukung bagi usulan masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara fasilitator kelurahan dan kecamatan dan pihak terkait Meningkatkan koordinasi antar petugas kelurahan dan masyarakat Membrikan sosialisasi akan pentingnya data kependudukan Memberikan sosialisasi/pelatihan pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan. Meningkatkan koordinasi kecamatan dan kelurahan dalam	
					Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan Kader Tingkat kelruahan	Jumlah organisasi perempuan /kader yang terfasilitasi kegiatannya	2 organisasi perempuan	2 organisasi perempuan (100%)			
					Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Pelaksanaan MPBM yang terlaksana	3 kegiatan	3 Kegiatan (100%)			
			Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	3	Program peningkatan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif						
					Evaluasi kinerja pemerintah kelurahan	Jumlah Kelurahan yang berkinerja baik dan terseleksi	1 Kelurahan	0 Kelurahan (0%)			
			Optimalisasi sistem administrasi kependudukan dan Capil	4	Program Pengembangan data dan informasi						
					Kegiatan pemuktahiran data kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan yang dimutakhirkan	1 laporan	1 laporan (100%)			
			Evaluasi dan Penguatan Pokja LISAN	5	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Berbasis Lingkungan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
					Kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah permukiman nihil	Volume sampah terangkut perhari	3 rit/ hari angkut roda 3	3 rit/hari angkut roda 3 (100%)	masyarakat karena kurangnya koordinasi antara kelurahan dan kecamatan	hal layanan terpadu	
		Kecamatan Mataram	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan				⟩Kurangnya modal pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ⟩Rute pelaksanaan Takbiran masih gabung dengan kecamatan lain se Kota Mataram ⟩Tertundanya pembinaan kepada kelompok karang taruna karena adanya pengalihan anggaran BTT dan pengurangan anggaran ⟩Tertundanya Sosialisasi Kader karena adanya pengalihan anggaran BTT dan pengurangan anggaran ⟩Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kelurahan dan Kecamatan	⟩Pemberian modal usaha kepada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah ⟩Pembagian rute pelaksanaan Takbiran per Kecamatan ⟩Pelaksanaan pembinaan tetap dilaksanakan ⟩Pelaksanaan Sosialisasi tetap dilaksanakan ⟩Pembinaan meningkatkan kwalitas SDM ⟩Pelaksanaan pelayanan secara online ⟩Pelaksanaan pembinaan pendataan kependudukan di tingkat kelurahan ⟩Pembinaan SDM lingkungan tentang pelaporan-pelaporan kegiatan	
					Pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat	Jumlah UMKM yang terdata	100 Kelompok	100 Kelompok			
					Pelaksanaan Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan terfasilitasi (minimal STQ, Takbiran, Ogoh2)	2 kegiatan	2 kegiatan			
					Pembinaan pemuda dan olahraga	Jumlah organisasi pemuda/karang taruna yang terfasilitasi kegiatannya	9 kelompok karang taruna	9 kelompok karang taruna			
					Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan	Organisasi Perempuan/kader yang terfasilitasi kegiatannya	9 organisasi perempuan	9 organisasi perempuan			
			Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	2	Program Peningkatan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
					Evaluasi kinerja pemerintah kelurahan	Jumlah kelurahan yang telah terverifikasi	9 kelurahan	9 kelurahan	) Pelayanan administrasi kepada masyarakat kurang tepat waktu) Kurangnya telitinya masyarakat masalah kelengkapan persyaratan pengurusan) Kurang disiplin pendataan penduduk di kelurahan) kurang SDM ditingkat lingkungan tentang pemahaman membuat pelaporan) Jam tutup depo pembuangan sampah yang menghambat pembuangan sampah operator R3 persampahan) Kurangnya sosialisasi kepada tokoh-tokoh	) Penambaahan operasional R3 dilingkungan karena 1 lingkungan hanya ada 1 kendaraan R3) Pelaksanaan melalui musyawarah dan mufakat baik tingkat kecamatan, kelurahan maupun tingkat lingkungan	
			Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	3	Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik						
					Peningkatan standar pelayanan Kecamatan	Jumlah layanan di Kecamatan yang terpenuhi	3 layanan	3 layanan			
			Optimalisasi sistem administrasi kependudukan dan Capil	4	Program Pengembangan Data/Informasi						
					Pemutakhiran data kependudukan	Laporan data kependudukan	1 laporan	1 laporan			
			Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	5	Program Pembinaan Pemerintah Kelurahan						
					Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan dan kepala lingkungan	Jumlah laporan kepala lingkungan yang disampaikan	12 laporan	12 Laporan			
			Evaluasi dan Penguatan Pokja LISAN	6	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan						
					Pengelolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil	Volume sampah yang terangkut	165 m3/hari	165 m3/hari			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
									masyarakat dan masyarakat pada umumnya tentang pentingnya kenyamanan dan keamanan		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat	7	Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan						
					Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya laporan pemetaan potensi konflik tingkat kecamatan	12 laporan	12 laporan			
		Kecamatan Selaparang	Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						
					Peningkatan Standar pelayanan Kecamatan	Terlaksananya peningkatan standar pelayanan kecamatan	6 layanan	6 layanan			
			Optimalisasi sistem administrasi kependudukan dan Capil	2	Program Pengembangan Data dan Informasi						
					Inventarisasi data pemerintahan	Terlaksananya inventarisasi data pemerintahan	12 laporan	12 laporan			
			Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	3	Program Pembinaan pemerintah kelurahan						
					Peningkatan	Terlaksanan	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
					Kapasitas kelembagaan lingkungan dan kepala lingkungan	ya Peningkatan Kapasitas kelembagaan lingkungan dan kepala lingkungan					
					Pembinaan administrasi pemerintah kelurahan	Terlaksanaya Pembinaan administrasi pemerintah kelurahan	100%	100%			
			Evaluasi dan Penguatan Pokja LISAN	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan berbasis lingkungan						
					Kegiatan Pengelolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil	Terlaksanaya Pengelolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil	75%	75%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat	5	Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan						
					Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terlaksanaya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12 laporan	12 laporan			
			Peningkatan Partisipasi	6	Program Peningkatan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
			Masyarakat	Kapasitas Pemerintahan kelurahan						
				Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat	Terlaksanaanya Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat	75%	75%			
				Pelaksanaan kegiatan keagamaan	Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan keagamaan	3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan			
				Pemberdayaan organisasi perempuan dan kader tingkat kelurahan	Terlaksanaanya Pemberdayaan organisasi perempuan dan kader tingkat kelurahan	61 kader	61 kader			
				Pelaksanaan MPBM	Terwujudnya pelaksanaan MPBM	25%	25%			
		Kecamatan Ampenan	Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif				Tidak diadakannya Lomba Kelurahan Tk. Kecamatan Ampenan yang biasa terlaksana karena adanya bencana Non Alam yaitu COVID -19 yang melarang kegiatan berkumpul dan anggaran juga	Pelaksanaan beberapa kegiatan yang tertunda pada tahun 2020 sebagai dampak refokusing anggaran dan penerapan protokol covid 19 seperti lomba kelurahan, pemberdayaan UMKM, pemutakhiran data kependudukan,	
				Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan	Jumlah Lomba Kelurahan Tk. Kecamatan Ampenan yang terlaksana	1 Kegiatan	0 Kegiatan			
			Efisiensi dan	2 Program						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
			efektifitas pelayanan publik	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik				kena refocusing untuk penanggulanan bencana tersebut)Walaupun masih masa pandemi Covid -19 kebutuhan pelayanan oleh warga masyarakat tetap ada, jadi untuk pelayanan tetap ada walaupun mengikuti protokol kesehatan)Refocusing anggaran untuk kegiatan pemutakhiran data kependudukan namun dokumen tetep bisa tersusun dengan anggaran seadanya)Adanya refocucing dan perubahan anggaran menyebabkan belum optimalnya capaian kinerja beberapa kegiatan)Karena bencana Non Alam Covid -	kegiatan keagamaan, pelayanan publik Tetap bisa dilaksanakan di tahun 2021 bila keadaan sudah aman, dan nyaman	
				Kegiatan Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan	Jumlah pelayanan kelurahan terpadu berbasis apikatif yang diterapkan	4 Jenis Pelayanan	4 Jenis Pelayanan			
			Optimalisasi sistem administrasi kependudukan dan Capil	3 Program Pengembangan Data Informasi						
				Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang terlaksana (Pemutkhiran Data Kependudukan)	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Peningkatan Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan	4 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan						
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	Jumlah kelurahan dengan kapasitas kelurahan yang mengalami peningkatan	10 Kelurahan	10 Kelurahan			
				Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS)	Jumlah kelurahan dengan kegiatan Peningkatan	10 Kelurahan	10 Kelurahan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Masyarakat Kelurahan Masyarakat Kelurahan	sarana dan prasarana (Sarpras) masyarakat kelurahan			19 terjadi pengurangan / refocusing anggaran, dan Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat juga kena refocusing sehingga tidak bisa dilaksanakan kegiatan di maksud)Karena bencana Non Alam Covid - 19 terjadi pengurangan / refocusing anggaran, dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan juga kena refocusing sehingga tidak bisa dilaksanakan kegiatan MTQ)Karena merupakan kegiatan yang vital, walaupun terjadi Refocusing, untuk kegiatan		
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Kelurahan	10 Kelurahan			
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	10 Kelurahan	10 Kelurahan			
				Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (APBD)	Jumlah kelurahan dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Kelurahan	10 Kelurahan			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD)	Jumlah kelurahan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	10 Kelurahan	10 Kelurahan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						kelurahan			Pelaksanaan MPBM tetap dilaksanakan		
			Evaluasi dan Penguatan Pokja LISAN	5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan						
					Kegiatan Pengelolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil	Jumlah Lingkungan yang Mengikuti Pelatihan Mengenai Pengelolaan Persampahan	55 Lingkungan	0 Lingkungan			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat	6	Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan						
					Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemetaan potensi konflik tingkat Kecamatan dan Jumlah konflik sosial yang dilaporkan	1 Laporan	1 Laporan			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat	7	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan						
					Peningkatan kapasitas kelembagaan	Jumlah kelurahan yang	10 Kelurahan	10 Kelurahan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				lingkungan dan kepala lingkungan	memiliki administrasi pemerintahan berkriteria baik					
				Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan administasi kelurahan	10 kelurahan	10 kelurahan			
				Pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat	Jumlah UMKM yang Terverifikasi	50 Kelompok Usaha	0 Kelompok Usaha			
				Pelaksanaan kegiatan keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Berjalan Baik (STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan)	2 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Pemberdayaan Organisasi Perempuan dan Kader Tingkat Kelurahan	Jumlah Kader PKK yang terfasilitasi kegiatannya (Organisasi Wanita dan Jambore Kader PKK)	50 Kader PKK	50 Kader PKK			
				Pelaksanaan MPBM	Jumlah kegiatan MPBM Tk. Kecamatan yang terlaksana	3 Kegiatan	3 Kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						(MPBM Informasi, MPBM Perencanaan dan MPBM Pelaksanaan /Evaluasi)					
		Kecamatan Sekarbela	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan				Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga di tiadakan karena Rekopusing untuk dana Covid Masih terdapatnya Tindak kriminal di Kecamatan Sekarbela Motor Roda 3 untuk pengangutan sampah banyak yang bermasalah terutama di bak nya	Jumlah peserta yang dikurangi dan tetap menerapkan Protokol Covid 19 diaktifkannya Pos kamling dan Peningkatan Keamanan di Lingkungan Sekecamatan Sekarbela Tahun 2021 dianggarkan untuk pembelian bak Roda 3 yang ada di lingkungan	
					Kegiatan Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan (STQ dan Pawai Takbiran)	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
					Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah UMKM yang terbina	30 UMKM	30 UMKM			
					Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatannya.	…. Kelurahan	.... Kelurahan			
					Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kader	Jumlah Kader PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100 Orang	100 Orang			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat	2	Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
					Partisipasif						
					Kegiatan Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan MPBM Tk. Kecamatan yang terlaksana (MPBM Informasi MPBM Perencanaan dan MPBM Pelaksanaan /Evaluasi)	3 kegiatan (Informasi, Perencanaan, Evaluasi)	3 Kegiatan (Informasi, Perencanaan, Evaluasi)			
			Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	3	Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik						
					Kegiatan Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan	Jumlah pelayanan kelurahan terpadu berbasis apikatif yang diterapkan	… jenis Pelayanan	… Jenis Pelayanan			
			Optimalisasi sistem administrasi kependudukan dan Capil	4	Program Pengembangan Data/Informasi						
					Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Profil Kecamatan Yang Update dan Akurat	… Dokumen	… Dokumen			
			Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	5	Program Pembinaan Pemerintahan Kelurahan						
					Kegiatan	Jumlah	36	36			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan	lingkungan yang memiliki administrasi pemerintahan berkriteria baik	Lingkungan	Lingkungan			
					Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan	Jumlah kelurahan yang tertib administrasi	5. Kelurahan	5. Kelurahan			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat	6	Program Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						
					Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Konflik Tingkat Kecamatan	3. Laporan	3. Laporan			
			Evaluasi dan Penguatan Pokja LISAN	7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						
					Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil	Jumlah Lingkungan yang Mengikuti Pelatihan Mengenai Pengelolaan Persampahan	36 Lingkungan	36Lingkungan			
7	Pengendalian Penduduk dan	Dinas Pengendalian	Pencapaian target	1	Program Keluarga Berencana				Keterbatasan	Melakukan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
	Keluarga Berencana	Penduduk dan KB	program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi individu	Peningkatan jumlah peserta KB Baru dan KB Aktif	Baru = 85% Aktif = 62,4%	**Baru = 77,3% Aktif = 78,3%**	mobilitas penyuluh KB terkendala karena adanya Pandemi Covid 19 Keterbatasan intervensi ke Faskes karena tidak ada mekanisme Reward dan Punishment Refocusing anggaran menyebabkan program kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender,	koordinasi dan penyuluhan dengan sarana telephone dan teknologi komunikasi lainnya Memperkuat kerjasama dengan Faskes Melaksanakan pelayanan dengan SDM yang ada secara sukarela; Melakukan penyesuaian beberapa kegiatan sesuai juknis; Melakukan koordinasi secara personal dengan Lintas Sektor untuk optimalisasi pelaksanaan beberapa kegiatan. Penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Peningkatan Akses	
					Pembinaan Keluarga Berencana	Terselenggaranya kegiatan Rakornis	1 kali	-			
					Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Pendekatan akses pelayanan kepada masyarakat melalui mitra kerja	24 Kali	6 Kali			
					Lomba Institusi Masyarakat	Terselenggaranya Lomba Institusi Masyarakat	9 Lomba	-			
					Pembinaan Keluarga berencana (DAK)	Terpenuhinya sarana Rumah Data Kependudukan	100%	100%			
					Pembinaan Keluarga berencana (DAK Non Fisik)	Terlaksanaanya kegiatan di Kampung KB	12 kampung KB	12 kampung KB			
				2	Program Pelayanan kontrasepsi						
					Pelayanan Pemasangan Konstrasepsi KB	Terlaksanaanya pelayanan pemasangan kontrasepsi bagi keluarga Pra S dan KS I	312 Akseptor	312 Akseptor			
					Pelayanan	Terpenuhinya sarana	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Pemasangan Konstrasepsi KB (DAK)	Obgin Bed, IUD Kit, Im-plan Remover Kit dan Lemari alokon			tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB;	dan Kualitas Pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB J. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga JOptimalisasi Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	
				3 Program Kependudukan						
				Pertemuan kader KB	Meningkatkan pemahaman tugas-tugas Kader	4 Kali	-			
				Pertemuan Koalisi Kependudukan	Tersedianya laporandan data kependudukan	1 Kali	-			
				Pertemuan Fapsedu	Terlaksanaya kegiatan pertemuan	1 Kali	-			
				Rakornis	Terselenggaranya rakornis	1 Kali	-			
				Sosialisasi Kebijakan Pengenfalian Penduduk dan KB	Terlaksanaya kegiatan pertemuan	1 Kali	-			
				Updating data mikro keluarga	Terlaksanaya penyusunan data mikro keluarga	1 Kali	1 Kali			
				Penyusunan dan Pengolahan data PPM/KB	Tersedianya Data PPMKB	1Kegiatan	-			
				Penyusunan laporan umpan balik	Terlaksanaya	12 Kali	12 Kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						penyusunan laporan umpan balik					
					Penyusunan Profil Dinas PPKB	Tersedianya Profil Dinas PPKB	1Dokumen	-			
				4	Program Pembangunan Keluarga						
					Pendampingan forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	Tersedianya Laporan dan data Pik KRR	100%	100%			
					Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Terlaksanaya pertemuan Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	2 Kegiatan	-			
					Sarana Bahan Komu- nikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kit (DAU)	Tersedianya Media KIE Kit	100%	100%			
					Sarana Bahan Komu- nikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kit (DAK)	Tersedianya Media KIE Kit	100%	100%			
					Penilaian BKB, Keluarga Balita, Keluarga Harmonis dan UPPKS Terbaik	Terlaksanaya lomba	5 Mata Lomba	5 Mata Lomba			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Operasional Kader, Pemantapan Keterpaduan BKB-Posyandu-PADU						
8	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Evaluasi sistem transportasi publik	1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				⟩Bahwa pandemi covid menyebabkan mobilitas masyarakat berkurang, Penggunaan angkutan umum dibatasi sehingga capaian kinerjaangkutan umum tidak dapat mencapai target. ⟩Tidak tersedinya anggaran yg memadai dalam pembiayaan sektor perhubungan sehingga banyak kegiatan khususnya yg berkaitan dengan realisasi PAD tidak dapat tercapai. ⟩Kurangnya SDM teknis perhubungan dan staff serta sarana prasarana yg memadai dalam	⟩melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembiayaan pembangunana termasuk didalamanya pengelolaan pendapatan seperti pelaksanaan non tunai. ⟩Merekerut tenaga-tenaga teknis bidang perhubungan dalam bentuk non-asn dengan kualifikasi khusus untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. ⟩Melakukan usulan pembiayaan dan bantuan kepada kementerian terkait	
				Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah trayek layanan angkutan yang tersubsidi	1 Trayek/layanan	0 Trayek/layanan			
				Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Orang	Jumlah jenis data yang angkutan umum yang terupdate	1 Jenis	0 Jenis			
				Pembangunan, Penataan dan Peningkatan Prasarana Angkutan	Jumlah survei angkutan yang terlaksana	1 Halte	0 Halte			
				Pembinaan Pelayanan Angkutan Barang	Jumlah masyarakat yang tersosialiasi tertib angkutan	25 Orang	0 Orang			
				Pengumpulan Data, Perencanaan dan Pengolahan	Jumlah supir angkutan yang	1 Kegiatan	3 Kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
					Informasi Kinerja Pelayanan Angkutan	teredukasi ttg tertib berkendara dan terpilih menjadi angkutan teladan			menunjang tugas2 operasional sehingga tidak dapa berjalan maksimal.		
			Evaluasi sistem transportasi publik	2	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas						
					Pengawasan dan Pengendalian Keselamatan Angkutan dan Laik Jalan	Jumlah kegiatan penegakan hukum/aturan di jalan raya	12 Kegiatan	12 Kegiatan			
					Penciptaan Kelancaran, Kenyamanan dan Pengaturan Lalu Lintas	Jumlah personel yang melaksanakan kegiatan pengaturan dan penjagaan lalu lintas	40 Orang	40 Orang			
					Sosialisasi/Edukasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah orang atau masyarakat yang tersosialisasi keselamatan lalu lintas	139 Orang	0 Orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
			Manajemen rekayasa lalu lintas	3	Program manajemen dan rekayasa lalu lintas						
					Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jenis perlengkapan jalan terpasang	5 Jenis	0 Jenis			
					Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jenis perlengkapan jalan terpelihara	2 Jenis	2 Jenis			
					Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Lokasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	7 Lokasi	0 Lokasi			
					Perencanaan, Evaluasi dan Analisis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jenis kegiatan manajemen lalu lintas	3 Kegiatan	0 Kegiatan			
					Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah instansi pembina jalan yang terkoordinasi	5 Instansi	5 Instansi			
					Pengembangan Sistem Lalu Lintas	jenis kegiatan pengembangan sistem	3 Kegiatan	3 Kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						lalu lintas					
			Evaluasi sistem transportasi publik	4	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor						
					Penyediaan kelengkapan administrasi pengujian	Jenis kelengkapan administrasi dan operasional pengujian yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis			
					Penyediaan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Sarana dan Prasarana Pengujian	Jumlah alat uji yang dipelihara, dikalibarasi dan diuji	9 Alat	9 Alat			
					Penyediaan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Sarana dan Prasarana Pengujian (DAK)	Jumlah alat uji yang dipelihara, dikalibarasi dan diuji	9 Paket	0 paket			
			Pengelolaan parkir	5	Program peningkatan pelayanan perparkiran						
					Pengawasan dan pengendalian perparkiran	Jumlah lokasi parkir yang	931 Titik	0 Titik			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						terawasi					
					Pembinaan, Sosialisasi dan Edukasi Pelayanan Perparkiran	Jumlah juru parkir dan masyarakat yang terbina dan teredukasi aturan	1010 Orang	0 Orang			
					Pengumpulan Data dan Informasi Kinerja dan Potensi Perparkiran	Jumlah lokasi parkir yang teruji petik	45 Lokasi	15 Lokasi			
					Penyediaan Kelengkapan Administrasi dan Operasional Pelayanan Perparkiran	Jenis kelengkapan administrasi dan operasional pendukung perparkiran yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis			
9	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	⁾Efisiensi dan efektifitas pelayanan public ⁾Evaluasi pelaksanaan Smart City dan e-Governance	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	- Domain Kebijakan SPBE - Domain Tata Kelola - Domain Layanan SPBE	2, 00 2, 50 3, 50	1, 59 2, 00 3, 06	⁾Pelaksanaan Evaluasi SPBE Kota Mataram tahun 2020 mengalami Penurunan Nilai Karena Evaluasi di lakukan tanpa konfirmasi dari Pemerintahan Daerah dan Lemahnya	⁾Evalaluasi dilakukan secara internal setiap tahun sebelum evaluasi SPBE oleh Pusat ⁾Menyiapkan Dokumen pendukung setiap indikator oleh OPD yang menjalan SPBE (SOP,	
					Penyelenggaraan Keamanan e-Goverment	Jumlah Aplikasi OPD yang diamankan	10 aplikasi	10 aplikasi			
					Kegiatan Layanan Akses Internet,	Jumlah lokasi	26 titik lokasi	26 titik lokasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11
					Intranet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	terlayani internet			beberapa indikator yg tidak memiliki dokumen pendukung oleh beberapa OPD Jumlah Pengguna Sub Domain dan Hosting di server tidak sesuai dengan beban server dan Kapasitas internet Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat bidang informasi dan Komunikasi Publik pada tahun 2020 semula direncanakan 2 semester karena adanya Refocusing anggaran, pelaksanaannya hanya dilaksanakan 1 kali atau per tahun. Adapun hasil IKM tahun 2020 sebesar 78,39%, mengalami kenaikan dari	Regulasi, SDM, Dokumentasi) Perlu adanya Penambahan 1 unit server untuk kebutuhan aplikasi yg besar (ekinerja dan e-Pariwisata) Diutuhkan bandwith lokal 100mbps untuk aplikasi ekinerja dan e-pariwisata) dibutuhkan Bintek Dalam Pengelolaan SDM bidang Administrator SERVER penyesuaian indikator target Rencana Kerja.	
					Kegiatan Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang terintegrasi	Jumlah Dokumen monev applikasi yang memenuhi standar SPBE	4 Dokumen/laporan	4 Dokumen/laporan			
					Kegiatan Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan	Jumlah aplikasi kepemerintahan yang dikembangkan	1 Aplikasi Layanan Publik	1 Aplikasi Layanan Publik			
					Penyelenggaraan ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Smart City	10 kegiatan	10 kegiatan			
					Kegiatan Layanan Website Lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah	Jumlah Website Domain dan Sub Domain	30 website sub domain	30 website sub domain			
					Kegiatan Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK	Jumlah Dokumen rekomendasi peralatan TIK dan Jaringan	300 Dokumen rekomendasi	312 Dokumen rekomendasi			
					Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah	Jumlah peserta pelatihan/ Bimtek	51 orang	51 orang			
			Efisiensi dan efektifitas	2	Program Pengelolaan Informasi dan	Tingkat Kepuasan Pelayanan	85 %	78, 39 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
			pelayanan publik Evaluasi pelaksanaan Smart City dan e-Governance	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (sesuai SE Kemendagri nomor 046/219/Bangda ttg penyelenggaraan urusan kominfo)	Komunikasi dan Informasi Publik			tahun 2019 yakni 77,85% dengan mutu pelayanan masih kategori B akan tetapi tidak tercapai dengan Target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja.		
				Kegiatan Layanan penyelenggaraan telekomunikasi	Jumlah Menara Telekomunikasi Yang Diawasi	249 Menara Telekomunikasi	249 Menara Telekomunikasi			
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media informasi publik yang dikelola dan disediakan	4 Media	4 Media	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun 2020 semula direncanakan 2 semester karena adanya Refocusing anggaran, pelaksanaannya hanya dilaksanakan 1 kali atau per tahun. Adapun hasil IKM tahun 2020 sebesar 78,39, mengalami kenaikan dari tahun 2019 yakni	Penyesuaian indikator target Rencana Kerja	
				Kegiatan layanan panggilan Gawat Darurat	Jumlah pengaduan gawat darurat yang ditindak lanjuti	50 pengaduan emergency call	50 pengaduan emergency call			
				Kegiatan Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah aspirasi dan pengaduan yang ditindak lanjuti sampai tuntas	100 pengaduan	100 pengaduan			
				Kegiatan Penyediaan Informasi Publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Jumlah informasi publik yang disediakan	500 DIP	500 DIP			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN		URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11
					Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah penyiaran program pemerintah daerah melalui radio analog dan radio Streaming (online)	60 program	60 program	77,85, dengan mutu pelayanan masih kategori B akan tetapi tidak tercapai dengan Target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja.		
					Kegiatan penyebarluasan informasi publik melalui media	Jumlah Berita/informasi yang di distribusikan melalui medsos, media elektronik dan non elektronik	250 Berita	250 Berita			
					Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Penguatan SDM Bidang Komunikasi Publik	8 Kegiatan	8 Kegiatan			
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas	Jumlah KIM2 yang aktif	15 KIM	15 KIM			
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustria, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan (sektor kriya, kuliner dan	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil menengah yang kondusif				Adanya pandemi covic-19 yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakannya pameran ke luar	Melaksanakan kegiatan lain seperti Bimtek dengan tetap memperhatikan protokol covid.	
					Peningkatan dan Pengembangan UKM	Jumlah pelaku UKM	75 orang	75 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
			fashion)			yang mampu mningkatkan kualitas produk usaha			daerah Adanya refocusing anggaran dan Pandemi Covid-19 sehingga banyak koperasi yang tidak bisa melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) yang sdh disusun pada RAT tahun sebelumnya Banyak koperasi yang menunda melaksanakan RAT sehingga data entry yang masuk ke data Online Data System (ODS) juga sedikit	Tetap melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap gerakan koperasi Tetap melaksanakan sosialisasi ke gerakan koperasi untuk tetap melaksanakan RAT dan meperbaiki data dengan memperpanjang masa berlaku sertifikat NIK	
			Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan UMB serta BUMD/ BUMN	2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM						
					Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM	Jumlah UKM yang dilatih dan difasilitasi pameran	34 orang	31 orang			
					Standarisasi dan Legalitas Usaha UMKM	Jumlah UKM yang berkualitas	50 orang	50 orang			
			Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan I/UMKM	3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
					Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang mampu memahami manajemen koperasi yang baik	35 orang	31 orang			
					Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang memiliki manajemen yang baik	125 koperasi	70 koperasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Peningkatan Penataan Data Koperasi	Jumlah koperasi terdata yang jumlah sertifikat NIK bernilai B	110 koperasi	35 koperasi			
				Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian (DAK)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi KUKM	225 orang	225 orang			
11	Penanaman Modal	DPMPTSP	Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	1 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Penerapan sistem baru dalam pelayanan penerbitan izin yaitu Online Single Submission (OSS) yang membutuhkan penyesuain baik bagi pihak internal kelembagaan maupun eksternal (pemohon).	Pelatihan singkat kepada aparatur terkait penerapan sistem baru (Online Single Submission - OSS). Penambahan sarana dan prasarana untuk memperlancar penerapan sistem baru (Online Single Submission - OSS). Pendampingan langsung oleh aparatur terhadap pemohon yang mengajukan izin.	
				Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Yang diikuti	3 pameran	0			
				Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah arahan kebijakan yang direncanakan	1 dokumen	1 dokumen			
				2 Penanaman Modal						
				Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	3 dokumen rekomendasi	3 dokumen rekomendasi			
				3 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
				Pengembangan Sistem informasi Penanaman Modal	Persentase akurasi data informasi penanaman modal	70%	74%			
				Peningkatan	Jumlah pelaku usaha	70 perusahaan	60 perusahaan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	yang terpantau dan terawasi					
				Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian kasus Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina dan didampingi dalam pengurusan izin	24 perusahaan	80 perusahaan			
				4 Peningkatan Kwalitas Pelayanan Perizinan Pembangunan Sarana Prasarana Perkotaan						
				Peningkatan Kwalitas Pelayanan Perizinan Tata Bangunan	Jumlah izin Tata Bangunan diterbitkan	850 izin	449 izin)****			
				Peningkatan Kwalitas Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Fasilitas dan Utilitas Perkotaan	Jumlah izin Jasa Fasilitas dan Utilitas Perkotaan diterbitkan	300 izin	0 izin)****			
				Peningkatan Kwalitas Pelayanan Perizinan Jasa Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Jumlah izin Jasa Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam diterbitkan	12 izin	49 izin)****			
				5 Peningkatan Kwalitas Pelayanan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat						
				Peningkatan Kwalitas Pelayanan Perizinan Perdagangan	Jumlah izin Perdagangan diterbitkan	1.200 izin	558 izin)****			
				Peningkatan Kwalitas Pelayanan Perizinan Jasa Pelayanan Kesehatan	Jumlah izin Jasa Pelayanan Kesehatan diterbitkan	125 izin	50 izin)****			
				Peningkatan Kwalitas Pelayanan Perizinan Industri, Tenaga kerja dan Penanaman Modal	Jumlah izin Industri Tenaga kerja dan reklame diterbitkan	1.218 izin	717 izin)****			
				6 Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan						
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Terpadu	Jumlah responden survey IKM yang disebarkan	900 orang	262 orang			
				Peningkatan Pengelolaan di Bidang Pengaduan	Jumlah kasus pengaduan	24 kasus	9 kasus)**			
				Sosialisasi Kebijakan dan Layanan Perizinan	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	orang)***			
12	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Pada DInas Kepemudaan dan	Pengembangan Kompetensi SDM di bidang kepemudaan dan olahrga	
				Pendataan potensi pemuda	Jumlah pemuda	44.480.000	0%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						dalam workshop potensi pemuda			Olahraga. Kurang tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan pendukung. Pandemi COvid 19 sehingga event olahraga dan kegiatan Pemuda tidak dapat terlaksana.	Perbaikan, perawatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan pendukung. Dan kedepannya perlu penambahan sarana dan prasarana olahraga yang baru penetapan Perda Retribusi penggunaan asset olahraga. mentaati dan mematuhi protocol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan	
					Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Jumlah kegiatan pemantauan OKP	56.450.000	0%			
				2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan							
					Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah anggota Paskibra yang dibina	270.735.000	251.535.000 (92.91%)			
					Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Jumlah peserta fasilitasi/temu wicara OKP	125.475.025				
					Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan pemuda pelopor	40.000.000	0%			
			Peningkatan keterampilan wirausaha produktif	3	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda						
					Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah peserta pelatihan	24.133.000	0%			
				4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Olahraga						
				Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Jumlah fasilitasi yang dilakanakan	63.460.100	62.284.100 (98.15%)			
				5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						
				Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan olahraga unggulan daerah	Jumlah sekolah yang memperoleh fasilitasi informasi olahraga unggulan	53.747.000	49.647.000 (92.37%)			
13	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase OPD Yang Data Sektoralnya tervalidasi sesuai standar	100%	100%	Belum terselenggaranya Forum Satu Data sebagai tindak lanjut Perwal Satu Data Terpadu Daerah Nomor : 26 tahun 2020 Recofussing anggaran sebagai dampak Pandemi Covid 19	Pembentukan Forum Data dengan mengajukan Tim Tata Kelola Mataram Satu Data, yang akan melibatkan seluruh OPD sebagai Produsen Data dimana BPS Kota Mataram sebagai Pembina Data dan Kominfo sendiri sebagai Validata	
				Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Sinkronisasi data -data sektoral menuju ONE DATA	3 Dok (Sektor Ekonomi, Sektor SDA, Sektor Sosial)	0			
				Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jenis penyajian Data	7 Dok (Mataram Dalam data dan kecamatan dalam data	7 Dok (Mataram Dalam data dan kecamatan dalam data			
				Penyusunan Kebijakan Satu Data	Jumlah Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
					Terpadu Daerah						
					Peningkatan Kapasaitas SDM Statistik sektoral	Jumlah SDM Statistik Sektoral yang terlatih	2 org	2 org			
14	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	⟩Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik ⟩Evaluasi pelaksanaan Smart City dan e-Governance	1	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Program PPPIPD)	Prosentase nilai kematangan informasi	5%	5%	⟩Pelaksanaan Pengembnagan Layanan Keamanan Informasi (ITSecurity Assesment) Pada Aplikasi/webmail tidak dapat dilaksanakan karena Tenaga Teknis masih tergantung dari BSSN dan dengan adanya Pandemi Covid 19 dan Refocusing Anggaran	⟩Melakukan Koordinasi secara intensif ke BSSN. ⟩Mengirim Tenaga Teknis ke Pusdiklat BSSN agar dapat melakukan IT Security secara Mandiri ⟩Menambah Anggaran	
					Kegiatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Aplikasi/Webmail yang dinilai	3 (tiga) Aplikasi/Webmail	0			
					Kegiatan Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi	Entitas Jaring Komunikasi Sandi yang dibentuk dan yang aktif	47 OPD	47 OPD			
					Kegiatan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Kebijakan tata kelola keamanan informasi	1 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan			
					Kegiatan Penerapan sistem manajemen keamanan informasi	Jumlah Dokumen Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	6 dokumen (OPD yang dinilai Indeks KAMI)	6 dokumen (OPD yang dinilai Indeks KAMI)			
					Peningkatan Kapasitas SD Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan Diklat	10 Orang	10 Orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
					Keamanan Informasi	Teknis/bimtek/worshop/FGD terkait keamanan informasi yang diselenggrakan oleh kementerian pusat/penyelenggara lainnya					
15	Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Promosi pariwisata melalui event-event olahraga, keagamaan dan budaya	1	Program Pengembangan Nilai Budaya				Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang berbasis nilai dan kearifan lokal, sementara di lain pihak peserta didik mendapatkan kemudahan mengakses nilai dan budaya global yang tidak mendidik.	Pengembangan sekolah berbasis keunggulan dan kearifan local	
					Lawatan Sejarah	Jumlah kegiatan lawatan sejarah	24	24			
					Penyelenggaraan MTQ/STQ Siswa Pelajar	Jumlah peserta MTQ/STQ siswa/pelajar	500	0			
					Lomba Tadarus Al-Qur'an Tingkat Pelajar	Jumlah peserta tadarus tingkat pelajar	160	0			
				2	Program pengelolaan kekayaan budaya						
					Sosialisasi pengelolaan	Jumlah Peserta	70 Orang	70 Orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				kekayaan budaya lokal daerah	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan					
					Jumlah Peserta Sosialisasi Cagar Budaya	70 Orang	70 Orang			
				Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah Peserta Workshop Permuseuman	70 Orang	70 Orang			
					Jumlah Peserta Workshop Peningkatan Kemampuan Tenaga Cagar Budaya	70 Orang	70 Orang			
				Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah Pameran Seni dan Budaya Kota Mataram	2 Event	0 Event			
				Pengembangan dan Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Lokal	Jumlah event budaya lokal yang dilaksanakan	1 Event	0 Event			
16	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Efisiensi dan	1 Program Pengembangan				Kurangnya Koleksi	Penambahan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
			efektifitas pelayanan publik	Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				buku. Kurangnya alat peraga koleksi perpustakaan anak Belum adanya Perpustakaan koleksi e book. Kurangnyasarana & prasarana perpustakaan Kelurahan/ se kolah. Kurangnya penelitian dan pengkajian dibidang perpustakaan.	jumlah dan jenis koleksi . Pembinaanuntuk pengurus perpustakaan Kelurahan/Sekolah. Perbaikan dan pengembangan sarana prasarana Perpustakaan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan. Pengadaan lahan khusus ruang perpustakaan Kelurahan/Sekolah(dana Khusus) Pengembangan kerjasama bidang perpus takaan secara multisektoral.	
				Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kunjungan Rata –rata perbulan (3TBM dan 2 mobil pusling Ruang baca Umum dan Pendidik pemakai)	16.000 org	5.263 orang dan belanja pegawai honor piket (Jumlahnya kunjungan layanan dibatasi mengingat adanya pandemi)			
				Lomba Bercerita Tk. SD/MI se Kota Mataram	Jumlah Siswa SD/MI yang ikut serta sebanyak 40 orang	40 orang	(Tidak Terlaksana karena Siswa SD/MI masih diliburkan karena adanya pandemi.)			
				Otomasi Perpustakaan Umum	Jumlah bahan Pencetakan Kartu Anggota	2.400 kartu anggota	2.400 kartu anggota			
				Pelayanan Pendidikan Pemakai	Jumlah Kunjungan siswa Sekolah	1.000 siswa	397 siswa			
				Lomba Perpustakaan Kelurahan Se Kota Mataram	Jumlah Perpustakaan Kelurahan	50 Perpustakaan Kelurahan	(Tidak Terlaksana)			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Wisata Perpustakaan	Jumlah Siswa/I Paud/TK, SD/MI dan penyandang disabilitas	160 orang	(Tidak Terlaksana)			
				2 Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah						
				Penyediaan Bahan Pustaka	Terpenuhinya bahan Koleksi perpustakaan	1 kegiatan	7 Jenis belanja dan 1 judul buku (Buku Karangan Sekda)			
				Penyediaan Sarpras bahan pustaka	Terpenuhinya koleksi bahan pustaka	1 kgt	1 kgt			
				Preservasi bahan pustaka/buku	Tersedianya stockopname bahan pustaka	1 kgt	1 kgt			
17	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		1 Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah				Belum adanya Depo Arsip sesuai standar. Kurangnya tenaga Arsiparis . Belum adanya lokasi diorama yang menggambarkan sejarah berdirinya Kota Mataram. Belum tersedianya dana untuk	Mendirikan Depo Arsip sesuai Standar Nasional. Pembinaan dan pengembangan untuk Arsip. Perbaikan dan pengembangan sarana prasarana pengelolaan arsip. Pengembangan kerja sama di	
				Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penilaian Arsip In-aktif	1 Kegiatan (Pengadaan ATK Pengolahan, Penyusunan Perwal SKKA, Pencanangan GNSTA)	1 Kegiatan (Pengadaan ATK Pengolahan)			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
				Penyelamatan akuisisi arsip	Jumlah arsip statis terdaftar.	1 Daftar Arsip Bimkos Arsip Aset,	1 Daftar Arsip	mengadakan penelitian bidang arsip (seperti sejarah berdirinya Kota Mataram, sejarah penjajahan masyarakat yang pernah ada di Kota Mataram. Belum memadainya tenaga arsiparis Belum optimalnya anggaran untuk diklat dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan Belum optimalnya Sarana dan prasarana/kurang memadai Belum optimalnya koordinasi BKPSDM untuk memberikan dana Diklat kearsipan	bidang arsipdalam penelitian. Mengadakan foto-foto kuno lokasi di Mata ram. Penciptaan Arsiparis Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pembinaan kearsipan Pembinaan dan pengembangan kegiatan kearsipan Perlunya koordinasi yang intens dengan BKPSDM	
				Alih Media dan Preservasi Arsip	Daftar arsip yg dialihmediakan dan dipreservasi	2 Daftar Arsip (Alih Media dan Preservasi	1 Daftar Arsip (Preservasi)			
				Lomba Tata Kearsipan Tk. SD/MI Sederajat Se Kota Mataram	Tertatanya arsip Sekolah	3 Pemenang	(Tidak terlaksana)			
				2 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan						
				Pemeliharaan rurin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	persentase sarpras kearsipan terpenuhi standar	1 Tahun	90 ktk masker, 35 ktk handscoen, 613 Kg Kapur barus, 59 kg silica gel			
				3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi						
				Penyediaan Sarana LAyanan Informasi arsip	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan Diarpus Kota	12 Bulan	(Tidak Terlaksana)			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3		5		6	7	8	9	10	11
						Mataram					
				4	Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan jasa Kearsipan						
					Pendidikan dan Pelatihan Formal Kearsipan.	jumlah ASN yang faham khusunya arsiparis dan pengelola arsip	2 orang (Penciptaan arsiparis)	3 orang (melaksanakan SPPD Konsultasi awal diklat penciptaan)			
					Forum Arsiparis	- jumlah arsiparis terbina - jumlah pertemuan forum arsiparis	29 Orang	(Tidak terlaksana)			
					Wisata Arsip Anak Sekolah se Kota Mataram	- jumah peserta wisata arsip - jumlah arsip yang dikenalkan	280 siswa	(Tidak terlaksana)			
					Pembinaan Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Tertatanya arsip OPD	39 OPD	(Tidak terlaksana)			

3.4 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Tabel 3.6
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pilihan dan Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
URUSAN PILIHAN											
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	⁾Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir ⁾Integrasi program Gemar Makan Ikan (GEMARI) dengan pengembangan usaha kuliner berbasis Ikan	1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				⁾Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dng target waktu yang ditentukan karena adanya refocusing anggaran ⁾Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dng target waktu yang ditentukan karena adanya refocusing anggaran ⁾Pelatihan tidak bisa dilakukan sekaligus untuk 30 orang anggota Pokdakan karena	⁾Menjadwalkan dan menganggarkan kembali kegiatan waktu ABT ⁾Menjadwalkan dan Menganggarkan kembali kegiatan pada waktu ABT ⁾Mengatur waktu pelaksanaan pelatihan dan pemberian bantuan dengan tetap menajga protocol kesehatan ⁾Perlu menyediaakn bahan dan	
					Pengadaan prasarana / alat tangkap dan pengolahan ikan	Tersedianya prasarana alat tangkap dan Pengolahan Ikan sumber dana DAU	2 pkt Mesin tempel, 3 pkt sampan, 1 alat tangkap/perlengkapan nelayan	2 pkt Mesin tempel, 3 pkt sampan, 1 alat tangkap/perlengkapan nelayan			
					Pengadaan prasarana / alat tangkap dan pengolahan ikan (DAK)	Tersedianya prasarana alat tangkap dan Pengolahan Ikan sumber dana DAK	10 unit kapal lbh kecil dr 3 GT; 3 unit 34 GT; 100 unit jaring; 35 unit lampu inverter; 50 unit coolbox	10 unit kapal lbh kecil dr 3 GT; 3 unit 34 GT; 100 unit jaring; 35 unit lampu inverter; 50 unit coolbox			
				2	Program Pengembangan Perikanan Budidaya						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jml Kelompok / orang Yang didampingi	2 angkatan, 35 orang	2 angkatan, 35 orang	harus menerapkan protocol Kesehatan Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dng target waktu yang ditentukan karena adanya refocusing anggaran Pelatihan tidak didukung bahan dan peralatan yang diserahkan kepada kelompok/masyarakat Uji laboratorium tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dng target waktu yang ditentukan karena adanya refocusing anggaran Kurangnya tenaga tekhnis yang dapat memberikan	peralatan yang diserahkan kepada kelompok masyarakat sehingga bisa menerapkan ilmu yang didapat dari hasil pelatihan Dijadwalkan kembai pada tahun 2021 Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelatihan tekhnis perbengkelan mesin kapal perikanan yang dianggarkan pada tahun 2021 Menjadwalkan dan Menganggarkan kembali kegiatan pada waktu ABT	
				Pengembangan Budidaya ikan air tawar	Tersedianay pakan dan bibit ikan	90 Sak pakan	90 Sak pakan			
				Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan SDM bagi Kelompok Budidaya Lele Kolam Terpal di Kota Mataram	1 angkatan	1 angkatan			
				Pengendalian hama penyakit ikan dan pemulihan SD kelautan dan perikanan	Tersedianya bahan praktek uji lab	81 buah bahan praktek	81 buah bahan praktek			
				Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya	3 paket	3 paket			
				3 Program Pemeberdayaan Masyarakat Pesisir						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Pembinaan Kelompok ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Nelayan Yang Dibina	30 orang	30 orang	pelatihan Jperbengkelan mesin kapal untuk meningkatkan keterampilan nelayan JPelaksanaan kegiatan tidak sesuai dng target waktu yang ditentukan karena adanya refocusing anggaran		
				4	Program Optimaslisasi Pengelolan dan Pemasarwan Perikanan						
					Lomba Gemar Makan Ikan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Gemar Makan Ikan	1 kegiatan	1 kegiatan			
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata	JPenguatan sektor ekonomi kreatif unggulan (sektor kriya, kuliner dan fashion) JPromosi pariwisata melalui event-event olahraga, keagamaan dan budaya	1	Program Pengembangan pemasaran pariwisata				Tidak ada Permasalahan karena realisasi sudah sesuai target		
					Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah Penyiaran yang dilakukan dalam satu tahun	24 Kali	24 Kali			
					Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata	15 Kali	15 kali			
					Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelaku ekonomi kretaif yang terlatih	54 kelompok	54 kelompok			
					Pelatihan pemandu wisata terpadu (DAK)	Jumlah Pemandu wisata yang dilatih	450 Orang	450 Orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2 Program pengembangan destinasi pariwisata						
				Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana prasarana Saya Tarik Wisata yang terbangun	1 unit	1 unit			
				Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Terlaksannya Pembangunan Obyek Daya Tarik Wisata	1 destinasi	1 destinasi			
				Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah ODTW yang berekembang	6 ODTW	6 ODTW			
				Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Jumlah Pelaku pariwisata yang tersosialisasi	128 Hotel	128 Hotel			
				Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	Tersediannya Aminitas ODTW yang baik, bersih dan indah	1 ODTW	1 ODTW			
				3 Program pengembangan Kemitraan						
				Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Jumlah Pelaku pariwisata yang berkoordinasi	50 Orang	50 Orang			
				Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah Peaku pariwisata yang dilatih	50 orang	rang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
3	Pertanian	Dinas Pertanian	Pengembangan komoditi dan teknologi pertanian berbasis lahan terbatas perkotaan	1	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian				).Alih fungsi lahan yang semakin tinggi setiap tahunnya yang berdam pak pada luas lahan pertanian yang semakin berkurang, disebabkan oleh meningkatnya kon versi lahan pertanian untuk keperluan pemuki man dan fasilitas umum.)Ketersediaan sarana dan prasarana seperti sarana produksi pertanian, lahan dan air (jaringan irigasi. jalan usahatani dan jalan produksi))Belum cukup tersedianya benih/biibit unggul bermu tu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum	)Melindungi kebera daan lahan pertain an melalui perencanaan dan pe ngendalian tata ruang; meningkatkan optima lisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, me ningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.)Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam per lindungan daerah aliran sungai, peme liharaan jaringan irigasi pedesa an, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permu kaan dan bawah tanah, pembangunan dan	
					Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan luas tanam, luas panen dan produksi	1 Dokumen penetapan perencanaan luas tanam dan luas panen dan 12 laporan	1 Dokumen penetapan perencanaan luas tanam dan luas panen dan 12 laporan			
					Pengendalian OPT Pangan dan Hortikultura	persentase penurunan serangan OPT	5 % per tahun	5 % per tahun			
					Penyusunan Data Statistik	Jumlah dokumen data luas tanam, luas panen dan produksi tanaman	4 jenis dokumen (Padi, jagung, kedelai, horti)	4 jenis dokumen (Padi, jagung, kedelai, horti)			
					Pengembangan Tanaman Hortikultura	Jumlah komoditi utama hortikultura	2 komoditi utama hortikultura	2 komoditi utama hortikultura			
			Pengembangan komoditi dan teknologi pertanian	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			berbasis lahan terbatas perkotaan		Pengelolaan Lahan dan Air	Jumlah irigasi dan jalan usaha tani yang berfungsi baik	26 unit irigasi air tanah dangkal, 1 unit irigasi air tanah dalam, 1 unit dam parit dan 3 unit pintu air	26 unit irigasi air tanah dangkal, 1 unit irigasi air tanah dalam, 1 unit dam parit dan 3 unit pintu air	berkembangnya kelem bagaan pelayanan pe nyedia sarana produksi, serta belum berkembang nya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi. Berkembangnya penyakit hewan yang berbahaya terhadap manusia seperti penya kit flu burung, flu babi dan rabies. Rendahnya populasi dan kualitas ternak yang disebabkan karena beberapa hal utama yaitu pola pemeliharaan yang tradisional, penanga nan dan pencegahan kesehatan ternak, mutu genetik yang masih rendah, peman faatan potensi ternak	pemeliharaan jaringan serta pemanfaatan sumber-sumber air tanah. Menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan terjangkau Mengembangkan pe nangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk mempro duksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendo rong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-	
					Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	Jumlah sarpras (alat)	5 unit handsprayer	5 unit handsprayer			
					Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna	jumlah peserta bimtek	42 orang petani	42 orang petani			
				3	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan						
					Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Penyuluh pertanian	40 penyuluh	40 penyuluh			
					Penyuluhan dan pendampingan bagi	Jumlah kelompok tani yang dibina	115 kelompok tani	115 kelompok tani			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					pertanian/perkebunan				yang belum optimal serta adanya kematian ternak akibat penyakit hewan serta kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) pertanian baik petani maupun penyuluh dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.)Kurangnya modal usaha petani dalam meng aplikasikan inovasi usaha disebabkan oleh terbatasnya pihak perbankan/lembaga keuangan dalam memberikan bantuan modal/kredit.) Mulai turunnya minat masyarakat berusaha/bekerja di bidang pertanian. Dilihat	obatan tanam an yang ramah lingkungan.)Pencegahan dan pe nanganan penyakit hewan perlu menjadi hal yang pokok untuk meng hasilkan ternak yang berkualitas untuk meningkatkan produksi.)Peningkatan populasi peternakan baik ternak besar, ternak kecil dan unggas dengan meningkatkan kualitas dari bibit ternak yang dikem bangkan. Pengawasan peredar an pangan hasil ter nak sebelum beredar dimasyarakat untuk menjamin kon sumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Ketersedia an	
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah kelembagaan kelompok tani yang dibina	115 kelompok tani	115 kelompok tani			
				4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						
					Pengembangan Taman Pembibitan Ternak	Jumlah taman pembibitan percontohan yang dikembangkan	1 lokasi	1 lokasi			
					Pengembangan Pakan Tenak	Jumlah kelompok yang dibina	16 kelompok	16 kelompok			
				5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak						
					Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Menular	Jumlah pencegahan penyakit menular ternak	1 kegiatan	1 kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Ternak				dari posisi strategis Kota Mataram yang dinamika perekonomiannya berjalan pesat membuat usaha sektor pertanian kurang diminati, karena usaha disektor pertanian yang membutuhkan proses dan waktu yang lama dan resiko yang dihadapi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Selain itu karena keberadaan dan kepemilikan lahan sawah yang semakin berkurang serta status petani yang sebagian besar hanya merupakan	SDM baik medis dan para medis yang berkompeten dalam menangani penyakit hewan. Membangkitkan kembali berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Perhimpunan Petani Pemakai Air dengan melakukan pelatihan2, demplot2 dan studi tiru dengan daerah lain dalam pemanfaatan tehnologi tepat guna Menjembatani kesen jangan manajemen antara	
					Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah dokumen data peternakan di 6 kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
					Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Jumlah pelayanan puskeswan	3 Puskeswan	3 Puskeswan			
			Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan	6	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Hasil Peternakan						
					Revitalisasi Pelayanan RPH dan Pasar Hewan	Jumlah RPH dan Pasar Hewan yang beroperasi	1 Pasar Hewan , 2 RPHR, 1 RPHB, dan 1 RPU	1 Pasar Hewan , 2 RPHR, 1 RPHB, dan 1 RPU			
			Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan	7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produk Pertanian/Perkebunan	Jumlah laporan data informasi pasar	24 laporan	24 laporan	penggarap atau penyewa lahan.	lembaga per bankan formal dengan masyarkat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilaku kan pula pemberdayaan kelem bagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan. Pada akhir nya lembaga ini diharap kan dapat berkembang menjadi lembaga man diri milik masyarakat petani perdesaan. Menciptakan usaha pertanian yang mem punyai nilai ekonomi tinggi dan mempunyai daya saing dengan produk yang lain, selain itu dibangunnya kerja sama dengan pengu saha-pengusaha dibi	
				Temu Usaha Agribisnis	Kegiatan temu usaha	2 kegiatan	2 kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
										dang pertanian yang mau menampung hasil-hasil produksi pertanian.	
4	Perdagangan	Dinas Perdagangan	) Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik) Sinergitas program lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis dan pengendalian inflasi	1	Pengamanan Perdagangan Menuju Tertib Ukur				) Anggaran dialihkan karena adanya pendemi Covid-19) Volume kegiatan pengawasan dikurangi karena adanya refocusing anggaran penanganan covid-19) Tetap dilakukan pengawasan dengan protokol kesehatan tapi volume dikurangi karena anggaran dialihkan karena pendemi Covid-19) Kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kegiatan dengan jumlah massa	) Pelaksanaan pelayanan tera ulang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; (2) Penerapan pelayanan tetap bersifat voluntari dengan tidak memaksakan kepada pemilik alat, namun tetap dihimbau untuk melakukan tera/tera ulang terhadap alat ukurnya) Kegiatan promosi tetap dilaksanakan dengan mengadakan	
					Bimbingan dan Penyuluhan Kemetrologian	Jumlah pelaku usaha yang diberikan penyuluhan	320 orang	80 orang			
					Peningkatan Pengawasan Masa dan Timbangan	Jumlah UTTP terkait masa dan timbangan yang diawasi	2.000 UTTP	1.500 UTTP			
					Peningkatan Pengawasan Ukuran, Arus, Panjang dan Volume	Jumlah UTTP terkait ukuran arus, panjang dan volume yang diawasi	30 UTTP, 11 SPBU, 2 SPBE	15 UTTP, 11 SPBU, 2 SPBE			
					Peningkatan Pelayanan Tera/Tera Ulang	Realisasi PAD kemetrologian yang dicapai	Rp. 45.000.00,-	Rp. 56.000.000,-			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
				2	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				yang cukup banyak dan berkumpul untuk kegiatan sidang tera ulang di pasar tradisional; Perlemahan perekonomian membuat beberapa jenis usaha yang menggunakan alat ukur, takar, dan timbang tidak beroperasi/tutup sehingga pemilik alat UTTP memilih untuk tidak melakukan tera/tera ulang terhadap alat UTTP yang dimilikinya; Kondisi pandemi yang mengurangi waktu efektif kegiatan pelayanan tera ulang pada saat penerapan sistem WFH/bekerja dari rumah Anggaran	pameran di NTB dengan skala nasional Kegiatan di fokuskan pada usaha-usaha yang memiliki dampak besar Sisanya direncanakan untuk diprioritaskan pada Tahun Anggaran 2021 Pelatihan tidak dilaksanakan karena fokus untuk bertahan dimasa pendemi melalui bantuan dana tunai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penerapan data wajib retribusi berbasis eKTP, nomor los/toko Penganggaran membuat Detail Engineering Design Pasar Rakyat Kota	
					Pengembangan Data Base Informasi Potensi	Jumlah jenis produk unggulan yang terdata	6 jenis	6 jenis			
					Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Jumlah produk unggulan yang terjual	6 produk	0			
				3	Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri						
					Pengawasan dan Pembinaan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha yang memiliki ijin usaha	650 perusahaan	120 perusahaan			
				4	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL yang mendapat bantuan	90 PKL	86 PKL	kegiatan pameran dialihkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 Volume kegiatan pengawasan dikurangi karena adanya refocusing anggaran penanganan covid-19 Adanya beberapa calon penerima yang tidak memenuhi syarat dan perubahan profesi karena adanya pandem Anggaran kegiatan pelatihan dialihkan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19	Mataram Pelaksanaan pasar murah/pasar rakyat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan	
					Pelatihan Manajemen Usaha Kecil	Jumlah PKL yang dilatih	60 PKL	0			
					Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL yang dibina	1.364 PKL	1.364 PKL			
				5	Peningkatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar						
					Pendataan dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Pasar	Jumlah obyek retribusi pasar yang terdata	7.096 pedagang	7.096 pedagang			
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar	6 unit	9 unit			
					Peningkatan Pengelolaan Pasar	Jumlah pasar yang dikelola	19 pasar	19 pasar			
				6	Pengendalian Barang Pokok dan Penting						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Monitoring Persediaan dan Perkembangan Harga Pokok Masyarakat dan Komoditi Strategis Lainnya	Jumlah komoditas barang pokok	34 komoditas	34 komoditas			
					Penyelenggaraan Pasar Rakyat	Jumlah kegiatan pasar rakyat	4 kali	1 kali (3 hari)			
					Pengawasan Peredaran Barang Penting (Barang yang diatur)	Jumlah komoditas yang diawasi	7 item	7 item			
5	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM	Peningkatan keterampilan wirausaha produktif	1	Program Pengembangan IKM				Adanya refocusing anggaran untuk pandemi covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti pelatihan dan pemberian bantuan peralatan kepada IKM	IKM prioritas yang akan mendapatkan pembinaan diajukan di bantuan stimulan (IKM yang terdampak covid Transfer teknologi diajukan pada kegatan di TA. 2021	
					Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah pengrajin yang dilatih teknis produksi bagi IKM menjahit, anyaman dan aneka	60 IKM	10 IKM			
					Pembinaan bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah pelaku IKM olahan pangan yang dilatih	135 IKM	135 IKM			
				2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri						
					Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah pelaku IKM logam, mesin dan eletronika yang menggunakan teknologi industri	150 IKM	140 IKM			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
6	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	Perluasan akses informasi lapangan pekerjaan	1	Program Penempatan Calon				Tidak kuota dari provinsi dan pemerintah pusat terkait kuota calon transmigran untuk Kota Mataram pada tahun 2020, sementara peminat warga kota untuk bertransmigrasi lumayan banyak.	Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk usulan kuota calon transmigrasi pada tahun 2021	
					Pendaftaran dan seleksi calon	Terlaksananya pendaftaran dan seleksi calon	0 kegiatan	0 kegiatan			
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
1	Administrasi Pemerintaham	Bagian Administrasi Pembangunan	Peningkatan Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan	1	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan				Belum optimalnya survey akibat berbagai kendala pada saat pelaksanaan survey yang dapat menyebabkan hasil standar harga yang diperoleh menjadi tidak sesuai	Pelaksanaan survey dilakukan dengan kerjasama tenaga ahli dari Universitas yang dilakukan dengan metode survey yang dapat dipertanggungjawabkan untuk meminimalisir	
					Survey dan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Jumlah Dokumen SSH	1 Dokumen SSH / 175 buku	175 Dokumen SSH			
					Penyusunan dan Review ASB	Jumlah dokumen ASB	1 Dokumen	1 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan APBD	4 Laporan	4 Laporan	dengan harga pasar Hasil Reviu ASB menunjukkan bahwa dengan adanya Permendagri 90 Tahun 2019 maka ASB yang telah disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 tidak dapat dipergunakan. ASB yang disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 meliputi kegiatan yang bersifat non kegiatan fisik (konstruksi), sedangkan ASB pada Permendagri 90 Tahun 2019 berisi analisis untuk kegiatan/pekerjaan fisik Akibat adanya Pandemi Covid-1, terjadi beberapa kali revisi	harga yang lebih tinggi dari harga sesungguhnya Penentuan atau penghitungan ASB dilakukan oleh SKPD yang relevan Komunikasi intensif dengan Badan Keuangan Daerah untuk mensinkronkan DPPA dan SIMDA, dan SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh data.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
									anggaran, sehingga DPPA dan Simda menjadi tidak sinkron, dan mempengaruhi evaluasi pelaksanaan fisik dan keuangan		
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				Kebutuhan JF PPBJ sesuai dengan rekomendasi LKPP belum terpenuhi	Berkoordinasi dengan BKPSDM terkait penginputan hasil rekomendasi LKPP atas usulan kebutuhan JF PPBJ di Pemerintah Kota Mataram pada Aplikasi e-formasi Menyampaikan Surat Permohonan Mengikuti Penyesuaian/ Inpassing JF PPBJ ke LKPP Menginput data peserta ujian pada Sistem Informasi Penyesuaian/ Inpassing JF PPBJ Terdapat 3 orang	
					Pembianaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pendampingan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 Laporan			
						Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengadaan barang dan jasa	3 laporan	2 laporan			
					Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pemilihan penyedia	12 Laporan	12 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						Jumlah laporan hasil monev paket paket strategis	20 laporan	09 laporan		yang berhasil lulus pada ujian tersebut sehingga untuk sementara terdapat 4 orang JF PPBJ untuk jenjang Muda pada Bagian PBJ)Melaksanakan 2 (dua) kali sosialisasi JF PPBJ kepada seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Mataram yaitu pada Tanggal 23 September dan 3 Desember 2020 untuk menjaring lebih banyak SDM agar dapat memenuhi kebutuhan JF PPBJ sesuai dengan rekomendasi LKPP.	
					Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah laporan pelaksanaan LPSE	12 Laporan	12 Laporan			
						Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis SPSE	2 Laporan	2 Laporan			
		Bagian pemerintahan Setda Kota Mataram	Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian	1	Program Peningkatan Kerjasama Daerah				) Kurangnya koordinasi tindak	)OPD yang melaksanakan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					pembentukan Kerjasama Daerah	Jumlah kesepakatan yang menjadi perjanjian kerjasama	5 perjanjian Kerjasama	2 perjanjian Kerjasama	lanjut perjanjian Kerjasama yamg dilaksanakan OPD) Belum adanya pemetaan kejadian gangguan trantibum dan linmas berdasarkan wilayah)Masih terdapat apparat Kecamatan dan kelurahan yang belum menguasai batas wilayahnya, sehingga masih terjadi kesalahan dalam administrasi kewilayahan	PKS harus membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada Walikota melalui TKKSD (Bag pemerintahan))Perlunya dibuat peta gangguan trantibum dan linmas agar pemerintah daerah lebih mudah membuat kebijakan sesuai dengan zona kejadian gangguan trantibum dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan)Akan segera dibentuk Peraturan Walikota tentang batas Kelurahan berdasarkan berita acara yang telah disepakati Lurah dan camat untuk dipedomani dalam	
					Apeksi Nasional dan regional	Jumlah Notulen hasil raker/rekomendasi yang diikuti	2 rekomendasi	2 rekomendasi			
				2	Program peningkatan Koordinasi Administrasi pemerintahan						
					Peringatan Hari Jadi Kota Mataram	Jumlah dokumentasi dan laporan hasil kegiatan	2 dokumen	2 dokumen			
					Pendataan dan sinkronisasi Gangguan Trantibum dan Linmas di Kota Mataram	Jumlah Notulen hasil raker/ rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi			
					Pembentukan Desk Pemilu	Jumlah kegiatan desk yang dilaksanakan dalam menunjang pelaksanaan pemilu	2 kegiatan	2 kegiatan			
				3	Program Penataan Administrasi wilayah						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada camat	Jumlah kewenangan yang dievaluasi	2 kewenangan	2 kewenangan		memberikan pelayanan yang akurat kepada masyarakat	
					Pemekaran Kecamatan dan keluraha di Kota Mataram	Jumlah Kecamatan yang disesuaikan	2 kecamatan	0 Kecamatan			
					Penyempurnaan pal Batas Kecamatan dan eluraha di Kota Mataram	Jumlah Kelurahan yang akurat batas administrasi wilayahnya	16 Kelurahan	16 Kelurahan			
					Pembakuan Nama Rupabumi kota Mataram	Jumlah unsur rupabumi yang diinventarisasi	2 Unsur	2 Unsur			
		Bagian Kesra	Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian Penguatan pelaksanaan bansos tepat sasaran	1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan				Adanya Pandemi Covid 19, mengakibatkan Kegiatan PHBI tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya Belum semua sekolah menerapkan Prinsip-prinsip Trias UKS/M Tidak semua Lembaga melengkapi persyaratan untuk pencairan dana Hibah sampai dengan batas	Tetap menjalakan Protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan/sand sanitizer Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait pelaksanaan UKS/M Menghubungi lembaga dan pihak terkait untuk segera mengirimkan peryaratan yang dibutuhkan	
					Pembinaan dan fasilitasi keagamaan	Jumlah peringatan Hari Besar Islam	5 PHBI	1 PHBI			
					Pembinaan dan fasilitasi lembaga pendidikan, pemuda dan olahraga	Jumlah sekolah/madrasah yang dibina	18 sekolah	7 sekolah			
					Monitoring dan evaluasi kelembagaan sosial dan keagamaan	Jumlah lembaga yang menerima hibah/bansos	302 lembaga	281 lembaga			
				2	Program Peningkatan Kesetaraan						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gender dan Kepemudaan				waktu yang telah ditentukan)Ada proposal yang double dan sudah pernah diberikan tahun sebelumnya sehingga tidak dapat direalisasi) Tidak semua Kader dapat mengikuti Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	) Mengajukan penambahan anggaran sehingga lebih banyak kader yang bisa ikut berpatisipasi dalam kegiatan pembinaan	
				Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan	Jumlah kader PKK yang dibina	1.825 kader	1.150 kader			
		Bagian Hukum	Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian	1 Penataan Peraturan Perundang-Undangan				)Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan penyuluhan hukum)Situasi pandemic Covid - 19	)Lebih memfokuskan pada optimalisasi website JDIH sebagai sarana sosialisasi dan penyuluhan hukum)Tetap menyelesaikan pekerjaan dengan tetap mengedepankan protocol Kesehatan serta memanfaatkan teknologi (online/daring) guna	
				Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah produk hukum daerah yang tersedia	15 produk hukum	63 produk hukum - 7 Perda - 56 Perwal			
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan Hukum	Jumlah pengunjung web JDIH	1100 pengunjung	1100 pengunjung			
				Pelayanan Bantuan Hukum Pemda	Jumlah kasus tertangani	3 kasus	5 kasus			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kelompok kadarkum yang dibina	30 kelompok	30 kelompok		memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait	
						Jumlah laporan kota peduli HAM	1 laporan	1 laporan			
		Bagian Perekonomian dan SDA	Optimalisasi Tata Kelola da Kinerja BUMD dan BLUD Sinergitas program lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis dan pengendalian inflasi	1	Pembinaan BUMD dan BLUD				Telah mencapai target	Telah mencapai target	
					Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	5 Dokumen	5 Dokumen			
				2	Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA						
					Penyelarasan Pelaksanaan Program Bidang perekonomian	Jumlah Laporan monev penyelarasan pelaksanaan program bidang perekonomian	12 Dokumen	12 Dokumen			
					Penyelarasan Pelaksanaan Program Bidang SDA	Jumlah Laporan monev penyelarasan pelaksanaan program Bidang SDA	6 Dokumen	6 Dokumen			
					Validasi Data dan Informasi Bidang Perekonomian dan SDA	Tersedianya data dan informasi Bidang Perekonomian dan SDA	6 Dokumen	6 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalan Inflasi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Inflasi daerah	7d Dokumen	7 Dokumen			
		Bagian Organisasi	Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				Dalam rangka penerapan pemberian TPP Tahun 2021 salah satu persyaratannya adalah Penyelesaian Anjab dan ABK di seluruh Perangkat Daerah sedangkan masih banyak Perangkat Daerah yang belum disusun Anjab dan ABK.	Menyelesaikan Penyusunan Anjab dan ABK di seluruh Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi persyaratan penerapan Pemberian TPP Tahun 2021.	
					Pembinaan Asistensi Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang di asistensi	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang di survey	7 UPP	Refocusing			
				2	Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN						
					Pengkajian dan Penyempurnaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kajian	5 Dokumen	5 Dokumen			
					Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Kajian Tupoksi	5 Dokumen	5 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Uraian Jabatan berdasarkan beban kerja	937 UJ	Refocusing			
				Penyusunan Analisis Jabatan Perangkat Daerah	Jumlah jabatan yang dianalisis	600 UJ	7268 UJ			
							896 UJ			
				Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah	Jumlah Jabatan yang di evaluasi	50 UJ	Refocusing			
				Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Aparatur Sipil Negara	Jumlah Jabatan yang disusun Standar Kompetensinya	50 UJ	5 UJ			
				Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyusunan LKIP dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen LKIP Setda	4 Dokumen	4 Dokumen			
		Bagian Umum	Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian	1 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah				Tingginya intensitas jadwal acara kegiatan Pimpinan Daerah utamanya diluar	Pengaturan jadwal kegiatan Pimpinan disusun berdasarkan prioritas	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah dialog/audiensi masyarakat yang difasilitasi	96 kali	120 kali	jam dinas Seringnya terjadi permintaan acara mendadak tanpa konfirmasi Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan rumah tangga kepala daerah	Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang efektifdengan SKPD Memaksimalkan sumber daya yang ada guna melakukan pelayanan	
					Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga dan pakaian dinas kepala daerah/wakil kepala daerah	12 bulan	12 bulan			
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	1	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				Tingginya intensitas jadwal acara kegiatan Pimpinan Daerah utamanya diluar jam dinas Belum optimalnya pengetahuan dan keterampilan tenaga teknis keprotokolan dan komunikasi	Pengaturan jadwal kegiatan Pimpinan disusun berdasarkan prioritas Peningkatan kapasitas tenaga teknis keprotokolan dan komunikasi pimpinan dengan pelatihan dan bimtek	
					Pendampingan dan Pelayanan KDH dan WKDH Bidang Keprotokolan	Jumlah acara kedinasan yang dilayani	180 kali	531 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
				2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				pimpinan Lambatnya informasi dan koordinasi dengan SKPD Seringnya terjadi permintaan kunjungan kerja pada waktu yang bersamaan dan mendadak tanpa konfirmasi Belum efektifnya sumber data resmi pemerintah daerah sebagai acuan	keprotokolan dan komunikasi pimpinan Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan SKPD Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan SOP yang jelas tentang mekanisme kunjungan kerja	
					Pendampingan dan Pelayanan KDH dan WKDH bidang Keprotokolan	Jumlah kunjungan kerja yang difasilitasi	24 kali	17 kali			
				3	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi						
					Pembinaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah bahan rumusan komunikasi bagi Pimpinan Daerah	180 kali	192 kali			
				4	Pengembangan Data/Informasi						
					Peningkatan Pengelolaan Data/Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah kegiatan Pimpinan Daerah yang didokumentasikan/dipublikasikan	180 kali	202 kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
				5	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						
					Pembinaan Asistensi Pelayanan Publik	Jumlah dokumen informasi publik lingkup setda yang dapat diakses	4 Dokumen	4 Dokumen			
		Sekretariat DPRD	Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian	1	Program Peningkatan Kapsitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				) Jadwal Kegiatan DPRD sering mengalami penyesuaian / perubahan sehingga berpengaruh terhadap pemberian pelayanan dan dukungan tugas dan fungsi DPRD	)Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pemerintah Kota Mataram / Pihak – pihak terkait lainnya.	
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Naskah Akademik	3 buah	3 buah			
					Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah rapat hearing dan penerimaan kunjungan kerja	120 rapat	108 buah			
					Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah laporan alat kelengkapan DPRD	6 laporan	6 laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Risalah Sidang Rapat Paripurna	9 risalah	9 risalah			
				Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam masa reses	3 kegiatan	3 kegiatan			
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja	5 kali	1 kali			
				Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti diklat pedalaman tugas	40 orang	40 orang			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Perda	17 sosialisasi	15 sosialisasi			
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Terfasilitasi	18 kali kunjungan kerja	18 kali kunjungan kerja			
				Kegiatan Panitia Khusus	Jumlah Panitia Khusus DPRD	12 Panitia Khusus	10 Panitia Khusus			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD	Jumlah Rapat yang diikuti di luar daerah	12 rapat	12 rapat			
					Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah General check up	40 orang				
					Pengadaan Pakaian DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	200 stel	200 stel			
					Sosialisasi Kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD terpublikasi melalui media cetak dan elektronik	250 kali	195 kali			
					Peningkatan Fraksi-Fraksi DPRD	Jumlah laporan tenaga ahli Fraksi-Fraksi	84 laporan kerja	84 laporan kerja			
2	Pengawasan	Inspektorat	Peningkatan Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah SDM Tim Pemeriksa Aparatur Pengawas (APIP) belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang	Pengadaan pegawai untuk SDM Tim Pemeriksa (Auditor) Memperbanyak kegiatan diklat teknis yang berkaitan dengan	
					Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah obyek pemeriksaan dan tindak lanjut	144 obyek pemeriksaan	144 obyek pemeriksaan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi	10 OPD	10 OPD	memadai	pemeriksaan yang tentunya harus ditunjang dengan anggaran pengadaan diklat.	
				Pemantauan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemantauan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	8 OPD	8 OPD			
				Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD	Jumlah Laporan Keuangan OPD dan LKPD yang direviu	39 Laporan Keuangan OPD dan 1 Laporan Keuangan LKPD	39 Laporan Keuangan OPD dan 1 Laporan Keuangan LKPD			
				Review RKA SKPD dan RKA PPKD	Jumlah RKA OPD yang telah direviu	39 RKA OPD	39 RKA OPD			
				Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi obyek Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	39 OPD	39 OPD			
				Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dan Review LAKIP Pemda	Jumlah SAKIP OPD yang telah dievaluasi dan Jumlah LAKIP Kota Mataram yang telah direviu	39 SAKIP OPD dan 1 LAKIP Kota Mataram	39 SAKIP OPD dan 1 LAKIP Kota Mataram			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Evaluasi LKPD dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK	Jumlah Obyek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang dipantau	35 Obyek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	35 Obyek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan			
				Pengendalian Sapu Bersih Pungutan Liar	Jumlah obyek saber pungli	250 Obyek Saber Pungli	250 Obyek Saber Pungli			
				Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Realisasi Kota Mataram dan Jumlah Laporan Kemajuan Fisik Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pelelangan yang direviu	12 laporan	12 laporan			
				Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi obyek penanganan gratifikasi	39 OPD	39 OPD			
				Verifikasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN)	Jumlah OPD yang menjadi obyek sosialisasi LHKPN	39 OPD	39 OPD			
				Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi obyek penilaian Zona Integritas	1 OPD	1 OPD			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Monev Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blowing System (WBS)	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi obyek monev Benturan Kepentingan	39 OPD	39 OPD			
				Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS)	Jumlah OPD yang menjadi obyek pembinaan WBS	39 OPD	- (refocusing)			
				Monitoring dan Evaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi obyek Monev Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	8 OPD	8 OPD			
				Evaluasi Penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang menjadi obyek evaluasi SPIP	29 OPD	29 OPD			
				Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Jumlah Stakeholder yang menjadi Obyek Survei	100 orang	- (refocusing)			
				Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik	Jumlah Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik yang telah direviu	13 laporan	13 laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah Kasus Penyelesaian Kerugian Daerah	4 kasus	4 kasus			
				Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi Obyek Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	39 OPD	39 OPD			
				2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						
				Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Jumlah Infrastruktur elemen Kapabilitas APIP yang telah dibuat	14 infrastruktur	14 infrastruktur			
				Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Tugas Pokok Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	36 APIP	36 APIP			
				Pengusulan Dupak dan Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan JF P2UPD	Jumlah DUPAK yang dinilai	72 DUPAK	72 DUPAK			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
				3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						
					Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Regulasi Pengawasan yang telah dibuat	3 regulasi	1 regulasi			
3	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Peningkatan Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Target kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai, namun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain: - Proses perencanaan pembangunan (MPBM) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah membatasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang.	Penyesuaian-penyesuaian dilakukan untuk mengatasi permaslahan yang ada, sebagai berikut: - Melakukan musyawarah pembangunan dengan membatasi jumlah peserta dan tetap mengikuti protocol Kesehatan Covid-19. - Melakukan sosialisasi dan bimtek SIPD dengan mengundang narasumber dari Bappeda	
					Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersedianya Rancangan awal RKPD	1 dokumen	1 dokumen			
						Tersedianya BA MPBM Kota Mataram	1 dokumen	1 dokumen			
						Tersedianya Rancangan RKPD	1 dokumen	1 dokumen			
						Tersedianya Rancangan Akhir RKPD	1 dokumen	1 dokumen			
						Tersedianya Perwal RKPD	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)	Tersedianya Dokumen rancangan awal RKPD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	) Persiapan dalam rangka Penerapan SIPD untuk perencanaan pembangunan tahun 2021 belum maksimal dilakukan, sehingga butuh waktu tambahan untuk sosialisasi dan Bimbingan teknis penerapan SIPD kepada OPD.) Perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Kepmen 050-3708 Tahun 2020 mengharuskan OPD untuk melakukan pemetaan Program Kegiatan sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu tambahan bagi OPD dan Bappeda untuk memverifikasi	Provinsi NTB dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat menjelaskan dan mendampingi OPD mengisi SIPD.) Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penerapan SIPD dan Pemetaan Program Kegiatan kedalam Nomenklatur baru sesuai Kepmen 050-3708 Tahun 2020.	
					Tersedianya Dokumen rancangan RKPD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen			
					Tersedianya Dokumen RKPD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen			
				Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Pengelolaan aplikasi e-MPBM	1 kegiatan	1 kegiatan			
				Penyusunan KUA dan KUPA	Tersedianya dokumen KUA TA. 2020 dan KUPA TA. 2019	2 dokumen	2 dokumen			
				Penyusunan PPAS dan PPASP	Tersedianya dokumen PPAS TA. 2020 dan PPASP TA. 2019	2 dokumen	2 dokumen			
				Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data dalam SIPD	70%	75%			
				Penyusunan Perubahan RPJPD Kota Mataram	Tersedianya Dokumen Perubahan RPJPD Kota Mataram	1 dokumen	1 dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah	Terlaksananya Penyusunan usulan DAK Kota Mataram sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang ditetapkan nasional	3 tahapan	3 tahapan	hasil pemetaan OPD.		
				2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi						
					Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya Dokumen Makro Ekonomi Daerah	5 dokumen	5 dokumen			
					Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	SKPD yang memiliki konsistensi indikator kinerja antar dokumen perencanaan dengan kategori baik Sub Bidang Pembangunan Ekonomi dan Industri Kreatif	6 SKPD	6 SKPD			
				3	Program Perencanaan Sosial dan Budaya						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Sinergitas Penguatan Perencanaan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD yang memiliki konsistensi indikator kinerja antar dokumen perencanaan dengan kategori baik Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	6 SKPD	6 SKPD			
					Sinergitas Penguatan Perencanaan Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat	SKPD yang memiliki konsistensi indikator kinerja antar dokumen perencanaan dengan kategori baik Sub Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 SKPD dan 6 Kec.	4 SKPD dan 6 Kec.			
				4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	SKPD yang memiliki konsistensi indikator kinerja antar dokumen perencanaan dengan kategori baik Sub Bidang Sarpras	5 SKPD	5 SKPD			
				Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	SKPD yang memiliki konsistensi indikator kinerja pada dokumen perencanaan dengan kategori baik Koordinasi Sub Bid. SDM dan LH	6 SKPD	6 SKPD			
				Perencanaan Pengembangan Wilayah	SKPD yang memiliki konsistensi indikator kinerja pada dokumen perencanaan dengan kategori baik Koordinasi Sub Bid. Pengembangan Wilayah	6 SKPD	6 SKPD			
				Pengembangan Perencanaan Pembangunan Berbasis Geospasial	Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Berbasis Geospasial	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
				5	Program Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah						
					Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kota Mataram	1 dokumen	1 dokumen			
						Terlaksananya perbaikan indikator kinerja dalam rangka pelaksanaan rencana tindak lanjut perbaikan akuntabilitas inerja instansi pemerintah	1 kegiatan	1 kegiatan			
					Pengendalian Data dan Informasi Pembangunan	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengendalian data	4 tw	4 tw			
					Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD	1 dokumen	1 dokumen			
				6	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Laporan hasil evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi	6 laporan	6 laporan			
					Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Inflasi Daerah	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pengendalian inflasi daerah	4 laporan	4 laporan			
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DBHCHT	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan DBHCHT	10 laporan	10 laporan			
					Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Ekonomi Kreatif	Laporan hasil intervensi sector ekonomi kreatif unggulan	6 laporan	6 laporan			
				7	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya						
					Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan hasil evaluasi perencanaan pembangunan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat	6 laporan	6 laporan			
					Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Laporan hasil evaluasi perencanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	6 laporan	6 laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Penguatan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	Laporan hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan	6 laporan	6 laporan			
				8	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam						
					Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Laporan evaluasi perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4 dokumen laporan	4 dokumen laporan			
4	Keuangan	Badan Keuangan Daerah	Peningkatan pengelolaan sistem layanan keuangan daerah	1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Refocusing anggaran kegiatan untuk penanggulangan pandemi Covid 19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat Recofussing anggaran kegiatan untuk penanggulangan Pandemi Covid – 19 sesuai dengan kebijakan	Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi penatausahaan keuangan daerah ditiadakan untuk tahun anggaran 2020 Melaksanakan kegiatan penertiban SP2D sesuai Tupoksi Peniadaan pelaksanaan kegiatan	
					Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD peserta sosialisasi penatausahaan keuangan daerah	39 OPD	- OPD			
					Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Rancangan peraturan daerah yang disusun: • PERDA	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					RAPBD			pemerintah pusat pada OPD se – Kota Mataram mengakibatkan berkurangnya kegiatan. Belum ada modul penatausahaan dalam SIPD dari Kemendagri Kebijakan untuk tidak dilakukan pemeriksaan pajak daerah karena banyaknya pelaku usaha/objek pajak daerah yang menutup sementara usahanya akibat terdampak dari pandemi Covid-19, sehingga akan dilakukan pemeriksaan tahun berikutnya Target kinerja yang ditetapkan terlalu tinggi dan kesadaran WP dalam membayar pajak tepat waktu	bimbingan teknis implementasi paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat. Peniadaan Pelaksanaan kegiatan assistensi penatausahaan keuangan daerah Pengurangan target kinerja kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dari 215 Berita Acara Pemeriksaan menjadi 50 Berita Acara Pemeriksaan Melakukan sosialisasi secara rutin kepada WP setiap tahunnya, dan melakukan pendekatan lapangan / jemput bola dengan	
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Peraturan KDH yang dihasilkan: • Peraturan Walikota tentang Penjabaran RAPBD 2020	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum			
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Peraturan daerah yang dihasilkan: • Rancangan Perda Perubahan APBD 2019	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum			
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan KDH yang dihasilkan • Rancangan penjabaran perubahan APBD 2019	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum			
				Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikembangkan	1 Pengembangan	1 Pengembangan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Pembahasan RKA- SKPD dan DPA SKPD	Dokumen yang dibahas: • Pembahasan RKAP SKPD dan DPPA SKPD 2019 • Pembahasan RKA 2020 dan DPA 2020	4 Dokumen	4 Dokumen	masih rendah Terdapat 2 objek BMD yang diasumsikan dapat direalisasikan sebagai objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa tanah untuk ATM khususnya di RSU Kota Mataram yg merupakan obyek pendapatan BLUD RSU Kota Mataram Penetapan target Dokumen Analisa dan Verifikasi rencana kebutuhan BMD tidak sesuai Permendagri 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Dokumen Laporan Keuangan Semester 2 Kota Mataram	melibatkan pihak lingkungan /RT dalam melaksanakan pelayanan PBB di lingkungan. Melaksanakan kegiatan penyusunan produk hukum dengan anggaran yang tersedia yaitu Rancangan Peraturan Walikota tentang pedoman pemindah tanganan BMD Merealisasikan 17 bidang aset/BMD yang telah ditargetkan sebelumnya Mengurangi target kegiatan sehingga kinerja yang dihasilkan yaitu berupa dokumen Analisa dan Verifikasi rencana kebutuhan BMD dapat sesuai Permendagri 19	
					Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)	Pelayanan yang diselenggarakan: • Penerbitan SP2D	10000 SP2D	8904 SP2D			
					Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat	Kegiatan yang dilaksanakan: • Penyusunan Laporan Dana DAK	1 kegiatan	-			
					Pembinaan penatausahaan keuangan daerah	OPD yang menerima assistensi penatausahaan keuangan daerah	39 OPD	-			
				2	Program Pengendalian Pendapatan Daerah						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang dilaksanakan: • Koordinasi Pendapatan Asli Daerah • Asistensi PAD	Rp 306.337.291.261,15	Rp 349.707.910.703,21	dihasilkan setelah rekon semester 2 selesai yaitu pada Triwulan I Bulan Januari 2021 Jumlah peserta sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah yang dibatasi karena mengikuti protokol pengamanan Covid-19 Pelaksanaan Rekon untuk Bulan Desember 2020 dilaksanakan pada Bulan Januari 2021	Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Peserta terdiri dari bendahara dan pengentry data Belanja Tidak Terduga pada OPD Penyusunan produk hukum keuangan dilaksanakan pada tahun 2021 Penyesuaian target kinerja Dokumen pelaporan Keuangan OPD disusun Triwulan I tahun 2021 Dokumen Laporan Penghapusan Piutang disusun Triwulan I Tahun 2021	
				Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah	Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan: • Laporan hasil Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli daerah	10 Jenis Pajak Daerah	10 Jenis Pajak Daerah			
				Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Berita Acara Pemeriksaan yang dilaksanakan	215 BAP	61 BAP			
				Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan: • Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pajak	10 Produk Hukum	11 Produk Hukum			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						Daerah					
				3	Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data						
					Pendataan Obyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah	Pendataan obyek pajak daerah yang dilaksanakan: • Jumlah objek pajak daerah/retribusi daerah yang	82.500 WP	82.500 WP			
					Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Perhitungan dan Penetapan Pajak daerah yang dilaksanakan:					
						Penerbitan SKPD	2.693 ketetapan	1.903 ketetapan			
						Penerbitan SKPDKB	134 ketetapan	71 ketetapan			
						Penerbitan SPPT PBB	80.486 sppt	88.988 sppt			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Penyelenggaraan, Pengolahan dan Dokumentasi Data Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dengan Optimalisasi IT:	4 sistem	4 sistem			
				4	Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah						
					Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah	Penagihan pajak daerah yang dilaksanakan: • Pajak Daerah yang ditagih (Self Assesement)	Rp. 88.550.000.000,-	Rp. 93.302.649.883,-			
						• Pajak Daerah yang ditagih (Official Assesement)	Rp. 21.450.000.000,-	Rp. 24.617.452.187,-			
					Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak/Retribusi Daerah	Penanganan Pengaduan dan Restitusi Pajak Daerah yang dilaksanakan: • Jumlah wajib pajak yang ditangani	250 WP	620 WP			
					Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah	Sosialisasi yang dilaksanakan: • Sosialisasi Pajak Daerah BKD dan BBNKB • Sosialisasi penyampaian	2 kegiatan	3 Kegiatan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						SPPT PBB					
					Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yg dilayani:	125000 WP	51827 WP			
				5	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
					Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	Sistem informasi Pengelolaan Asset Daerah yang dihasilkan: • Pengembangan system informasi pengelolaan aset daerah (SIMDA BMD)	1 Pengembangan	1 Pengembangan			
					Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah Bidang Aset/Barang Milik Daerah yang Direvaluasi/Appraisal	22 Bidang	-			
					Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah yang Diusulkan	10 Dokumen	10 Dokumen			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterbitkan	3 Produk Hukum	1 Produk Hukum			
				Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan	10 Laporan	10 Laporan			
				Peningkatan	Jumlah Bidang Aset/ Barang Milik	18 Bidang	17 Bidang			
				Pendayagunaan Barang Milik Daerah	Daerah yang Didayagunakan					
				Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang Diterbitkan	2 BA Rekon	2 BA Rekon			
				Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Analisa dan Verifikasi rencana kebutuhan BMD yang dihasilkan	10 Dokumen	7 Dokumen			
				Pendataan, pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah	Jumlah Bidang Aset Tanah Pemerintah Daerah yang selesai didata, diamankan dan disertifikatkan	17 Bidang	162 bidang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah yang dilaksanakan	7 Bidang	9 bidang			
				6 Program Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram	Jumlah Laporan Kuangan Semesteran yang disusun tepat waktu • Laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	39 OPD	39 OPD			
				Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram	Laporan yang dihasilkan: Jumlah Dokumen Pelaporan Neraca Awal yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang Disusun Tepat Waktu	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perwal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Disusun Tepat Waktu	1 Produk Hukum	1 Produk Hukum			
				Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang memahami tentang sistem Akuntansi Berbasis Akrual	120 Aparatur	57 Aparatur			
				Penyusunan Produk- Produk Hukum Bidang Keuangan	Jumlah Produk Produk Hukum Bidang Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	2 Produk Hukum	-			
				Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi	Jumlah dokumen pemantauan tindak lanjut Kerugian Daerah yang Disusun Tepat Waktu	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Pendampingan Penerapan SAP Berbasis Akrual	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD yang Diterbitkan	12 BA Rekon	11 BA Rekon			
				Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrual dengan Aplikasi Simda	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Dilaksanakan	5 Dokumen	-			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Peningkatan Penghapusan Piutang Daerah	Jumlah laporan penghapusan Piutang Daerah yang selesai disusun	1 Laporan	-			
5	Kepegawaian serta pendidikan pelatihan	BKPSDM	Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian	1	Pendidikan Kedinasan				Pelaksanaan diklat kepemimpinan tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid 19 dan adanya recofusing anggaran diklat Pelaksanaan diklat sudah terlaksanan sesuai target perubahan walaupun ada recofusing anggaran diklat Kegiatan Panitia Seleksi JPT Pratama tidak dapat dilaksanakan terkait dengan ijin dari Pemerintah Pusat yg tidak dapat diberikan terkait Pandemi Covid 19	Menambah anggaran diklat kepemimpinan, Koodinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait kebijakan pelaksanaan diklat kepemimpinan dimasa Pandemi Covid 19 Menambah anggaran diklat teknis Fungsional untuk menambah kompetensi ASN pada Pemerintah Kota Mataram Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait ijin pelaksanaan Kegiatan Panitia Seleksi JPT Pratama	
					Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah ASN yang mengikuti Diklatpim	100%	0%			
				2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
					Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	Jumlah Calon ASN yang mengikuti diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNSD	100%	100%			
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	100%	100%			
					Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan KORPRI	100%	100%			
					Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah penerima bantuan tugas belajar	100%	100%			
				3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
					Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah dokumen yang disusun	100%	75%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah kegiatan seleksi	100%	100%			
					Data dan Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan pemenuhan data	100%	100%			
				4	Mutasi dan Pembinaan Pegawai						
					Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis		100%	100%			
					Proses Penangangan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kegiatan penanganan kasus pelanggaran disiplin	100%	100%			
					Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi pemenuhan dokumen kepegawaian ASN	100%	100%			
6	Penelitian dan Pengembangan	BALITBANG	Peningkatan Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan	1	Pengembangan Inovasi Daerah				1. Jumlah peserta yang mengikuti lomba inovasi daerah masih rendah dengan target peserta dari unsur DPRD, ASN, OPD, Masyarakat, Walikota, sedangkan	1.1. Informasi lomba inovasi daerah akan dipublikasikan melalui Surat Edaran, brosur, spanduk dan media sosial lainnya. 1.2. Mengadakan Bimtek Inovasi	
					Transfer dan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Tersedianya produk TTG yang diterapkan	2 Produk TTG	2 Produk TTG			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Desiminasi hasil penelitian dan inovasi daerah	Tersedianya Media desiminasi hasil penelitian, kajian dan inovasi daerah	1 Media dan 3 Kegiatan	1 Media dan 3 Kegiatan	selama ini peserta yang mengikuti masih didominasi hanya dari pihak OPD dan ASN 2. Kelengkapan administrasi dari inovasi daerah belum maksimal khususnya untuk mengikuti Penilaian Indeks Inovasi Daerah 3. Implementasi dari One Agency One Innovation (Satu Instansi/Lembaga minimal Satu Inovasi setiap tahun) yang merupakan amanat dari MENPAN RB bagi penyedia layanan publik belum optimal 4. Replikasi hasil inovasi daerah belum optimal 5. Jejaring inovasi daerah (replikasi internal) belum berjalan optimal 6. Belum optimalnya	Daerah dengan memberikan penjelasan dan motivasi tentang inovasi daerah 2.1. Mengadakan Bimtek Inovasi Daerah terkati materi tentang penilaian indeks inovasi daerah 2.2. Pendampingan inovator dalam pengisian indeks inovasi daerah 3.1. Perlu adanya Surat Edaran Walikota yang mewajibkan setiap Instansi/Lembaga yang memberikan layanan publik harus membuat minimal satu inovasi setiap tahun. 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait 4.1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembag	
				Pengembangan dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Meningkatnya kuantitas Inovasi Daerah yang berkualitas	12 Inovasi daerah	27 Inovasi daerah			
				Pekan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Keikutsertaan dalam pameran TTG	3 kgt Gelar TTG. Tk. Kota, Tk. Prov. Tk. Nasional	0			
				Advokasi, Asistensi, Supervisi, dan Edukasi Kelitbangan	Meningkatnya kapasitas inovator	5 Inovator	15 Inovator			
				Pemberdayaan Masyarakat Bidang IPTEK	Meningkatnya jumlah inovasi di seluruh Posyantek	6 Inovasi Produk TTG	5 Inovasi Produk TTG			
				2 Pengembangan SDA, Sarana/ Prasarana Wilayah						
				Kajian dan Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan di bidang SDA, dan Lingkungan hidup sesuai dengan isu strategis	2 Kajian	2 Kajian			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Kajian dan Analisa Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayah	tersedianya penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan isu strategis	1 Kajian	1 Kajian	apresiasi bagi inovator 7. Pengembangan Posyantek belum optimal 8. TTG yang dihasilkan Posyantek belum dapat dikomersilkan 9. Alokasi anggaran untuk kegiatan Posyantek seperti rancang bangun, pengembangan TTG dan kegiatan lainnya belum maksimal 10. Kelembagaan dan SDM di Posyantek belum optimal 11. Belum optimalnya OPD dan pihak trekait alam memanfaatkan hasil penelitian 12. Kurangnya SDM PNS fungsional peneliti 13. Kurangnya komitmen OPD dalam menerapkan hasil	a yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di tingkat Provinsi 4.2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat memfasilitasi untuk replikasi hasil inovasi daerah 5.1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait guna Memfasilitasi hasil inovasi daerah untuk diterapkan dalam upaya untuk membentuk jejaring inovasi 6.1. Melakukan koordinasi dengan TAPD terkait dengan apresiasi bagi inovator 7.1. Optimalisasi peran dan fungsi Tim Pembina	
					Kajian dan Analisa Bidang Sarana dan Prasarana	Tersedianya penelitian dan pengembangan di bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan isu strategis	1 Kajian	1 Kajian			
				3	Program penelitian dan pengembangan Ekonomi Sosial dan Budaya						
					Kajian dan Analisa Sosial Budaya	Tersedianya penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya sesuai dengan isu strategis	2 Kajian	2 Kajian			
					Kajian dan Analisa Bidang Ekonomi	Tersedianya penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi sesuai dengan isu strategis	3 Kajian	3 Kajian			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
					Jurnal penelitian kelitbangan	Tersedianya Jurnal Kelitbangan	1 Jurnal	1 Jurnal	kajian dalam kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan	POSYANTEK 8.1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk dapat memfasilitasi dan memanfaatkan TTG yang dihasilkan Posyantek 8.2. Melakukan pendampingan lebih optimal untuk pengembangan TTG 8.3. Mendorong pihak swasta melalui program CSR untuk memfasilitasi kualitas produk TTG 9.1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk dukungan anggaran kegiatan yang dimaksud 10.1 Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam peningkatan	
					Penyusunan Basis Data Kelitbangan	Tersedianya Basis Data Kelitbangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				4	Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Penunjang Kelitbangan						
					Pengendalian Mutu Kegiatan Kelitbangan	Jumlah hasil kajian kelitbangan yang memenuhi standar pengendali mutu	8 Kajian	8 Kajian			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									kapasitas kelembagaan dan SDM 10.2 Pendampingan bagi pengurus Posyantek dalam rancang bangun dan pengembangan TTG 10.3 Melakukan BIMTEK 11.1 Perlu adanya Diseminasi khusus yang bersifat teknis terkait tema kajian dengan melibatkan OPD tertentu 12.1. Perlu adanya pelatihan dan penetapan untuk PNS yang telah mengikuti diklat fungsional peneliti 13.1.Peningkatan kuantias dan kualitas penelitian 13.2.Mengintensifkan pelibatan pihak akademisi dan praktisi untuk meningkatkan kualitas kajian yang sudah ada.	

3.5 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.7

Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan kelanjutan program pascabencana	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan
2.	Evaluasi data kemiskinan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan
3.	Komitmen pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan
4.	Pencapaian target program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan
5.	Penguatan pelaksanaan bansos tepat sasaran	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan
6.	Pengembangan pekarangan untuk pengembangan pangan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan
7.	Pembentukan dan pembinaan kelompok KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan
8.	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan
9.	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		13 Tahun 2019	
10.	Pemerataan kualitas tenaga pendidik di semua satuan pendidikan dasar	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan
11.	Pemerataan sarpras penunjang layanan pendidikan	UU Nomor 20 tahun 2003 Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan
12.	Penguatan kelembagaan pendidikan (akreditasi sekolah)	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan
13.	Penguatan kapasitas pengawas pendidikan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan
14.	Penguatan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan
15.	Evaluasi data pokok pendidikan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan
16.	Memperkuat upaya kesehatan promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)	UU Nomor 36 Tahun 2009 Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
17.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
18.	Memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
19.	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
20.	Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan (sektor kriya, kuliner dan fashion)	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
21.	Promosi pariwisata melalui event-event olahraga, keagamaan dan budaya	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
22.	Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan UMB serta BUMD/ BUMN	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
23.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan I/UMKM	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
24.	Sinergitas program lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis dan pengendalian inflasi	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
25.	Integrasi program Gemar Makan Ikan (GEMARI) dengan pengembangan usaha kuliner berbasis Ikan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
26.	Perluasan akses informasi lapangan pekerjaan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
27.	Peningkatan keterampilan wirausaha produktif	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
28.	Perluasan akses kemitraan dengan dunia usaha dan industri	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
29.	Pengembangan komoditi dan teknologi pertanian berbasis lahan terbatas perkotaan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
30.	Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
31.	Evaluasi data ekonomi makro dan mikro daerah	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan
32.	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
33.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan kumuh perkotaan dan kelanjutan penanganan program pascabencana;	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
34.	Pengembangan akses air bersih, pengelolaan air limbah domestik komunal dan skala kota	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		13 Tahun 2019	
35.	Penanganan Sanitasi perkotaan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
36.	Normalisasi sungai dan saluran drainase perkotaan (penanganan banjir)	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
37.	Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum difabel.	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
38.	Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
39.	Pengendalian pemanfaatan ruang	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
40.	Penyebaran informasi penataan ruang	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
41.	Evaluasi dan Penguatan Pokja LISAN	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
42.	Evaluasi manajemen penanganan sampah perkotaan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
43.	Pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah)	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
44.	Manajemen rekayasa lalu lintas	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
45.	Evaluasi sistem transportasi publik	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
46.	Pengelolaan parkir	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman
47.	Evaluasi data infrastruktur perkotaan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
		Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	permukiman
48.	Penguatan Kelembagaan penanganan bencana	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana
49.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana
50.	Edukasi Mitigasi Bencana berbasis sekolah	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana
51.	Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
52.	Evaluasi pelaksanaan Smart City dan e-Governance	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
53.	Optimalisasi sistem administrasi kependudukan dan Capil	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
54.	Peningkatan Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
55.	Peningkatan pengelolaan sistem layanan keuangan daerah	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
56.	Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian	Perpres Nomor 61 Tahun 2019 Perda Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2019

Dalam penyampaian LKPJ Tahun 2019 terdapat beberapa catatan strategis berupa rekomendasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terhadap catatan dan rekomendasi tersebut telah ditinjaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2019

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pemerintah Kota Mataram di dalam menyusun perencanaan program kegiatan harus didahului dengan kajian yang matang dan didukung dengan kinerja dan ketersediaan SDM yang mumpuni. Selain itu, agar Badan Keuangan Daerah Kota Mataram memberikan data rincian SiLPA Tahun Anggaran 2019 secara detail di semua Perangkat Daerah Kota Mataram kepada DPRD Kota Mataram	Menyusun data rincian SILPA Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Mataram	Tersedianya data rincian SILPA Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Mataram.
2.	Dalam menentukan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mataram harus terlebih dahulu melakukan kajian potensi PAD secara optimal dengan perkiraan yang lebih terukur secara rasional dan realistik.	Pemerintah Kota Mataram telah melakukan Kajian Potensi Pajak Daerah dalam rangka optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah dengan membentuk Tim Penyusun Kajian Potensi Pendapatan Daerah Kota Mataram sesuai dengan	) Tersedianya dokumen kajian potensi pajak daerah yang dapat dijadikan pegangan dan/atau rujukan sistematis dalam mewujudkan PAD yang lebih optimal) Mengetahui besarnya potensi

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 1340/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020	pajak daerah yang dimiliki oleh Kota Mataram Tahun 2020 - Mengetahui efektifitas pajak daerah yang ada di Kota Mataram Tahun 2020 - Mengetahui rasio penerimaan dan rasio pertumbuhan pajak daerah serta persentase pertumbuhannya - Mengetahui Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020
3.	Untuk mengoptimalkan realisasi dan perolehan PAD yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Dinas Perhubungan Kota Mataram harus memperkuat dan memperketat pengawasan terhadap petugas/juru parkir serta Dinas Perdagangan Kota Mataram juga harus memaksimalkan pengawasan terhadap juru pungut retribusi Pasar.	1. Dishub Kota Mataram di tahun 2021 akan membentuk tim gabungan penertiban juru parkir yang terdiri dari TNI/Polri dan saber pungli guna menindakan aksi premanisme juru parkir. Dinamika persoalan dan singgungan yg tinggi dengan preman membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan sanksi yang dapat memberikan efek jera 2. Di tahun 2020 telah dilakukan penerapan parkir non tunai	1. Pertama kalinya Kota Mataram mampu menerapkan sistem bruto pembayaran retribusi parkir sebagaiman diamanatkan oleh Perda dan rekomendasi BPKP. Keberhasilan ini dilakukan melalui penerapan pembayaran parkir non tunai; 2. Revisi perda 7 tahun 2015 akan mengakomodir penerapan pembayaran non tunai yang saat ini belum diatur dalam

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Selain itu, agar Eksekutif mempercepat proses penyusunan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir, yang diharapkan dengan adanya penyempurnaan Perda tersebut akan terbangun sistem pengelolaan parkir yang lebih terstruktur dengan tata Kelola perparkiran yang lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan perolehan PAD yang bersumber dari parkir	pembayaran parkir. Dengan ini memudahkan pengawasan setoran parkir dan memonitor pembayaran retribusi yang masuk ke kas daerah. 3. Pada akhir tahun 2020 dishub kota mataram bersama akademisi fakultas hukum Universitas Mataram telah menyusun naskah akademik dan perubahan perda 7 tahun 2015. Pada tahun 2021 setelah finalisasi di tingkat eksekutif draft tersebut akan diajukan ke legislatif. 4. Guna mengoptimalkan realisasi dan perolehan PAD, maka Dinas Perdagangan melakukan pengawasan dan pengendalian dengan langkah-langkah antara lain : a) Melakukan audit, baik rutin maupun incidental (pemeriksaan atasan langsung); b) Memperbaiki sistem akuntansi / pembukuan penerimaan retribusi daerah; c) Memberikan penghargaan/reward yang memadai bagi pengelola pasar d) Meningkatkan disiplin dan	perda. 3. Mengoptimalkan realisasi retribusi yang disertai dengan pencatatan terhadap potensi dan perolehan yang baik dan akuntable.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan retribusi. (Rapat Evaluasi Pengelolaan Pasar.	
4.	Untuk memacu pertumbuhan UMKM di daerah sehingga berkontribusi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta para pelaku usaha untuk berperan aktif dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah	1. Melakukan pembinanan secara intensif kepada UMKM melalui pembinanan kelembagaan usaha design, pemasaran dan permodalan. Mengevaluasi kegitanan UMKM secara terus menerus agar tetap berkontribusi bagi perekonomian daerah 2. Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kota mataram maupun provinsi dan BPPOM.	1. Melakukan bimbingan dan pembinan kepada UMKM secara terus menerus melaluai kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat 2. Melakukan evaluasi terhadap bantuan yang telah di berikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
5.	Dalam upaya BUMD menjalankan fungsi kemamfaatan umum yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan cakupan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Mataram lebih memperhatikan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Mataram kepada BUMD dan ke depan agar nilai penyertaan modalnya dapat ditingkatkan secara bertahap	Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD dalam menjalankan fungsi dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat , kontribusi Pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang dalam keterkaitannya dengan	Meningkatkan kinerja PDAM dalam menjalankan fungsi dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		penyertaan modal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Ini ditunjukkan dengan besaran nilai saham yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar sebesar 41,67 persen. Kedepan atau lebih tepatnya pada APBD tahun anggaran 2021 telah dialokasikan besaran peyertaan modal pada Perseroda Air Minum Giri Menang sebesar 10 milyar rupiah	
6.	Dalam rangka mewujudkan kualitas SDM peserta didik yang memiliki kemampuan yang baik dan berdaya saing, Dinas Pendidikan Kota Mataram harus melakukan upaya yang lebih inovatif untuk mendukung peningkatan kualitas guru, sarana prasarana dan fasilitas penunjang Pendidikan, termasuk mengoptimalkan capaian target pada beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, APK SD atau setara, APM SD atau setara, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP atau setara, APK SMP,	Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan adalah Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendidikan melalui 2 sasaran strategis Yaitu Tersedianya akses layanan pendidikan yang memadai dan Tersedianya layanan pendidikan yang bermutu melalui upaya : 1. Melakukan Pendataan terhadap individual sekolah terkait data, sarana prasarana, Tenaga GTK, Kurikulum dan Peserta didik 2. Meningkatkan Kualitas guru dan	Didapatkan pemetaan data entitas kelembagaan sekolah mulai konsisi sarana, Peserta didik, kurikulum dan tenaga GTK sehingga mudah mengambil kebijakan Mendapatkan penilaian kompetensi kepala sekolah Operator sekolah mampu mengisi dan mengolah data pokok pendidikan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	APM SMP dan angka melanjutkan SD. Selain itu, penyelenggaraan PPDB agar dilakukan secara lebih transparan, sehingga calon peserta didik yang berasal dari Kota Mataram dapat diterima untuk bersekolah di semua jenjang satuan Pendidikan yang ada di Kota Mataram	Kepala Sekolah PAUD dengan cara: - Uji Kompetensi Kepala Sekolah PAUD - Pelatihan operator sekolah atas pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) - Mengadakan Workshop penyusunan bahan ajar PAUD (usulan di APBD murni dan mengalami rasionalisasi akibat covid-19 sehingga di tiadakan). - Mengadakan Workshop penyusunan kurikulum PAUD berbasis muatan lokal (usulan di APBD murni dan mengalami rasionalisasi akibat covid-19 sehingga di tiadakan) - Seminar Pengembangan PAUD HI (usulan di APBD murni dan mengalami rasionalisasi akibat covid-19 sehingga di tiadakan) - Bimbingan teknis manajemen kelembagaan PAUD (usulan di APBD	

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		murni dan mengalami rasionalisasi akibat covid-19 sehingga di tiadakan) - Pelatihan guru untuk peningkatan Pendidikan karakter (usulan di APBD murni dan mengalami rasionalisasi akibat covid-19 sehingga di tiadakan) - Tapi disaat pandemic ini banyak kegiatan yang tdk bs dilaksanakan dikarenakan ada rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid19 serta ada edaran agar pemebalajaran melalui online. 3. Peningkatan akses layana Pendidikan sarana prasarana dan kualitas penunjang PAUD, SD dan SMP yang meningkatkan akses layanan Pendidikan bagi peserta didik.: - Sosialisasi pengelolaan BOP PAUD - Rehabilitasi gedung PAUD - Pembangunan Gedung sekolah PAUD	

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		- Pengadaan peralatan pendidikan dan media pendidikan - Pengadaan meubelair sekolah PAUD - Penembokan/pemagaran gedung sekolah PAUD - Pemberian Bansos hibbah terhadap lembaga jenjang PAUD	
		5. Dalam upaya penjaminan mutu pendidikan dasar guna meningkatkan kualitas/mutu dan relavansi layanan pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan kegiatan : - Relaksasi Kurikulum Sekolah (KTSP) dengan berpedoman pada Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus - Peningkatan kualitas proses	Sekolah mampu mengelola Biaya Operasional PAUD dan dana BOS Reguler, meningkatkan akses layanan Pendidikan bagi peserta didik kurang mampu Tersedianya Gedung sekolah yang memadai Terlaksananya perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan Tersedianya meubelair, peralatan pendidikan dan media pendidikan Tersedianya pagar/tembok sekolah yang memadai Teralokasinya bantuan social hibbah kepada lembaga PAUD, SD dan SMP

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		pembelajaran melalui Penilaian Akhir Semester (PAS) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) bersama pada jenjang pendidikan dasar. - Peningkatan kompetensi guru dalam menyusun bahan evaluasi melalui workshop penyusunan soal dengan melibatkan MGMP/KKG - Penguatan karakter dan peningkatan prestasi peserta didik melalui lomba kreativitas dan inovasi siswa bidang sains dan seni budaya seperti OSN, FLS2N dan KOSN	
		6. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan telah melaksanakan kegiatan : - PPDB system online pada jenjang SMP dengan berpedoman pada	Memperluas dan mempermudah akses layanan Pendidikan bagi warga Kota Mataram usia sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP 1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Permendikbud No. 44 Tahun 2019 yang mengakomodir calon peserta didik melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua. Sedangkan pada jenjang SD dengan system offline melalui jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua - PPDB system online maupun offline (SMP/SD) dilaksanakan secara transparan sehingga anak usia sekolah di Kota Mataram dapat ditampung pada 146 SD Negeri dan 24 SMP Negeri serta 27 SD Swasta dan 22 SMP Swasta - Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Laboratorium , ruang perpustakaan, peralatan computer untuk pembelajaran TIK dan Ujian Berbasis Komputer sebagai upaya penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di	Pendidikan dan Kebudayaan 3. Mewujudkan Kesetaraan Dalam Memperoleh Layanan Pendidikan dan Kebudayaan 1. meningkatkan akses layanan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		seluruh wilayah Kota Mataram - Dalam upaya meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan telah memberikan layanan akses pendidikan yang seluas–luasnya bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus (ABK) pada SD dan SMP yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif (SD/SMP Inklusif) dan dibuatkan SK Kepala Dinas untuk Sekolah2 tsb, Sosialisasi pengelolaan dana BOS, Bantuan Bagi Siswa Miskin, Pemberian Bansos hibah terhadap lembaga jenjang SD dan SMP	Pendidikan bagi peserta didik kurang mampu 2. Meningkatkan kepastian/ keterjaminan memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan
7.	Dinas Kesehatan Kota Mataram harus memperkuat program gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan lebih	1. Melakukan Pendataan terhadap individual sekolah terkait data, sarana prasarana, Tenaga GTK, Kurikulum dan Peserta didik	Membiasakan PHBS dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam masa pandemi Covid-19

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga capaian target Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat dan Mortality Death Rate (MDR) dibidang kesehatan dapat ditingkatkan, serta diharapkan ke depannya tidak ada lagi warga masyarakat yang terpapar penyakit atau virus yang dapat membahayakan hidupnya. Selain itu, pentingnya peningkatan layanan, pengawasan dan memberikan dukungan terhadap penanganan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang selalu muncul dan menjadi masalah setiap tahunnya	2. Meningkatkan Kualitas guru dan Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP dengan cara: - Uji Kompetensi Kepala Sekolah PAUD, SD, SMP - Pelatihan operator sekolah atas pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) - Mengadakan Workshop penyusunan bahan ajar PAUD SD dan SMP **(usulan di APBD murni dan mengalami rasionalisasi akibat covid-19 sehingga di tiadakan).** - Mengadakan Workshop penyusunan kurikulum PAUD berbasis muatan lokal **(usulan di APBD murni dan mengalami rasionalisasi akibat covid-19 sehingga di tiadakan)** - Seminar Pengembangan PAUD HI **(usulan di APBD murni dan mengalami rasionalisasi akibat covid-19 sehingga di tiadakan)** - Bimbingan teknis manajemen kelembagaan PAUD **(usulan di APBD murni dan**	serta upaya untuk menekan kasus DBD di Kota Mataram.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		mengalami rasionalisasi akibat covid-19 sehingga di tiadakan) - Pelatihan guru untuk peningkatan Pendidikan karakter **(usulan di APBD murni dan mengalami rasionalisasi akibat covid-19 sehingga di tiadakan)** - Penilaian Kinerja Guru, Pendampingan Penyusunan Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif Bagi Guru SD dan SMP dll Tapi disaat pandemic ini banyak kegiatan yang tdk bs dilaksanakan dikarenakan ada rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid19 serta ada edaran agar pemebalajaran melalui online. 3. Peningkatan akses layana Pendidikan sarana prasarana dan kualitas penunjang PAUD, SD dan SMP yang meningkatkan akses layanan Pendidikan bagi peserta didik.: - Sosialisasi pengelolaan dana	

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		BOS, BOP PAUD, bantuan siswa miskin - Rehabilitasi gedung PAUD, SD dan SMP - Pembangunan Gedung sekolah PAUD, SD dan SMP - Pengadaan peralatan pendidikan dan media pendidikan - Pengadaan meubelair sekolah PAUD, SD dan SMP - Penembokan/pemagaran gedung sekolah PAUD, SD dan SMP - Pemberian Bansos hibbah terhadap lembaga jenjang PAUD, SD dan SMP - Pengadaan Alat Peraga untuk SMP	
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram harus melakukan upaya pencegahan dan penanganan banjir atau genangan sebagai dampak meluapnya saluran drainase dan sungai di saat musim penghujan yaitu melalui kegiatan normalisasi dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan banjir atau genangan hinga Tahun Anggaran 2020. Upaya-upaya	- Ada beberapa lokasi yang sering terjadi luapan/ genangan karena tingginya sedimentasi, plat jembatan yang terlalu rendah, air buangan warga yang belum terkoneksi dengan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	pembersihan saluran/got dari timbunan lumpur/tanah dan sampah rumah tangga. Selain itu, terkait dengan adanya program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umumdan dari hasil LHP BPK terdapat adanya temuan yang mengharuskan pengembalian anggaran dikarenakan kekurangan volume pekerjaan, agar Pemerintah Kota Mataram menjadikan hal tersebut sebagai evaluasi perbaikan kinerja Dinas PUPR Kota Mataram termasuk memperketat pengawasan pada saat pelaksanaan pekerjaan program kegiatan tersebut	tersebut antara lain : 1. Melalui swakelola, kegiatan pemeliharaan oleh petugas Operasi dan Pemeliharaan saluran dan sungai: - Mengoptimalkan kegiatan normlaisasi pada saat musim kemarau untuk antisipasi musim penghujan; - Penggalian sedimentasi dan pengangkatan sedimen terapung (sampah); - Menormalisasi saluran pembuang langsung ke arah sungai; - Pembongkaran plat-plat yang terlalu rendah dan plat-plat menerus penyebab terjadinya sumbatan; - Pengoperasian pintu air; - Penanganan dan pemantauan lebih intensif di titik-titk rawan di crossing jalan yang sering terjadi sumbatan dan luapan akibat adanya sampah; dan	saluran yang lebih besar - Beberapa saluran yang mengalami kerusakan talud - Saluran masih berupa talud tanah - Masih banyak daerah/ tebing sungai yang rawan longsor, terutama yang berdekatan dengan pemukiman warga, sedangkan pembangunan tanggul sungai diprioritaskan pada sungai yang rawan terjadi luapan - Daerah sungai yang mengalami pendangkalan akibat tingginya sedimentasi. terkait dengan adanya program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum dan dari hasil LHP BPK terdapat adanyat emuan yang mengharuskan pengembalian anggaran dikarenakan kekurangan volume pekerjaan pada 4 pekerjaan

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		- Rehabilitasi pasangan saluran, pembangunan plat-plat baru pengganti plat-plat lama dan pembuatan box-box control di beberapa lokasi sporadis se Kota Mataram dengan anggaran fisik swakelola sebesar ± Rp. 60.000.000,- . 2. Melalui kontraktual Kegiatan fisik penanganan saluran mengambil lokasi dengan permasalahan: - Lokasi sering terjadi luapan/ gengan karena tingginya sedimentasi, plat jembatan yang teralu rendah, air buangan warga yang belum terkoneksi dengan saluran yang lebih besar; - Kerusakan talud saluran; dan - Saluran masih talud tanah; Sehingga melalui pekerjaan fisik, dilakukan kegiatan normalisasi, rehabilitasi dan peningkatan saluran baik dengan konstruksi pasangan	

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		batu maupun saluran beton di 10 (sepuluh) lokasi di Kota Mataram dengan alokasi anggaran ± Rp. 1.460.000.000,- (DAU) dan ± Rp.4.400.000.000,- (DAK). Kegiatan normalisasi, rehabilitasi dan peningkatan saluran, dapat mengoptimalkan kembali fungsi saluran irigasi dan drainase yang ada. Kegiatan fisik penangan Sungai : - Pembangunan penahanan tebing sungai diprioritaskan untuk yang berada di tebing/sungai terkait dengan adanya program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum dan dari hasil LHP BPK terdapat adanya temuan yang mengharuskan pengembalian anggaran dikarenakan kekurangan volume pekerjaan pada 4 pekerjaan, Dinas PUPR akan Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kinerja	

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		bawahannya, lebih cermat dalam mengawasi dan memerika pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dengan menyetorkan ke kas daerah	
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram harus mengoptimalkan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dikawasan perumahan termasuk melakukan upaya agar Pengembang Perumahan menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah	Menginventarisi Pengembang dan Perumahan yg dibangunnya, baik Pengembang REI maupun Pengembang perorangan kemudian menghitung PSU yg ada tiap lokasi shg diperoleh data yg komprehensif.	1.Mendapatkan data pengembang yg SDH maupun yg blm menyerahkan Fasos Fasumnya. 2. Inventarisasi data yg akurat memudahkan intervensi oleh Pemkot. 3. Mengetahui jumlah riil asset Pemkot dari pembangunan Perumahan di Kota Mataram.
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram harus melakukan upaya untuk menangani permasalahan belum meratanya bantuan perbaikan rumah kepada warga masyarakat korban Gempa di tahun 2018 sesuai dengan klasifikasi/tingkat kerusakannya	Diawal kegiatan penanganan bantuan perbaikan rumah Tahap Pertama (SK 1 s/d SK 10), pemerintah lebih memprioritaskan warga yang tingkat kerusakan rumahnya paling parah (rusak berat dan rusak sedang). Sehingga banyak data warga yang diajukan ke BPBD dikembalikan ke kelurahan karena tidak memenuhi kriteria.	Meratanya bantuan perbaikan rumah kepada warga masyarakat korban Gempa Bumi di tahun 2018 sesuai dengan klasifikasi/tingkat kerusakannya

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Tahun 2019 dibuka lagi untuk Tahap Kedua (SK 11). BPBD dengan dibantu fasilitator melakukan penyisiran kembali warga yang belum diakomodir di Tahap Pertama. Sama halnya denga yang di Tahap Pertama, di Tahap Kedua ini juga banyak data warga yang dikembalikan ke kelurahan karena tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan karena ada yang sudah mendapatkan bantuan dari BAZNAS dan PERKIM.	
11.	Untuk mempermudah Pemerintah Kota Mataram menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk saat ini, Dinas Sosial Kota Mataram harus melakukan perbaikan dan sekaligus memperbaharui kualitas data warga miskin dan PMKS di Kota Mataram yang sampai saat ini masih carut marut dengan kualitas data yang belum valid sehingga menimbulkan permasalahan baru di masing-masing lingkungan	1. Solusi tuntuk perbaikan Data terhadap temuan di lapangan pada saat pendropingan / pendistribusian JPS Kota Mataram, pihak Dinas Sosial Kota Mataram dan kelurahan sepakat dilakukan penundaan bantuan kepada beberapa Kepala Keluarga yang tidak lagi valid sebagai calon penerima bantuan, dan harus segera diusulkan calon pengganti oleh pihak kelurahan yang dituangkan dalam berita acara usulan pengganti penerima bantuan Kota Mataram.\	Data yang sudah diperbaiki segera dilakukan Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk diusulkan kembali ke pusat data dan informasi Kementrian Sosial untuk perbaikan data yang akan ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		2. Secara bertahap solusi di atas (poin 1) memberikan titik terang bagi proses verifikasi berjalan bersamaan dengan pendropingan/pendistribusian, dan pola ini juga ditemukan untuk sasaran penerima bantuan sosial dari Kemensos RI yang berpotensi masih salah sasaran dan juga dobel bantuan. 3. Kemudian untuk menyempurnakan pelaksanaan verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang betul-betul tepat sasaran, maka dilakukan pemeriksaan data dengan berbasis NIK dan berbasis KK (oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram) guna memastikan penerima bantuan tepat sasaran.	
12.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram harus lebih kreatif dan inovatif menangani masalah sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, termasuk juga pentingnya mengembangkan budaya patisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan yaitu dengan memaksimalkan pengelolaan Bank Sampah di	1. Terkait PENGURANGAN SAMPAH Perlu disampaikan bahwa Bank Sampah yang ada di lingkungan adalah milik swasta, yang bukan dikelola oleh lingkungan/ Kelurahan maupun Kecamatan. Dinas LH telah menganggarkan pada APBD	1. Inovasi dalam situasi Covid 19, untuk tetap melaksanakan tugas Bidang Persampahan sesuai Perda No. 1 Tahun 2019 Pasal 7 (h). 2. Sekolah LISAN adalah bagian dari upaya kreatifitas

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	tingkat Kelurahan, Lingkungan/RT yang dibarengi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah. Selain itu, agar mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan melakukan tindakan penertiban terhadap keberadaan TPS-TPS ilegal yang memanfaatkan tanah kosong/terlantar	murni 2020 untuk Bank Sampah yang dikelola oleh DLH di Kebon Talo serta Pembinaan kesadaran lingkungan terkait persampahan sampai pada level Kelurahan. Akan tetapi, semua anggaran rencana kegiatan tersebut telah dialihkan / refocusing untuk penanganan Covid 19. Sehingga yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan dalam rangka pengurangan sampah melalui Pembinaan Sekolah LISAN dengan melakukan tatap muka terbatas terhadap 5 orang Pengajar per sekolah (sesuai Protokol Covid 19). 2. Terkait TPS ILEGAL : - Sepanjang TA. 2020, DLH telah menutup 7 titik TPS ilegal antara lain di perbatasan Bengkel Lobar dan Turida Kota Mataram dan sepanjang jalan TGH. Faesal, Jln. Brawijaya dan lain-lain. - Demikian juga dengan penutupan TPS Karang Medain dan Karang Taruna, yang ditutup berdasarkan	DLH sekaligus edukasi kepada masyarakat melalui sekolah untuk melakukan Pengolahan Sampah berdasarkan 3R.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		permintaan warga dan persetujuan Kelurahan bersangkutan. Dengan demikian sampah dialihkan oleh operator roda 3 ke depo terdekat misalnya ke Depo Lawata. - Memaksimalkan pengangkutan sampah dari TPS-TPS ke TPA dengan melakukan operasi clean up sampah di TPS Sandubaya sebagai contoh, dengan mengerahkan sejumlah kendaraan angkut sampah secara intensif. - Menyiagakan Satgas Kebersihan DLH Kota Mataram pada titik-titik TPS ilegal yang telah ditutup agar warga mematuhi waktu, lokasi dan jadwal pembuangan sampah sesuai peraturan. - Berkoordinasi dengan Lurah pada lokasi TPS ilegal tersebut untuk mencegah munculnya kembali TPS ilegal di wilayah yang bersangkutan.	2. TUJUAN : - Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2, Pasal 8 (e, f, g), Pasal 10 dan Pasal 11 Perda No. 1 Tahun 2019.

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
13.	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram harus melaksanakan pembinaan kepada pelaku UMKM se-Kota Mataram yang didahului dengan melakukan pendataan UMKM secara menyeluruh yang tersebar dimasing-masing Kelurahan	Pendataan pada pelaku UMKM yang membutuhkan pembinaan / Bintek dan pelatihan misalnya, bintek manajemen usaha, laporan keuangan dan peningkatan produksi dan lain – lain.	Dengan terlaksananya bimbingan teknis untuk UMKM diharapkan UMKM dapat berkembang dan mengalami peningkatan skala usaha.
14.	Dinas Pariwisata harus mengoptimalkan pengelolaan Cagar Budaya yang ada di Kota Mataram baik yang dibidayai dari APBN maupun APBD sehingga berkontribusi dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan kepariwisataan daerah	Dinas Pendidikan Hanya melaksanakan Pelatihan bagi Tenaga Pengelola Cagar Budaya serta Sosialisasi Cagar Budaya Bagi Guru dan Siswa	Menyamakan persepsi akan peratauran, tupoksi bagi tenaga cagar budaya dan menambah wawasan, pengetahuan akan cagar budaya bagi siswa dan guru
15.	Pemerintah Kota Mataram melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PT. PLN (Persero) UIP Nusra dalam penyelesaian persoalan LP2B pengganti sebagai konsekuensi dari pembangunan PLTGU Lombok Peaker	3. Pemerintah Kota Mataram telah melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) sesuai surat Sekretaris Daerah Kota Mataram Nomor 050.13/24.04/336.Sp/Bpd-Kt/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Percepatan Realisasi Kompensasi Penggantian Lahan RTH; 4. PT. PLN (Persero) memberikan jawaban melalui surat General Manager Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara –	Percepatan Realisasi Kompensasi Penggantian Lahan RTH

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		PT. PLN Nomor 1412/KON.01.04/UIP NUSRA/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Realisasi Kompensasi Pengganti Lahan RTH. Pihak PT. PLN (Persero) menyampaikan dasar-dasar pertimbangan dalam Pembangunan PLTGU Lombok Peaker 150 MW dan menyatakan bahwa PT. PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara tidak memiliki landasan hukum untuk menyediakan lahan pengganti RTH di Kota Mataram.	
16.	Dalam rangka menjaga ketertiban dan kebersihan di jalan raya akibat kotoran kuda yang berbahaya dapat mengganggu kesehatan masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Mataram harus melakukan pendataan alat angkutan tradisional (CIDOMO) dimasing-masing Kecamatan, serta memperkuat pengawasan dan melakukan penertiban sekaligus bersamaan dengan upaya pemberdayaan dan alih profesi bagi pemilik/kusir CIDOMO yang disesuaikan dengan rasio tingkat kebutuhan terhadap jasa angkutan CIDOMO secara proporsional sehingga mereka ke depannya memiliki tingkat	1. Pada tahun 2020 dishub memulai tahapan penataan cidomo yaitu pendataan. Dari data yang ada sudah diketahui lokasi tempat mangkal dan jumlah eksisting cidomo yang berasal dari Kota Mataram. Selanjutanya di tahun 2021 Dishub Kota Mataram sudah menyiapkan anggaran untuk memberikan identitas cidomo dan kelengkapan kebersihan cidomo. Identitas berupa tanda kendaraan sehingga memudahkan pengawasan. 2. Terkait dengan alih profesi kusir	Dalam upaya menjaga ketertiban dan kebersihan di jalan raya akibat kotoran kuda

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu, agar Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap keberadaan Halte Bus khususnya di malam hari dan perlunya dilakukan kajian terhadap keberadaan Halte Bus tersebut yang pemanfaatannya tidak maksimal	cidomo, jumlah cidomo di Kota Mataram tidak signifikan, sebagian besar merupakan pendatang dari Lombok Barat. Kedepannya Dishub Kota Mataram bisa bekerjasama dengan balai pelatihan kerja untuk memberikan keterampilan kerja bagi para kusir cidomo sehingga dapat beralih profesi. 3. Terkait halte bus, kedepannya akan disiapkan sistem pengamanan yang lebih baik bagi halte antara lain lampu penerangan dan konsep yang terbuka bagi halte sehingga memudahkan pengawasan. 4. Halte bus yang saat ini dibangun tidak dapat dipakai maksimal dikarenakan trayek BRT yang dibiayai oleh Pusat dan Provinsi tidak berjalan lagi. Kedepannya dari hasil komunikasi dengan pihak provinsi NTB dan BPTD Kemenhub layanan BRT akan kembali diaktifkan oleh Pihak Provinsi guna mendukung KSPN	

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Mandalika. Sehingga diharapkan penggunaan halte lebih maksimal.	
17.	Dalam rangka mendukung Kota Mataram sebagai Smart City, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram harus lebih memperkuat program pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan mengedepankan konsep IT. Selain itu, agar lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap Tower Bersama sehingga keberadaannya tidak meresahkan masyarakat dan juga guna meningkatkan perolehan PAD	1. Pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi khusus sudah berpedoman pada Perda no 3 tahun 2020 tentang SPBE Kota Mataram dan Buku Peta Jalan dan Arsitektur SPBE Kota Mataram 2. Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan menara telekomunikasi di kota mataram telah diterbitkannya peraturan walikota mataram no. 41 tahun 2019 tentang pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Meningkatkan kualitas komunikasi dalam hal kelancaran dalam mengakses telekomunikasi tersebut sehingga dapat mempermudah untuk masyarakat dalam berkomunikasi satu sama lain dan mempermudah untuk memperoleh suatu informasi dan menyebarkan informasi tersebut.
18.	Guna memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Walikota Mataram selaku pejabat Pembina Kepegawaian harus menempatkan SDM atau Pegawai ASN yang mumpuni dan kapabel di setiap Perangkat Daerah termasuk memprioritaskan penempatan SDM atau pegawai ASN yang memiliki	Pemerintah Kota Mataram telah menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun, dan telah mengusulkan formasi CPNS setiap tahunnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi termasuk kebutuhan SDm/ASN yang memiliki kempuan elektonik (IT). Namun	Mengoptimalkan tenaga kontrak/ PTT di kelurahan (3 hingga 4 tenaga kontrak/PTT masing – masing kelurahan) yang pengangkatannya ditetapkan oleh Camat sebagai Kepala Perangkat Daerah

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	kemampuan akses data secara elektronik (IT) di masing-masing Kelurahan se-Kota Mataram. Selain itu, di dalam melakukan promosi jabatan haruslah lebih selektif dengan mempertimbangkan senioritas pangkat/ golongan, kualitas kemampuan SDM dan masa kerja pegawai ASN, sehingga produktifitas kinerja ASN dapat berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing	formasi yang disetujui dan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada pelayanan dasar (tenaga guru dan kesehatan). Mengacu pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk promosi berdasarkan system merit yaitu berdasarkan melihat kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Ditindak lanjuti dengan melakukan assessment pejabat Eselon III dan Eselon IV serta pelaksana untuk penentuan komptensi sebagai dasar promosi.	Pengisian jabatan melalui promosi dan mutasi sesuai dengan system merit
19.	Untuk mempercepat penanganan COVID, a. Pemerintah Kota Mataram mengoptimalkan pelaksanaan program Pencegahan COVID-	Untuk mendukung percepatan penanganan Covid 19 berbasis	Pengoptimalan pelaksanaan Penanganan Covid berbasis

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	19 Berbasis Lingkungan dengan melibatkan seluruh stakeholders bersama masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu menggunakan masker, physical distancing, social distancing, membiasakan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), serta memberi perhatian dan perlindungan kepada pihak-pihak yang rentan/beresiko tertular COVID-19 seperti Lansia, orang yang memiliki penyakit bawaan yang bersifat akut, anak-anak dan ibu hamil.	lingkungan di Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram mendistribusikan langsung ke lingkungan berupa : a. Masker sebanyak 266.000 buah b. Sabun cuci tangan sebanyak 5700 buah c. Tempat Cuci tangan bagi semua lingkungan dari Dinas Perkim. d. Thermo gun sebanyak 355 buah e. Spanduk himbauan 450 buah f. Buku panduan pelaksanaan 500 buah g. Penyemprotan oleh masing-masing lingkungan diberikan alat penyemprot dan cairan disinfektan dari kecamatan untuk semua lingkungan.	lingkungan (PCBL) yanag dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram melibatkan semua stakeholder sampai dengan tingkat RT dan menyentuh langsung kemasyarakat. Terbentuknya kelompok kerja(pokja) PCBL dari tingkat Kotaa Mataram, Kecamatan, Kelurahan di semua kelurahan menjadi tolak ukur keopti,malan pelaksanaan PCBL yang mana semua POKJA bergerak seiring seirama menangani masalah covid 19 yang awalnya dari **zona merah menjadi zona kuning menuju ke hijau yang mana sekita 90% kelurahan dan lingkungan di Kota Mataram di kategorikan sebagai Zona Hijau.**
	b. Terhadap Pasien COVID (khususnya anak-anak) diberikan fasilitas bermain dan didukung dengan kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan umurnya	Untuk pasien Covid 19 khususnya pasien anak-anak, pemerintah Kota Mataram khususnya RSUD Kota Mataram telah menyediakan fasilitas	

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	sehingga diharapkan dapat mempercepat kesembuhannya;	playground dan buku bacaan yang disediakan di Wisma Nusantara.	
	c. Semua tenaga Kesehatan yang menangani COVID termasuk tenaga Instalasi Pemulasaraan Jenazah (IPJ) dan petugas Office Boy (OB) yang kesehariannya membersihkan ruang rawat isolasi pasien COVID, diberikan INSENTIF sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Untuk tenaga Kesehatan yang menangani covid telah dianggarkan insentif sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Namun untuk jasa tenaga cleaning service tidak dianggarkan dikarenakan tenaga cleaning service menggunakan jasa pihak ke tiga	

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBATUAN DAN PENUGASAN

4.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana hal ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tugas pembantuan yang dijembatani oleh kepala daerah dapat memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11 tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang berimplementasi atas asas Tugas Pembantuan memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan serta mempertanggungjawabkannya yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia kepada yang memberi penugasan.

Pengaturan pendanaan tugas pembantuan bersumber dari APBN melalui bagian anggaran kementrian/Lembaga dan dana ini dialokasikan berasarkan rencana kerja yang telah dibuat. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dapat dilaksanakan setelah adanya penugasan dari pemerintah melalui kementerian negara/Lembaga kepada kepala daerah yang diberikan tugas.

Tujuan pengaturan pendanaan ini untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Sehingga pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintah, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan daerah dan pelayanan umum.

4.1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan di Kota Mataram adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
f) DIPA Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan RI No. SP DIPA-090.02.4.235157/2020.

4.1.2 INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun 2020 ini Pemerintah Kota Mataram menerima tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Mataram yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut adalah Dinas Perdagangan Kota Mataram.

4.1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA

Program dan kegiatan tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang dialokasikan untuk Kota Mataram melalui Dinas Perdangan Kota Mataram adalah Program Pengembangan perdagangan Dalam Negeri. Adapun gambaran program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.1.
Deskripsi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
Tahun 2020

No	Nama Program/ Kegiatan	Deskripsi Kegiatan				
		Sasaran	Target		Output	Outcome (yang Diharapkan)
			Vol.	Sat.		
1	Pekerjaan konstruksi Fisik Pasar Rakyat ACC Ampenan 2	Terbangunnya/ Direvitalisasi pasar Rakyat	1	Unit	Terbangunnya/ Direvitalisasi Pasar rakyat	Pertumbuhan Omzet Pedagang Pasar Rakyat Tipe A Yang Telah Direvitalisasi

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Mataram

Adapun capaian indikator kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan tahun 2020 adalah sebagaimana termuat dalam tabel 4.2. berikut ini :

Tabel 4.2.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Tahun 2020

PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
		OUTPUT	TARGET	REALISASI
2.	4.	5.	6.	7.
Pengembangan perdagangan Dalam Negeri	Pekerjaan Konstruksi fisik Pasar Rakyat ACC Ampenan 2	Terbangunnya Pasar Rakyat ACC Ampenan 2	100 %	100 %

Sumber : Dinas Perdagangan Setda Kota Mataram

Dari tabel 4.2. di atas dapat dilihat bahwa program kegiatan tugas pembantuan yang meliputi kegiatan pekerjaan konstruksi fisik Pasar Rakyat ACC Ampenan 2 menunjukan capaian indikator kinerja yang **Sangat baik.** Hal ini dapat dilihat dari realisasi fisik pembangunan pasar sebesar 100%.

4.1.4 SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan bersumber dari dana APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 1.330.362.048,- atau 88,69% sedangkan realisasi fisik mencapai 100% sebagaimana tertera pada Tabel 5.1.

Tabel 4.3
Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan
di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2020

NO	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	1.500.000.000	1.330.362.048	88,69 %	100 %
	TOTAL	1.500.000.000	1.330.362.048	88,69 %	100 %

4.1.5 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Berikut ini adalah hambatan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Mataram yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram sebagai penerima tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal Peragangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Table 4.4

Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan

PERMASALAHAN	SOLUSI
Tidak ada realisasi pencairan dana untuk SPPD dalam daerah dan luar daerah untuk ke KPPN karena KPPN tidak melayani tatap muka karena kondisi Pandemi Covid-19	Pengajuan pencairan dana dilakukan secara online sehingga dana SPPD dalam daerah dan luar daerah tidak digunakan

BAB V
P E N U T U P

Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2020 bahwa di tahun 2020 ada beberapa perubahan yang menunjukan ke arah yang lebih baikf namun ada juga beberapa perubahan yang menunjukan adanya penurunan dari tahun sebelumnya.

Perubahan positif yang dapat dilihat selama kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut, pertama ditahun 2020 angka kemiskinan yang ada di Kota Mataram mengalami penurunan, di tahun 2019 angka kemiskinan Kota Mataram sebesar 8,92 %, sementara di tahun 2020 angka kemiskinan yang ada di Kota Mataram mengalami penurunan sebesar 0,45 %, yaitu berada pada angka 8,47 %.

Penyebaran virus corona atau (covid-19) ditahun 2020 telah membuat aktivitas ekonomi di Kota Mataram melambat. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram hanya tumbuh moderat sebesar 2.39% lebih lambat dari capaian pertumbuhan ekonomi pasca gempa Lombok tahun 2018 (4.98%) dan tahun 2019 sebesar 5.58

Melambatnya kinerja ekonomi Kota Mataram secara langsung berimbas pada menurunnya pendapatan per kapita sebesar Rp. 27,87 Juta dari target sebesar Rp. 30,99 juta pada tahun 2020. Menurunnya pendapatan per kapita, juga tercermin dari lemahnya daya beli masyarakat. Di sektor ketenagakerjaan, pandemi covid-19 telah berdampak terhadap berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia di Kota Mataram dari target yang ditetapkan sebesar 93.98% pada tahun 2020, namun Kesempatan Kerja (KK) yang tersedia hanya sebesar 93.17%. Imbasnya, angka pengangguran juga meningkat di Kota Mataram.

Pandemi COVID-19 juga membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Mataram. IPM Kota Mataram tahun 2020 adalah sebesar

78,91 atau turun sebesar 0,19 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 79.10. Penurunan nilai IPM Kota Mataram tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari 15,43 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 14,97 juta rupiah atau pertumbuhannya melambat sebesar minus 2.97% pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Mataram berhasil meraih beberapa prestasi di tingkat nasional dan regional NTB berkat dukungan dan peran serta para stakeholders dan warga masyarakat Kota Mataram, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. SAKIP Award 2019 dengan Predikat “B” pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Prov/Kab./Kota Wilayah II Tahun 2019 di Nusa Dua Bali pada 26 Januari 2020.

2. Penganugerahan Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 dalam kategori “memuaskan” oleh Arsip Nasional RI di Surakarta 26 Februari 2020.

3. Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kepada H. Ahyar Abduh Walikota Mataram pada Peringatan HUT ke-70 POLPP dan ke-68 Satlinmas Tingkat Nasional di Mataram tgl. 3 Maret 2020 oleh Mendagri Tito Karnavian.

4. Penghargaan atas diraihnya opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemda Tahun Anggaran 2019 oleh BPK tgl 21 Mei 2020 melalui Video Conference di Mataram.

5. Penghargaan kepada Kota Mataram atas komitmennya dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Melaporkan Capaian Berbasis Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui Video Conference tanggal 22 Juli 2020 di Mataram .

6. Penghargaan Pemerintah R.I kepada Pemerintah Kota Mataram Atas Capaian Opini WTP 5x berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 s.d 2019.

7. Penghargaan Terbaik Kedua kepada BKD Kota Mataram sebagai Mitra Kerja Terbaik dalam Penyampaian LKPD Tahun 2019 lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, diserahkan oleh Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Prov. NTB Syarwan, SE., MM. di Mataram 21 Oktober 2020.
8. Piagam Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 tanggal 14 Desember 2020 di Mataram.

9. Penghargaan TOP 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian PAN dan RB tanggal November 2020.

10. Kota Sangat Inovatif pada Innovative Government Award 2020 dari Menteri Dalam Negeri di Jakarta 14 Desember 2020.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun 2020 patur disyukuri. Keberhasilan diraih atas Kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintahan Daerah) baik di tingkat Kabupaten/Kota, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Mataram memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kota Mataram yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif walaupun pada tahun 2020 ini kita harus menghadapi wabah Pandemi Covid – 19 sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Daerah Kota Mataram membuka selebar – lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan Petunjukn-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan ***" Mataram yang Maju dan Religius"***